



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP - 2025)



**DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dapat tersusun, sebagai bahan pertanggungjawaban akuntabilitas pencapaian *outcome*, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran Tahun 2025 sebagaimana diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *outcome* maupun *ouput* yang berkelanjutan.

LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ini menyampaikan sejumlah capaian kinerja terhadap target kinerja yang tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 beserta analisisnya, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap dengan telah disusunnya LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ini akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, 29 Januari 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta,



Dr. drh. Hasudungan A. Sidabalok, M.Si
NIP 197308122006041004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban kepada publik sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance). Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal-hal yang dibahas dalam laporan ini mencakup Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas beserta capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Di dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 terdapat sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional yang merupakan tahun ke-5 dalam mencapai Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2025:

No.	Kelompok Sasaran	Jumlah Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai
1	Sasaran Strategis	9	7	2
2	Sasaran Relevan Lainnya	8	8	0
Total		17	15	2

Dari tabel dan bagan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dengan jumlah indikator sebanyak 17, tercapai sebanyak 15 indikator dan tidak tercapai sebanyak 2 indikator. Adapun indikator yang tidak tercapai antara lain;

1. Memperkuat Ketahanan, Keamanan, dan Jaminan Ketersediaan Pangan dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan dengan realisasi sebesar 71,52% atau 98,50%.
2. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU) dengan realisasi sebesar 3,22 atau 71,20 %.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2025 berjalan sesuai target dilihat dari capaian penuntasan indikator Sasaran Utama (IKU) dan capaian serapan anggaran. Anggaran yang mendukung IKU Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2025 sebesar Rp. 1.379.798.631.747,- dengan realisasi Rp. 1.359.356.615.372,- atau 98,52 %. Pagu anggaran tersebut terdiri dari 14 program yang dilaksanakan oleh 13 UKPD.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
1.2.1 Kedudukan	2
1.2.2 Tugas	2
1.2.3 Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	4
1.4 Permasalahan Dan Isu Strategis	8
1.5 Sumber Daya	9
1.5.1 Sumber Daya Manusia.....	9
1.5.2 Sarana dan Prasarana	15
1.6 Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP	16
1.7 Sistematika Penulisan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2023-2026.....	22
2.1.1 Tujuan Pembangunan DKI Jakarta Jangka Panjang Tahun 2005- 2025.....	22
2.1.2 Tujuan Renstra.....	24
2.1.3 Sasaran Renstra	24
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32

3.1	Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2025.....	33
3.2	Analisis Capaian Kinerja	36
3.2.1	Capaian IKU Indeks Kesehatan Laut di Wilayah Kewenangan Provinsi.....	36
3.2.2	Capaian IKU Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik ..	42
3.2.3	Capaian IKU Jumlah Produksi Perikanan	45
3.2.4	Capaian IKU Persentase Peningkatan Produksi Pertanian.....	49
3.2.5	Capaian Persentase Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura	52
3.2.6	Capaian IKU Persentase Peningkatan Produksi Peternakan.....	56
3.2.7	Capaian IKU Indeks Ketahanan Pangan.....	62
3.2.8	Capaian IKU Skor Pola Pangan Harapan (PPH).....	67
3.2.9	Capaian IKU Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU).....	72
3.3	Capaian IKU Sasaran Relevan lainnya.....	78
3.4	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah.....	80
BAB IV PENUTUP		84
4.1	Kesimpulan	84
4.2	Saran	85
4.3	Rencana Tindak Lanjut.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Lokasi Kerja.....	10
Tabel 1. 2 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2025 Berdasarkan Golongan	11
Tabel 1. 3 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan	12
Tabel 1. 4 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan	13
Tabel 1. 5 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).....	14
Tabel 1. 6 Rekapitulasi Jumlah PJLP	15
Tabel 1. 7 rincian sarana dan prasarana DKPKP	15
Tabel 1. 8 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	16
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2023 s.d 2026	25
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025	26
Tabel 2. 3 Alokasi Anggaran Penetapan dan Perubahan Belanja Per Program Tahun 2025	29
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	32
Tabel 3. 2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 202533	
Tabel 3. 3 Nilai IKLD Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024 dan 202536	
Tabel 3. 4 Perbandingan IKU Indeks Kesehatan Laut dengan Standar Nasional	39
Tabel 3. 5 Program pendukung capaian IKU Indeks Kesehatan Laut.....	40
Tabel 3. 6 Program pendukung capaian IKU Persentase Luasan Kawasan Perairan dan Pesisir yang Memiliki Ekosistem Pesisir Esensial dalam Kondisi Sedang dan Baik.....	44
Tabel 3. 7 Jenis Produksi Perikanan.....	46

Tabel 3. 8 Perbandingan IKU Jumlah Produksi Perikanan dengan Standar Nasional	47
Tabel 3. 9 Program pendukung capaian IKU Jumlah Produksi Perikanan ...	48
Tabel 3. 10 Produksi Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	49
Tabel 3. 11 Produksi Peternakan (Daging, Susu dan Telur)	49
Tabel 3. 12 Program pendukung Capaian IKU Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	51
Tabel 3. 13 Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	53
Tabel 3. 14 Program Pendukung C IKU Persentase Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura.....	55
Tabel 3. 15 Jumlah Produksi Peternakan Tahun 2024 dan Tahun 2025	57
Tabel 3. 16 Program pendukung Capaian IKU Persentase Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura.....	59
Tabel 3. 17 Skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Berdasarkan Kota/ Kab Administrasi.....	62
Tabel 3. 18 Perbandingan IKU Indeks Ketahanan Pangan dengan Standar Nasional	64
Tabel 3. 19 Program pendukung capaian IKU Indeks Ketahanan Pangan ..	65
Tabel 3. 20 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH).....	67
Tabel 3. 21 Perbandingan IKU Indeks Ketahanan Pangan dengan Standar Nasional	69
Tabel 3. 22 Program Pendukung Capaian IKU Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	70
Tabel 3. 23 Perbandingan IKU Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU) dengan Standar Nasional	74
Tabel 3. 24 Program pendukung capaian IKU Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU).....	75
Tabel 3. 25 Sasaran relevan Lainnya Tahun 2025.....	78
Tabel 3. 26 Capaian Anggaran Program Tahun 2025.....	80
Tabel 3. 27 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	83
Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2025.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Stuktur Organisasi DKPKP	7
Gambar 1. 2 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Lingkup DKPKP Tahun 2025	11
Gambar 1. 3 Jumlah ASN dan P3K Berdasarkan Golongan Tahun 2025	12
Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2025	13
Gambar 1. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025	14
Gambar 3. 1 Hasil perhitungan IKLD Provinsi DKI Jakarta	37
Gambar 3. 2 Indeks Kesehatan Laut di Wilayah Kewenangan Provinsi pada Tahun 2023–2025	38
Gambar 3. 3 Tampilan Website JakOcean.....	41
Gambar 3. 4 Persentase Luasan Kawasan Perairan dan Pesisir yang Memiliki Ekosistem Pesisir Esensial dalam Kondisi Sedang dan Baik Tahun 2023 - 2025	43
Gambar 3. 5 Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2023 - 2025	46
Gambar 3. 6 Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2023 - 2025...	50
Gambar 3. 7 Persentase Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura Tahun 2023 - 2025	53
Gambar 3. 8 Teknologi Rak Hidroponik	56
Gambar 3. 9 Persentase Peningkatan Peningkatan Produksi Peternakan Tahun 2023 - 2025	58
Gambar 3. 10 Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 - 2025.....	63
Gambar 3. 11 Tampilan Website SIKP	66
Gambar 3. 12 Peningkatan Skor PPH Tahun 2023 - 2025	69
Gambar 3. 13 Tampilan Website DKPKP.....	71
Gambar 3. 14 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU) Tahun 2023 - 2025	73
Gambar 3. 15 Tampilan Website DKPKP.....	76
Gambar 3. 16 Tampilan Website IPJ	77
Gambar 3. 17 Perbandingan Anggaran dan Realisasi selama 8 Tahun Terakhir	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	88
Lampiran 2 Rencana Aksi Tahun 2025	97
Lampiran 4 Capaian Kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.....	108
Lampiran 5 Penghargaan Tahun 2025.....	157



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian di DKI Jakarta diarahkan pada berbagai sektor untuk meningkatkan kualitas layanan publik, kapasitas ekonomi dan sosial, serta lingkungan hidup. Pembangunan sektor ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan berperan penting dalam menjaga keberlangsungan sistem perekonomian DKI Jakarta.

Terdapat berbagai tantangan bagi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta terutama karena berkedudukan di ibukota negara, tantangan kedepan adalah mengendalikan ketersediaan bahan pangan baik produksi pertanian dan hortikultura, peternakan, maupun kelautan dan perikanan, berupa produk dasar maupun produk olahan. Selain ketersediaan pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan mutu dan keamanan pangan yang beredar dalam Kota Jakarta.

Dalam urusan lingkungan hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai tantangan berupa pelestarian sumber daya kelautan secara berkesinambungan.

Sedangkan peluang di sektor kelautan dan perikanan dimana luas laut 6.997,5 km² jauh lebih luas dibandingkan dengan luas daratan 661,52 km² perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas pembangunan Jakarta. Potensi kelautan dan perikanan yang ada sekarang perlu ditransformasi dari keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Tantangan dan peluang di atas tentu harus direspon dengan baik dengan mengimplementasikan berbagai macam strategi, program dan kegiatan.

Pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan secara sinergis harus dilakukan. Kondisi ini dapat diciptakan antara lain melalui pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan dengan penataan kelembagaan, perbaikan mekanisme kerja organisasi, penataan sumber daya aparatur, dan peningkatan kompetensi aparatur dengan pelimpahan tugas dan wewenang yang lebih spesifik. Penataan kelembagaan telah dilakukan pada awal Januari 2017 ini yaitu dengan restrukturisasi organisasi pada lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1.2.1 Kedudukan

Pelaksanaan tugas organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan.

1.2.2 Tugas

Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan.

1.2.3 Fungsi

Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas KPKP;
- b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas KPKP;
- d. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- g. pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- h. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital Dinas KPKP;
- i. pembangunan dan pengembangan kegiatan urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- j. perlindungan sumber daya ketahanan pangan, kelautan, perikanan, peternakan, pertanian dan kesehatan hewan;
- k. pelaksanaan perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh bahan pangan asal hewan, tanaman dan ikan;
- l. pemantauan dan pengendalian distribusi ketersediaan, keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dalam rangka ketahanan pangan;
- m. fasilitasi pemasaran hasil urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- n. pembinaan tenaga fungsional urusan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;

- o. penyelenggaraan standarisasi di bidang kegiatan urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan Kesehatan hewan;
- p. konservasi dan pengembangan ekosistem laut, pesisir, pulau-pulau kecil;
- q. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- r. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- s. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- t. pengelolaan kesekretariatan Dinas KPKP;
- u. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- v. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- w. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas KPKP; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan lengkapnya sebagai berikut:

A. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan
 - 3. Subkelompok Kepegawaian; dan
 - 4. Subkelompok Program dan Pelaporan;
- c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - 1. Subkelompok Pangan;
 - 2. Subkelompok Distribusi Pangan; dan
 - 3. Subkelompok Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
- d. Bidang Kelautan, terdiri dari:
 - 1. Subkelompok Tata Kelola Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil;
 - 2. Subkelompok Pendayagunaan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil; dan
 - 3. Subkelompok Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- e. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 - 1. Subkelompok Perikanan Budidaya;
 - 2. Subkelompok Perikanan Tangkap; dan
 - 3. Subkelompok Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- f. Bidang Pertanian, terdiri dari:
 - 1. Subkelompok Pertanian Perkotaan dan Penyuluhan;
 - 2. Subkelompok Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian; dan
 - 3. Subkelompok Pengendalian Mutu dan Agribisnis.
- g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 - 1. Subkelompok Peternakan;
 - 2. Subkelompok Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - 3. Subkelompok Kesehatan Hewan

B. Suku Dinas lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Susunan Organisasi Suku Dinas Lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- 1. Suku Dinas Kota Administrasi yang terdiri dari:
 - a. Kepala Suku Dinas;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian;

- d. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Seksi Perikanan;
- f. Subkelompok Jabatan Fungsional

2. Suku Dinas Kabupaten Kota Administrasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Suku Dinas;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- d. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Seksi Kelautan dan Perikanan;
- f. Subkelompok Jabatan Fungsional

C. Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 1 BLUD. Masing-masing UPT terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, 2 Satuan Pelaksana, dan Subkelompok Jabatan Fungsional. Adapun UPT lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

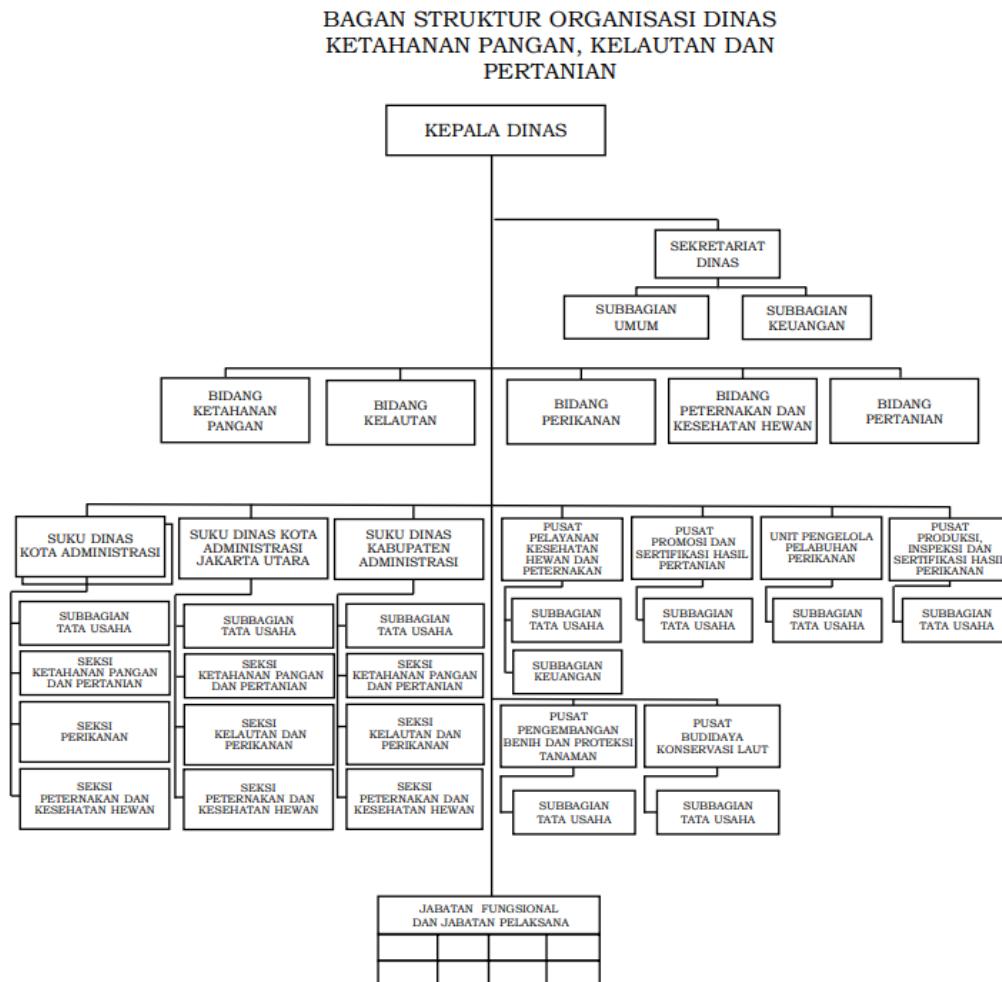
- 1. Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman.
- 2. Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian.
- 3. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan
- 4. Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan
- 5. Pusat Budidaya dan Konservasi Laut

Adapun BLUD lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- 1. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.
 - 1. Kepala Pusat
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3. Subbagian Keuangan
 - 4. Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan
 - 5. Satuan Pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 6. Satuan Pelaksana Usaha dan Promosi Peternakan
 - 7. Satuan Pelaksana Rumah Potong Hewan

8. Satuan Pengawas Internal
9. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. 1 Bagan Stuktur Organisasi DKPKP



1.4 Permasalahan Dan Isu Strategis

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dibentuk dengan mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Sektor yang ada dalam Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta terdiri dari bidang-bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Suku Dinas. Kombinasi itu membutuhkan koordinasi yang kuat dan saling bersinergi untuk meningkatkan kinerja agar pelayanan menjadi optimal. Disamping itu dampak atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai implementasi otonomi daerah, berakibat peralihan tugas dari semula ditangani oleh pemerintah pusat melalui jalur kementerian menjadi ditangani oleh pemerintah daerah, termasuk di dalamnya penyuluhan pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, serta kelautan dan perikanan.

Agar implementasi semua program kerja dapat berjalan optimal, dilakukan dua pendekatan, yaitu meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan kesadaran penuh bersinergi untuk pencapaian bersama.

Permasalahan baik faktor internal maupun eksternal adalah rujukan untuk menetapkan kebijakan dan program periode 2023-2026. Permasalahan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi dua besar :

1. Permasalahan terkait organisasi dan sumber daya Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
2. Isu terkait berdasarkan urusan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta meliputi :

1. Berdasarkan aspek kajian pada permasalahan yang terkait dengan jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia diantaranya jumlah tenaga teknis yang masih dibawah standar ideal sesuai kebutuhan organisasi. Hal ini akan berdampak pada belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
2. Permasalahan terkait urusan pangan, dimana saat ini kebutuhan per hari beras sebanyak 2.580 ton, daging sapi 200 ton, daging ayam 499 ton, telur ayam 326

ton, cabe rawit merah 68 ton, cabe besar keriting 92 ton, bawang merah 77 ton, bawang putih 63 ton, gula pasir 178 ton dan minyak goreng 583 ton. Dengan kebutuhan pangan yang sangat besar maka Provinsi DKI Jakarta akan menjadi ketergantungan dengan pemasok dari daerah lain. Faktor lainnya adalah belum optimalnya system Cadangan dan rantai pasokan dan logistic. Sehingga diperlukan pemutakhiran data terkait ketahanan pangan (Tingkat kebutuhan, ketersediaan, distribusi dan pemasok) untuk menunjang penguatan ketahanan pangan.

3. Permasalahan terkait urusan kelautan dan perikanan, potensi jumlah produksi perikanan yang cukup besar baik perikanan tangkap, budidaya maupun produk olahan hasil perikanan. Potensi sumber daya kelautan diantaranya luas Kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan rehabilitasi sebesar 291 Ha. Dalam Upaya pengelolaan sektor kelautan perikanan maka perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana perikanan (tangkap, budidaya, olahan hasil perikanan), meningkatkan rehabilitasi ekosistem laut serta meningkatkan pembinaan pelaku usaha kelautan perikanan. Permasalahan utama diantaranya belum siapnya regulasi terkait pemanfaatan ruang dan sumber daya kelautan, serta masih kurang updatenya ketersediaan teknologi kelautan dan perikanan.
4. Permasalahan terkait urusan pertanian meliputi sektor pertanian dan peternakan. Kondisi saat ini persentase peningkatan produksi pertanian sebesar 45,7%. Terbatasnya lahan pertanian dan peternakan merupakan salah satu kendala dalam peningkatan produksi. Permasalahan utama urusan pertanian diantaranya terjadinya alih fungsi lahan menjadi perdagangan, pemukiman dan industri.

1.5 Sumber Daya

1.5.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pencapaian sasaran suatu program dan kegiatan, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja perangkat daerah tersebut. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS atau Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Berdasarkan data statistik per bulan Desember

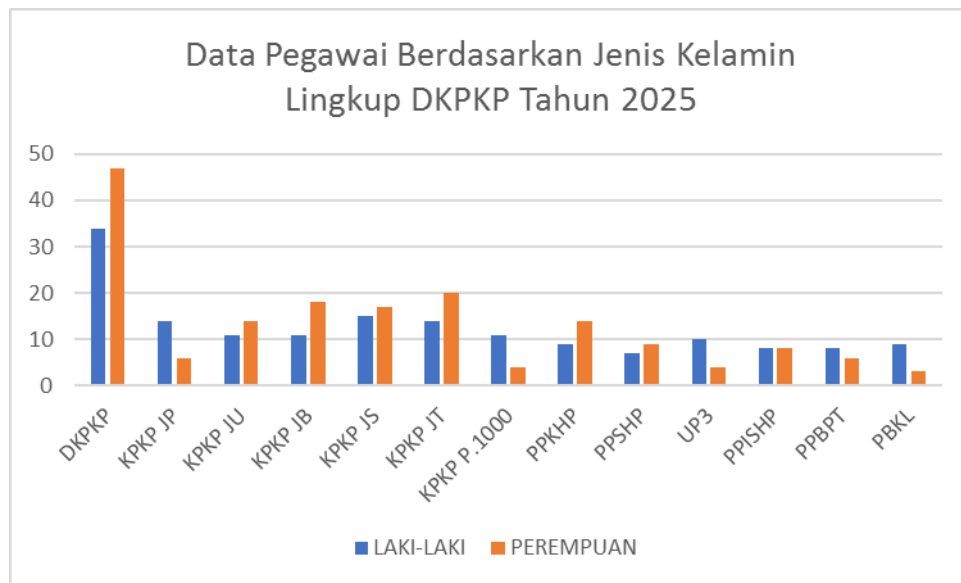
tahun 2025, jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebanyak 331 orang yang berada di Dinas, Suku Dinas dan UPT. Seluruh Pegawai Negeri Sipil tersebut berasal dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda dari tingkat SD sampai tingkat Pasca Sarjana (S2), dengan pangkat golongan dari I/C sampai dengan IV/D. Adapun gambaran umum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Suku Dinas dan UPT Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Lokasi Kerja

NO	LOKASI KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH PNS
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	34	47	81
2	SUKU DINAS KPKP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	14	6	20
3	SUKU DINAS KPKP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	11	14	25
4	SUKU DINAS KPKP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	11	18	29
5	SUKU DINAS KPKP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	15	17	32
6	SUKU DINAS KPKP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	14	20	34
7	SUKU DINAS KPKP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	11	4	15
8	PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN (PPKHP)	9	14	23
9	PUSAT PROMOSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN (PPSHP)	7	9	16
10	UNIT PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN (UP3)	10	4	14
11	PUSAT PRODUKSI INSPEKSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN (PPISHP)	8	8	16
12	PUSAT PENGEMBANGAN BENIH DAN PROTEKSI TANAMAN (PPBPT)	8	6	14
13	PUSAT BUDIDAYA DAN KONSERVASI LAUT (PBKL)	9	3	12
	TOTAL	161	170	331

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian)

Gambar 1. 2 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Lingkup DKPKP Tahun 2025



(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian)

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2025 Berdasarkan Golongan

NO	GOL	JUMLAH
1	Juru Muda (I/a)	0
2	Juru Muda Tk.I (I/b)	0
3	Juru (I/c)	1
4	Juru Tk.I (I/d)	0
5	Pengatur Muda (II/a)	7
6	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	1
7	Pengatur (II/c)	54
8	Pengatur Tk.I (II/d)	24
9	Penata Muda (III/a)	13
10	Penata Muda Tk.I (III/b)	63
11	Penata (III/c)	37
12	Penata Tk.I (III/d)	55
13	Pembina (IV/a)	35
14	Pembina Tk.I (IV/b)	8
15	Pembina Muda (IV/c)	0

NO	GOL	JUMLAH
16	Pembina Madya (IV/d)	1
17	Pembina Utama (IV/e)	0
18	X	1
19	IX	18
20	VII	2
21	V	11
TOTAL		331

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian)

Gambar 1. 3 Jumlah ASN dan P3K Berdasarkan Golongan Tahun 2025



(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian)

Tabel 1. 3 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan

No	JABATAN	JUMLAH
1	JABATAN PIMPINAN TINGGI	1
2	JABATAN ADMINISTRATOR	17
3	JABATAN PENGAWAS	31
4	KETUA SUBKELOMPOK	16
5	JABATAN PELAKSANA	192
6	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	74
TOTAL		331

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian)

Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2025



(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian)

Tabel 1. 4 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S-3	1
2	S-2	42
3	S-1/D-IV	131
4	D-III	73
5	D-II	1
6	D-I	0
7	SMA	80
8	SMP	2
9	SD	1
	TOTAL	331

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian)

Gambar 1. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025



(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah terdapat Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang ada di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian antara lain dari kelompok rumpun ilmu hayat baik dari sektor pertanian, peternakan serta perikanan. Adapun jenis Jabatan Fungsional Tertentu dan jumlah pegawai dalam JFT seperti table berikut:

Tabel 1. 5 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JUMLAH JFT
1	ANALIS KETAHANAN PANGAN	4
2	PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	4
3	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3
4	PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR	9
5	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	3
6	PERENCANA	1
7	MEDIK VETERINER	8
8	PARAMEDIK VETERINER	5
9	PENGAWAS BENIH TANAMAN	3
10	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	11

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JUMLAH JFT
11	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	6
12	PENYULUH PERTANIAN	28
	TOTAL	85

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian)

Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas operasional, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian juga didukung oleh tenaga non-PNS yaitu Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang berjumlah ± 829 orang yang meliputi PJLP Teknis dan Non Teknis yang terdapat pada Dinas, Sudin dan UPT dengan rincian seperti tabel berikut.

Tabel 1. 6 Rekapitulasi Jumlah PJLP

NO	JENIS PJLP	JUMLAH (orang)	KETERANGAN
1	PJLP TEKNIS	379	Tenaga PJLP meliputi Petugas Lapangan dan Pendamping Kewirausahaan Terpadu (PKT)
2	PJLP NON TEKNIS	595	Petugas Kebersihan, Keamanan, dan Mekanikal elektrikal
	TOTAL	974	

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian)

1.5.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 Unit Pelaksana Teknis dan 1 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengelola sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan. UPT tersebut dilengkapi dengan laboratorium pemeriksaan. Adapun rincian sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian seperti tabel berikut.

Tabel 1. 7 rincian sarana dan prasarana DKPKP

No	Kebun Bibit	Laboratorium
1	Kebun Bibit Ragunan	Laboratorium Perikanan Pluit
2	Kebun Bibit Ciganjur	Laboratorium Pertanian Cibubur
3	Kebun Bibit Cibubur	Laboratorium Peternakan Bambu Apus
4	Kebun Bibit Wisata Agro Cibubur	

No	Kebun Bibit	Laboratorium
5	Kebun Bibit Agrowisata Cilangkap	
6	Kebun Bibit Condet	
7	Kebun Bibit Kelapa Dua Wetan	
8	Kebun Bibit Lebak Bulus	
9	Kebun Bibit Ujung Menteng	
10	Kebun Bibit Sukapura	
11	Kebun Bibit Kamal Muara	
12	Kebun Bibit Cengkareng	
13	Cagar Buah Condet	
14	Kebun Bibit Sawah Abadi	

No	Balai Benih Ikan (BBI)	Pelabuhan Perikanan	Tempat Pendaratan Ikan
1	Balai Benih Ikan Ciganjur	Pelabuhan Muara Angke	TPI Muara Angke
2	Balai Benih Ikan Kalideres	Pelabuhan Cilincing	TPI Cilincing
3	Balai Benih Ikan Ujung Menteng	Pelabuhan Kalibaru	TPI Kalibaru
4	Balai Benih Ikan Ciracas	Pelabuhan Kamal Muara	TPI Kamal Muara
5	Balai Benih Ikan Laut Pulau Tidung	Pelabuhan Pulau Pramuka	TPI Pulau Pramuka

1.6 Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP

Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2025 belum dirilis oleh Inspektorat, sehingga informasi yang ditampilkan adalah Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2024. Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta terdapat 4 hasil evaluasi yang harus dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya. Berikut tindak lanjut hasil evaluasi pada tabel berikut.

Tabel 1. 8 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP
----	----------------------------------	------------------------------------

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP
1	Agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa:	
	a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Dokumen menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan bahwa Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan yaitu: 1. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 s.d. 2026 No. 235 Tahun 2022 tanggal 17 Juni 2022 2. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 3. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025
	b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Dokumen menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan bahwa Dokumen Perencanaan Kinerja Kepala Dinas telah dipublikasikan pada laman https://dkpkp.jakarta.go.id/ppid-navbar/informasi-wajib-berkala/3
	c. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Dokumen menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan bahwa Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, dalam hal ini DKPKP telah melakukan Rapat Pembahasan Penyusunan Renkin Pegawai Dinas KPKP Tahun 2025 dengan Nomor undangan 3110/PU.07.00 tanggal 17 Juli 2025 dan telah terdapat notulen atas rapat tersebut
	d. Kualitas rumusan Hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Dokumen menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan bahwa Kualitas rumusan Hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta telah merumuskan sasaran yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dengan bukti dukung berupa pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (MPPD) yang mana salah satu kompetensi khusus dan mata pelajaran dalam pelatihan tersebut adalah peserta mampu merancang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan bukti dukung berupa Sertipikat Nomor 24.0401.3.0001.000012 tanggal 18 Desember 2024

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP
	e. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Dokumen menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan bahwa Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, dalam hal ini DKPKP dalam melakukan Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai bahwa Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai bahwa Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah 2025, Rencana Strategis Tahun 2023 s.d. 2026 No. 235 Tahun 2022 tanggal 17 Juni 2022, dan Rencana Kerja Tahun 2025 telah dirumuskan menggunakan pendekatan SMART
	f. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable).	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian telah berupaya bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable), dalam hal ini DKPKP dalam penyusunan IKU telah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Nomor 248 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Tahun 2023 s.d. 2026 serta telah tertuang secara berkelanjutan dari IKU tahun-tahun sebelumnya
	g. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (on the right track), menantang, dan realistis.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Dokumen menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu telah melakukan rapat pembahasan input capaian kinerja triwulanan
	h. Setiap dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading).	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan bahwa Setiap dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading), dalam hal ini DKPKP telah menyusun dokumen berupa Rancangan Matriks Cascading Kinerja
	i. Perencanaan Kinerja telah dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting).	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Dokumen menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu telah dilakukan rapat pembahasan Perencanaan kinerja antar bidang yang didukung dengan Berita Acara dan Notulen Rapat Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP
	j Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Dokumen menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu Kinerja yang ingin dicapai telah didukung dengan aktivitas yang dilaksanakan dengan bukti dukung sebagai berikut: 1. Rencana Aksi Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 2. Laporan Evaluasi Kinerja Semester I dan II tahun 2024 3. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025
	k Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Dokumen menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu telah dilakukan rapat forum perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pembahasan rancangan rencana kerja perangkat daerah tahun 2026 dan rapat pembahasan penyusunan renkin pegawai Dinas KPKP Tahun 2025
	l Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian menunjukkan upaya pemantauan capaian kinerja secara berkala (semesteran) dan hasilnya dituangkan pada Laporan Evaluasi Kinerja
2	Agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa:	
	a. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian telah berupaya untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan sesuai data kinerja yang dikumpulkan yang terlihat notulen rapat pembahasan input capaian kinerja
	b. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian telah berupaya untuk menjelaskan data kuantitatif yang menunjukkan capaian terhadap target melalui dokumen evaluasi kinerja semesteran
	c. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta telah berupaya melakukan pengukuran kinerja secara berkala (semesteran) yang dapat dilihat pada dokumen evaluasi kinerja semester I dan II
	d. Setiap level organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI telah berupaya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja dengan mengadakan Rapat Pembahasan Input Capaian Kinerja per triwulan

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP
	e. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI telah menggunakan sistem e-Kinerja dan SIMPEG untuk pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja
3	Agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa:	
	a. Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian Perencanaan Kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI telah menerbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisis kinerja dalam proses perencanaan program dan kegiatan di periode berikutnya
	b. Informasi dalam Laporan Kinerja selalu telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI telah menyesuaikan atas kebijakan untuk meningkatkan budaya kinerja, seperti telah disusunnya SOP, penerapan reward/punishment
4	Agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang melalui pembentukan tim penyelenggara sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2025

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2025. Capaian kinerja Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut :

Bab I – PENDAHULUAN,

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, serta struktur organisasi.

Bab II – PERENCANAAN KINERJA,

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2025 meliputi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2023-2026 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Bab III – AKUNTABILITAS KINERJA,

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025. Diuraikan pula analisa capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan Tahun 2025. Untuk beberapa indikator realisasi kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan standar nasional. Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

Bab IV – Penutup,

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dan upaya/langkah dan di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Mekanisme penyusunan laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta melalui metode pengumpulan data dari tiap UKPD, pengukuran kinerja dari data yang dikirimkan, verifikasi capaian kinerja dari tiap data indikator kinerja utama yang sesuai dengan sasaran strategis organisasi untuk memperoleh keakuratan informasi, serta penelaahan analisis tiap-tiap sasaran strategis yang ditampilkan dalam laporan kinerja ini oleh pejabat pada masing-masing sektor yang terkait. Sedangkan

penanggungjawab pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Dinas berada pada Sekretaris Dinas, khususnya di Sub Bagian Program dan Pelaporan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan Program Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta berbasis kepada Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023- 2026 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) sebagai bentuk kontrak kerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Setiap program dan kegiatan dalam Renstra dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Indikator kinerja sebaiknya memenuhi kelima karakteristik kualitatif tersebut sehingga keberhasilan pencapaian program dan kegiatan dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (*outcome*), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPD DKI Jakarta 2023-2026 yang disusun menggunakan pendekatan partisipatif dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin terjadi yang di dalamnya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, ukuran

keberhasilan dan kegagalan dalam setiap pelaksanaan sasaran strategis, program, dan/atau kegiatan

2.1 Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2023-2026

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah pada tujuan, dan sasaran yang akan dicapai serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta terikat pada Perjanjian Kinerja yang dijadikan tolak ukur untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk satu tahun perencanaan.

Perkembangan pembangunan di Jakarta yang memperhatikan potensi dan permasalahan peningkatan ketahanan pangan dalam mendukung tercapainya Program Prioritas pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selama 4 (empat) tahun kedepan (2023-2026) sebagai masa transisi sebelum terpilihnya Gubernur selaku Kepala Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mempunyai tujuan dan sasaran yang sejalan dengan RPD, serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.

2.1.1 Tujuan Pembangunan DKI Jakarta Jangka Panjang Tahun 2005-2025

Tujuan 1 : Terwujudnya regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan, meliputi sasaran:

1. Terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas
2. Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit
3. Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon
4. Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota

- Tujuan 2 : Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan, meliputi sasaran:
1. Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah
 2. Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas pertanian
 3. Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial tumbuhnya ekonomi dan sektor
 4. Menguatnya daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi
- Tujuan 3 : Tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan, meliputi sasaran:
1. Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat
 2. Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan
 3. Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender
 4. Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, dan kebhinekaan masyarakat
- Tujuan 4 : Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas, meliputi sasaran:
1. Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan masyarakat
 2. Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas
 3. Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah
 4. Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel
 5. Berkembangnya kapasitas, profesionalitas, dan iklim kerja aparatur.

2.1.2 Tujuan Renstra

Tujuan Kinerja SKPD dalam sapip Tahun 2025 terdapat 3 tujuan sesuai dalam dokumen Renstra meliputi:

1. Mewujudkan Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir Melalui Pengelolaan yang Bertanggung Jawab;
2. Meningkatkan Budidaya dan Produksi Bahan Pangan di Kawasan Perkotaan;
3. Memperkuat Ketahanan, Keamanan, dan Jaminan Ketersediaan Pangan.

2.1.3 Sasaran Renstra

Untuk memastikan pencapaian tujuan terkendali dan terarah, maka sasaran SKPD dalam Sapip Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelestarian Sumber Daya Laut dan Kawasan Pesisir;
2. Meningkatnya Kualitas dan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan serta Pencegahan Penangkapan Ikan Berlebihan;
3. Terciptanya Produktivitas Sumber Daya Pertanian Perkotaan yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim dan Perkembangan Teknologi;
4. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dengan Gizi Baik.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Di dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja utama. Perjanjian Kinerja disampaikan ke Badan Perencanaan Daerah melalui laman monev.jakarta.go.id sebagai bentuk monitoring. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2023 s.d 2026. Adapun tujuan dan sasaran dalam Renstra tersebut seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2023 s.d 2026

No	Indikator Tujuan	No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target			
						2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kesehatan Laut di wilayah kewenangan Provinsi			Indeks	-	65	66	67	68
		1	Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik	Persen	35,68	36,56	36,57	36,58	36,59
		2	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	126.732	139.320	139.370	142.329	145.351
2	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian			Persen	20	22,5	25	27,5	30
		1	Persentase Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura	Persen	20	22,5	25	27,5	30
		2	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	Persen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Indeks Ketahanan Pangan			Indeks	78	78	78,5	79	79,5
		1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	86,3	86,3	86,3	86,5	86,5
		2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU)	Persen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

(Data Dokumen Renstra DKPKP Tahun 2023-2026)

Target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra dilakukan penyesuaian dengan realisasi atau capaian IKU tahun 2024. Target IKU tahun 2025 terdapat penyesuaian dengan capaian tahun sebelumnya sebanyak 9 indikator yaitu

1. Indeks Kesehatan Laut di wilayah kewenangan Provinsi
2. Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik
3. Jumlah Produksi Perikanan
4. Persentase Peningkatan Produksi Pertanian

5. Persentase Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura
6. Persentase Peningkatan Produksi Peternakan
7. Indeks Ketahanan Pangan
8. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
9. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU).

Adapun isi dari Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 secara terinci disampaikan pada lampiran, namun rincian perjanjian kinerja dalam target tahunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
				Tahunan
Sasaran Strategis				
1	Mewujudkan Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir Melalui Pengelolaan yang Bertanggung Jawab	Indeks Kesehatan Laut di wilayah kewenangan Provinsi	Indeks	69,65
2	Meningkatnya Pelestarian Sumber Daya Laut dan Kawasan Pesisir	Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik	Persen	36,59
3	Meningkatnya Kualitas dan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan serta Pencegahan Penangkapan Ikan Berlebihan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	219.205
4	Meningkatkan Budidaya dan Produksi Bahan Pangan di Kawasan Perkotaan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Persen	29
5	Terciptanya Produktivitas Sumber Daya Pertanian Perkotaan yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim dan Perkembangan Teknologi	Persentase Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura	Persen	28
		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	Persen	30

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
				Tahunan
6	Menguatkan Ketahanan, Keamanan, dan Jaminan Ketersediaan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	91,91
7	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dengan Gizi Baik	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	92,7
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	Persen	2,5
Sasaran Relevan Lainnya				
8	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	Persentase	100
9	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persentase	100
10	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3,25
11	Peningkatan Penggunaan Peroduk Dalam Negeri	Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri	Persentase	80 - 100

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
				Tahunan
12	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	Persentase	100
13	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	100
14	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persentase	71
15	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100
16	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100
17	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta didukung oleh anggaran belanja program yang bersumber dari APBD Penetapan pada awal tahun sebesar Rp. 1.191.663.421.151 (Satu triliun seratus sembilan puluh satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah).

Pada bulan Januari tahun 2025 terjadi kebijakan penghematan anggaran oleh Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, menargetkan pemotongan belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, studi

banding, dan kegiatan seremonial, dengan tujuan mengalihkan dana untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan infrastruktur, serta mendorong kerja efisien di semua kementerian/lembaga. Efisiensi tersebut juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah termasuk Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta kecuali pada anggaran program Subsidi Pangan yang mengalami peningkatan anggaran. Peningkatan anggaran program Subsidi Pangan tersebut dimaksudkan untuk turut mendukung program prioritas nasional yaitu pengendalian inflasi dan kemiskinan. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 terdapat perubahan anggaran pada APBD Perubahan sehingga pagu anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian menjadi sebesar Rp. 1.379.798.631.747 (Satu triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dengan lingkup UKPD yang meliputi 1 Sekretariat, 5 Bidang, 6 Suku Dinas, 5 UPT dan 1 BLUD yang mendukung pelaksanaan kinerja dengan 13 program. Anggaran terbesar ada pada Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dimana di dalamnya terdapat kegiatan Subsidi Pangan sebesar Rp 1.027.038.068.988 (Satu Triliun Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). Adapun rincian kegiatan berdasarkan program ditunjukkan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Alokasi Anggaran Penetapan dan Perubahan Belanja Per Program
Tahun 2025

NO	PROGRAM	APBD PENETAPAN	APBD PERUBAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	245.355.340.802	237.735.382.871
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	826.866.257.018	1.027.118.785.388
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	96.500.000	46.500.000
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.445.299.554	1.905.379.028
5	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	6.242.280.819	5.692.466.897

NO	PROGRAM	APBD PENETAPAN	APBD PERUBAHAN
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	30.792.003.005	30.385.555.665
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12.116.404.446	11.853.873.455
8	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.604.671.035	1.074.251.309
9	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	11.004.683.259	10.633.659.763
10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	10.968.178.372	11.358.496.145
11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	24.038.089.956	18.567.503.291
12	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	9.405.736.580	11.945.788.210
13	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	10.727.976.305	10.270.037.616
14	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.167.778.021	1.210.952.109



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Dalam upaya menginterpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran perangkat daerah digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Tabel VII-C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut: Adapun uraian tentang hasil pencapaian kinerja sasaran strategis beserta realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 202 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

(Sumber: Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah)

3.1 Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Dengan mengikuti ketentuan pedoman tersebut pencapaian target kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 diukur dengan membandingkan target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan realisasinya yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
				Tahunan		
Sasaran Strategis						
1	Mewujudkan Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir Melalui Pengelolaan yang Bertanggung Jawab	Indeks Kesehatan Laut di wilayah kewenangan Provinsi	Indeks	69,65	71,06	102,02
2	Meningkatnya Pelestarian Sumber Daya Laut dan Kawasan Pesisir	Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik	Persen	36,59	36,59	100
3	Meningkatnya Kualitas dan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan serta Pencegahan Penangkapan Ikan Berlebihan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	219.205,00	236.102,11	107,71
4	Meningkatkan Budidaya dan Produksi Bahan Pangan di Kawasan Perkotaan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Persen	29	35,9	123,79

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
				Tahunan		
5	Terciptanya Produktivitas Sumber Daya Pertanian Perkotaan yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim dan Perkembangan Teknologi	Persentase Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura	Persen	28	45,76	163,43
		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	Persen	30	30	100
6	Menguatkan Ketahanan, Keamanan, dan Jaminan Ketersediaan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	91,91	71,52	77,82
7	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dengan Gizi Baik	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	92,7	94,7	102,16
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/ <i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>	Persen	2,5	3,22	71,20
Sasaran Relevan Lainnya						
1	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	Persentase	100	100	100,00
2	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persentase	100	100	100,00

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
				Tahunan		
3	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3,25	3,25	100,00
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri	Persentase	80 - 100	100	100,00
5	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagai pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	Persentase	100	100	100,00
6	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	100	100	100,00
7	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persentase	71	90,78	127,86
8	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100,00

(Sumber : Data e-Monev, e-TPP Kepala Dinas KPKP Tahun 2025 diolah)

Pada Tabel 3.2 diatas, capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2025 berada dalam interval persentase realisasi terhadap target (> 90) dengan kriteria Sangat Tinggi. Secara lebih rinci, evaluasi dan analisis terhadap

capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 diuraikan berdasarkan masing-masing Indikator Kinerja Utama.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Capaian IKU Indeks Kesehatan Laut di Wilayah Kewenangan Provinsi

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama Indeks Kesehatan Laut di wilayah kewenangan Provinsi (IKL) merupakan level tujuan dengan target sebesar 69,65 dan realisasi sebesar 71,06 atau sebesar 102,02 %. Indeks Kesehatan Laut secara cascading didukung oleh kinerja 2 level sasaran yaitu :

1. Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik;
2. Jumlah Produksi Perikanan.

Target atau tujuan Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) sama dengan tujuan Ocean Health Index (OHI), yaitu sebanyak 10 tujuan, dengan kata lain indikator tujuan. Sepuluh indikator ini juga diterapkan pada IKLI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, yang mana menjadi acuan atau baseline untuk tahun-tahun berikutnya. Sepuluh indikator tujuan IKLI Provinsi DKI Jakarta didukung dari berbagai sumber data antara lain RPD DKI Jakarta Tahun 2023-2026, RPJMD DKI Jakarta 2017-2022, Statistik KKP, BPS Provinsi DKI Jakarta, Dokumen Teknis RZWP3K, Laporan Pemantauan Ekosistem dan Pesisir Laut, RPJMN 2020-2024, Publikasi PDB Maritim, dan publikasi ilmiah.

Tabel 3. 3 Nilai IKLD Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024 dan 2025

No.	Tujuan	IKLD 2024	IKLD 2025
1	Laut sebagai sumber pangan	8,56	10,00
2	Kesempatan bekerja dan berusaha perikanan artisanal	8,05	8,49
3	Laut sebagai sumber produk alam	0,68	0,99
4	Laut sebagai penyimpan karbon	8,87	8,87
5	Perlindungan pesisir	8,10	7,14
6	Laut sebagai sumber mata pencaharian dan ekonomi	4,67	5,55
7	Laut sebagai penyedia jasa pariwisata dan rekreasi	7,33	7,21

No.	Tujuan	IKLD 2024	IKLD 2025
8	Perlindungan spesies dan tempat yang ikonik	10,00	10,00
9	Perairan bersih	4,96	5,58
10	Keanekaragaman hayati	8,45	7,23

Secara umum, hasil pengolahan data dari semua parameter Indeks Kesehatan Laut Daerah (IKLD) Provinsi DKI Jakarta adalah 71,06. Perhitungan awal Indeks Kesehatan Laut Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 menggunakan data dari berbagai macam sumber, belum berasal dari satu wali data yang sama. Data didapatkan dari beberapa OPD di Provinsi DKI Jakarta, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Lingkungan Hidup, dan Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu. Selain itu, terdapat beberapa data yang tidak dipunyai oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dan didapatkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sebagian besar data didapatkan dari dokumen dengan akses terbuka yang dapat diunduh dari situs resmi pemerintah. Jenis data yang Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tidak punyai akan menjadi rekomendasi dari kajian “Perhitungan Indeks Kesehatan Laut Provinsi DKI Jakarta” tahun 2024 ini.

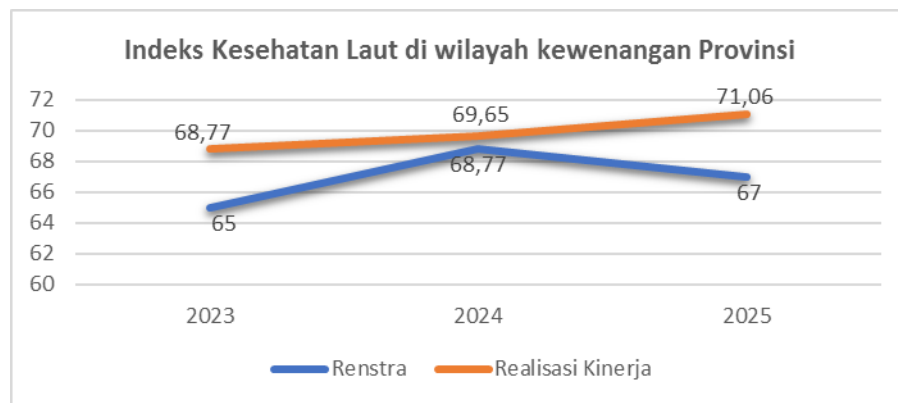
Gambar 3. 1 Hasil perhitungan IKLD Provinsi DKI Jakarta



b. Perbandingan Kinerja dengan Target Renstra

IKU Indeks Kesehatan Laut Daerah tahun 2025 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2023 - 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 2 Indeks Kesehatan Laut di Wilayah Kewenangan Provinsi pada Tahun 2023–2025



(Sumber : Dokumen Renstra, diolah)

Berdasarkan perbandingan antara Target Renstra dan Realisasi Kinerja Indeks Kesehatan Laut di Wilayah Kewenangan Provinsi pada tahun 2023–2025, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja menunjukkan tren yang positif dan konsisten melampaui target setiap tahunnya. Pada tahun 2023, realisasi kinerja mencapai 68,77, lebih tinggi dari target sebesar 65. Selanjutnya pada tahun 2024, realisasi sebesar 69,65 juga berhasil melampaui target 68,77. Pada tahun 2025, meskipun target Renstra ditetapkan sebesar 67, realisasi kinerja meningkat signifikan hingga mencapai 71,06. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan dan peningkatan kesehatan laut di wilayah kewenangan provinsi berjalan efektif, dengan kinerja yang tidak hanya memenuhi tetapi juga melebihi sasaran yang telah direncanakan, serta mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dari tahun ke tahun.

c. Perbandingan Capaian dengan Nasional

IKU Indeks Kesehatan Laut Daerah tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Perbandingan IKU Indeks Kesehatan Laut dengan Standar Nasional

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional Tahun 2024	% Capaian
Mewujudkan Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir Melalui Pengelolaan yang Bertanggung Jawab	Indeks Kesehatan Laut di wilayah kewenangan Provinsi	Indeks	71,06	76,76	92,57

Berdasarkan perbandingan IKU Indeks Kesehatan Laut dengan Standar Nasional, dapat disimpulkan bahwa realisasi IKU Indeks Kesehatan Laut tahun 2025 sebesar 71,06 telah mencapai 92,57% dari Standar Nasional tahun 2024 yang sebesar 76,76. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Kesehatan Laut berada pada kategori cukup tinggi dan relatif mendekati standar nasional, meskipun masih terdapat selisih capaian yang perlu ditingkatkan. Standar Nasional Tahun 2025 belum dirilis pada saat laporan dibuat sehingga tidak bisa dibandingkan dengan Standar Nasional Tahun 2025.

d. Faktor Pendukung/ Keberhasilan

1. Sumber Daya Manusia

Dalam pencapaian kinerja Indeks Kesehatan Laut di wilayah kewenangan Provinsi, Sumber Daya Manusia yang dimiliki yaitu satu orang tenaga ahli peta dan para pegawai ASN Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP). Para petugas berperan aktif dengan dukungan pihak eksternal, yaitu perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta kelompok masyarakat pesisir, sehingga pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan ekosistem laut dan pesisir dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

2. Sumber Daya Anggaran

Pelaksanaan Kinerja IKU Indeks Kesehatan Laut tahun 2025 di dukung 5 program dalam urusan kelautan dan perikanan. Adapun rincian anggaran per program sebagaimana tabel berikut.

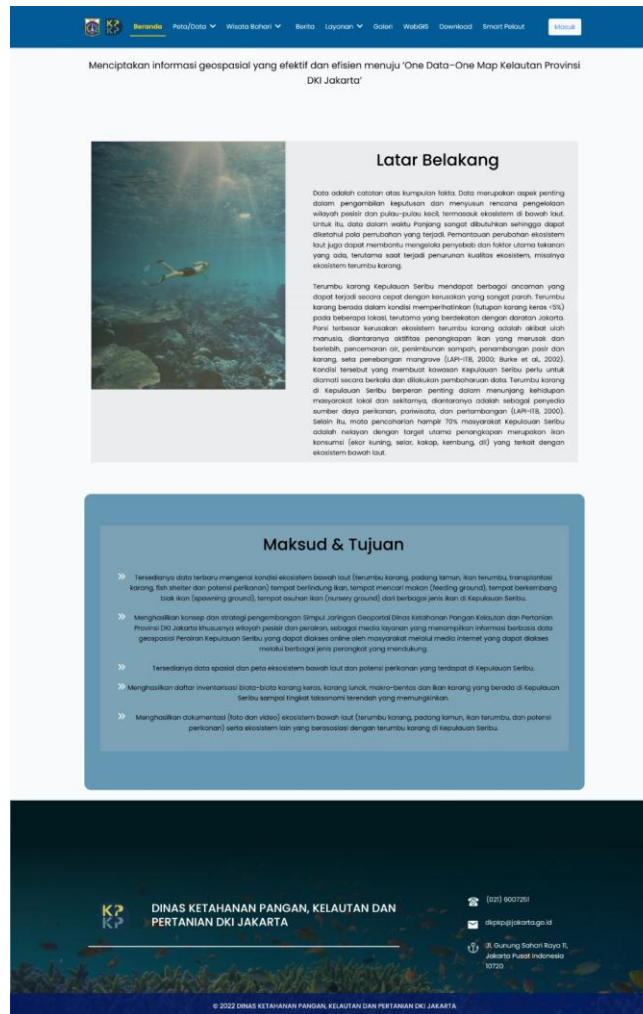
Tabel 3. 5 Program pendukung capaian IKU Indeks Kesehatan Laut

NO	PROGRAM	APBD PENETAPAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI	PERSEN
1	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	6.242.280.819	5.692.466.897	5.459.959.360	95,92
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	30.792.003.005	30.385.555.665	29.828.587.704	98,17
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12.116.404.446	11.853.873.455	11.167.338.339	94,21
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.604.671.035	1.074.251.309	1.040.083.635	96,82
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	11.004.683.259	10.633.659.763	10.155.708.250	95,51
	TOTAL	61.760.042.564	59.639.807.089	57.651.677.288	96,67

3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Dalam mendukung pencapaian IKU Indeks Kesehatan Laut, telah dikembangkan website JakOcean yang dapat diakses melalui tautan <https://jakocean.jakarta.go.id>. JakOcean adalah aplikasi teknologi Sistem Informasi Geografis (GIS) yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memantau dan mengelola ekosistem laut serta pesisir di wilayahnya, bertujuan meningkatkan pemahaman dan perlindungan lingkungan laut Jakarta, khususnya di Kepulauan Seribu, dengan data yang komprehensif dan terintegrasi.

Gambar 3. 3 Tampilan Website JakOcean



(Sumber : <https://jakocean.jakarta.go.id>)

e. Faktor Penghambat/ Kendala

Faktor penghambat/kendala dalam pencapaian IKU Indeks Kesehatan Laut adalah data yang tersedia di SDI belum terpilah secara jelas antara data laut dan data darat, sehingga menyulitkan proses analisis dan pengukuran kinerja secara optimal.

f. Rencana Aksi di Tahun Akan Datang

Rencana aksi di tahun akan datang agar target IKU Indeks Kesehatan Laut di Wilayah Kewenangan Provinsi tercapai antara lain:

- Melakukan koordinasi antar stakeholder untuk memperoleh data terkait dalam pencapaian target Indeks Kesehatan Laut yang akurat dan terintegrasi
- Melakukan pemantauan Ekosistem Pesisir, Laut dan Pulau Pulau Kecil secara berkelanjutan sebagai dasar evaluasi kondisi lingkungan.

- Melakukan perhitungan indeks kesehatan laut secara periodik berdasarkan data hasil pemantauan yang valid dan terverifikasi.

3.2.2 Capaian IKU Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik merupakan level sasaran dengan target sebesar 36,59 persen dan realisasi sebesar 36,59 persen atau capaian sebesar 100 persen.

Pengelolaan kawasan konservasi perairan adalah untuk melindungi dan menjaga kualitas lingkungan perairan serta ekosistem yang ada di dalamnya. Untuk mengukur Presentase Luas Perairan Ekosistem Laut dan Pesisir yang Dikelola melalui Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Ekosistem Pesisir, Laut di Kepulauan Seribu. Identifikasi potensi kawasan yang memerlukan perlindungan dan pengelolaan konservasi, yang didasarkan pada kondisi ekologi, sosial-ekonomi, dan kebijakan karena ekosistem Mangrove sebagai basis habitat kehidupan Biota.

Target penanaman mangrove tahun 2025 ditetapkan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) pohon dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut : triwulan II sebanyak 20.000 pohon, triwulan III sebanyak 30.000 pohon dan triwulan IV sebanyak 30.000 pohon. Capaian penanaman mangrove tahun 2025 berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, capaian penanaman mangrove tahun 2025 telah teralisasi seluruhnya sebanyak 80.000 pohon yang tersebar diwilayah pesisir Kepulauan Seribu meliputi Pulau Tidung Kecil, Pulau Tidung Besar, Pulau Pari, Pulau Pramuka dan Pulau Onrust.

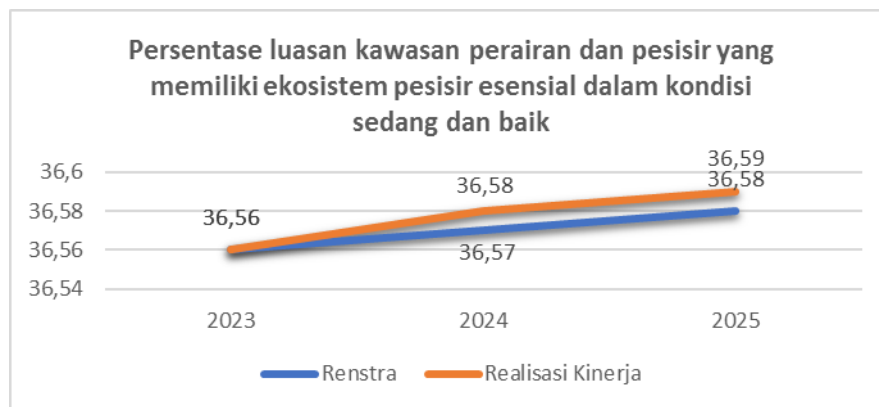
Hasil penilaian kondisi ekosistem mangrove berdasarkan data pengamatan lapangan, terhadap jumlah tanaman yang telah ditanam pada tahun 2025 adalah sebagai berikut: dalam kondisi sedang 17.560 pohon (21,95%), kondisi baik 11.712 pohon (14,64%), kondisi sangat baik 26.560 pohon (33,20%) dan dalam kondisi kurang baik sebanyak 24.168 pohon (30,21%). Capaian persentase ekosistem pesisir essensial dalam kondisi sedang dan baik berdasarkan hasil pengamatan tersebut, jumlah mangrove yang berada dalam kondisi sedang dan baik tercatat

sebanyak 29.272 pohon atau setara dengan 36,59% dari total keseluruhan mangrove yang ditanam di tahun 2025. Capaian ini menunjukkan kontribusi nyata kegiatan penanaman mangrove terhadap peningkatan persentase luasan Kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik di wilayah Kepulauan Seribu.

b. Perbandingan Kinerja dengan Target Renstra

IKU Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik tahun 2025 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2023 - 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 4 Persentase Luasan Kawasan Perairan dan Pesisir yang Memiliki Ekosistem Pesisir Esensial dalam Kondisi Sedang dan Baik Tahun 2023 - 2025



(Sumber : Dokumen Renstra, diolah)

Berdasarkan grafik Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik pada tahun 2023–2025, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Pada tahun 2023, realisasi mencapai 36,56%, kemudian meningkat tipis menjadi 36,57% pada tahun 2024, dan tetap konstan sebesar 36,58% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa luasan ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik dapat dipertahankan secara konsisten dari tahun ke tahun.

c. Perbandingan Capaian dengan Nasional

IKU Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik tidak memiliki perbandingan dengan

capaian tingkat nasional karena indikator disusun dan diukur khusus pada tingkat daerah serta belum tersedia indikator pembandingan pada level nasional.

d. Faktor Pendukung/ Keberhasilan

1. Sumber Daya Manusia

Dalam pencapaian Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik, Sumber Daya Manusia yang dimiliki yaitu satu orang tenaga ahli peta dan para pegawai ASN Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP). Para petugas berperan aktif dengan dukungan pihak eksternal, yaitu perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta kelompok masyarakat pesisir, sehingga pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan ekosistem laut dan pesisir dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

2. Sumber Daya Anggaran

Program pendukung kinerja IKU Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Program pendukung capaian IKU Persentase Luasan Kawasan Perairan dan Pesisir yang Memiliki Ekosistem Pesisir Esensial dalam Kondisi Sedang dan Baik

NO	PROGRAM	APBD PENETAPAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI	PERSEN
1	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	6.242.280.819	5.692.466.897	5.459.959.360	95,92
2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.604.671.035	1.074.251.309	1.040.083.635	96,82
	TOTAL	7.846.951.854	6.766.718.206	6.500.042.995	96,06

3. Sumber Daya Sarana Prasarana

website JakOcean yang dapat diakses melalui tautan <https://jakocean.jakarta.go.id> juga digunakan dalam mendukung pencapaian

IKU Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik.

e. Faktor Penghambat/ Kendala

Tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam pencapaian IKU Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik, sehingga pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

f. Rencana Aksi di Tahun Akan Datang

Rencana Aksi di Tahun akan datang agar target IKU Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik tercapai antara lain:

- Melakukan penanaman mangrove sebagai upaya rehabilitasi dan perlindungan ekosistem pesisir
- Melakukan penanaman karang untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan ekosistem terumbu karang.
- Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kelompok DPL-BM (Daerah Pengelolaan Laut Berbasis Masyarakat) melalui pembinaan dan pendampingan untuk memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

3.2.3 Capaian IKU Jumlah Produksi Perikanan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama Jumlah Produksi Perikanan merupakan level sasaran dengan target sebesar 219.205 ton dan realisasi sebesar 236.102,11 ton atau capaian sebesar 107,71 %.

Jumlah produksi perikanan merupakan gabungan jumlah produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Jenis Produksi Perikanan

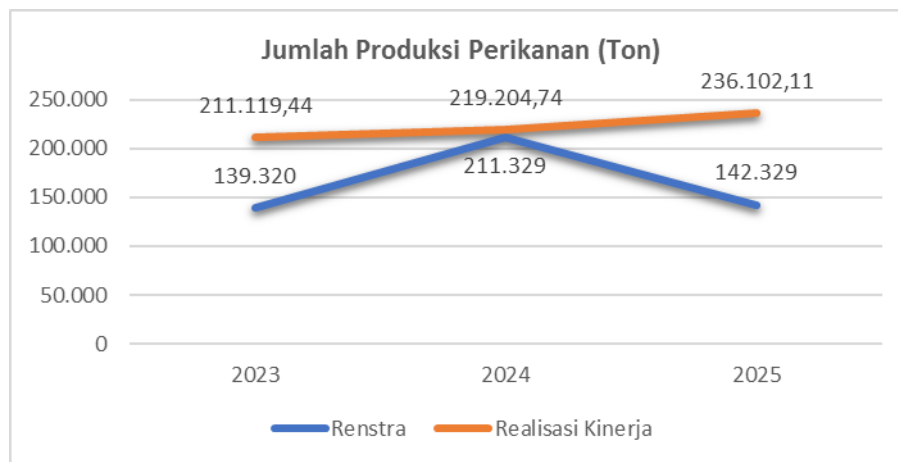
NO	JENIS PRODUKSI	JUMLAH (KG)
1	Produksi Perikanan Tangkap	204.331.761
2	Produksi Perikanan Budidaya	5.289.278
3	Produksi dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan	26.481.647
	TOTAL PRODUKSI PERIKANAN	236.102.686

Dapat disimpulkan Jumlah Produksi Perikanan paling banyak berasal dari Produksi Perikanan Tangkap sebesar 204.331.761 kg.

b. Perbandingan Kinerja dengan Target Renstra

IKU Jumlah Produksi Perikanan tahun 2025 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2023 - 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 5 Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2023 - 2025



(Sumber: Dokumen Renstra, diolah)

Berdasarkan grafik Jumlah Produksi Perikanan pada periode tahun 2023–2025, dapat disimpulkan bahwa realisasi produksi perikanan selalu melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, realisasi mencapai 211.119,44 ton, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 139.320 ton. Tren positif berlanjut pada tahun 2024, dengan realisasi sebesar 219.204,74 ton yang juga melampaui target 211.329 ton. Selanjutnya pada tahun 2025, meskipun target mengalami penurunan menjadi 142.329 ton, realisasi produksi justru meningkat signifikan hingga mencapai 236.102,11 ton. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sektor perikanan berada dalam

kondisi sangat baik dan produktif, serta mencerminkan efektivitas program dan kebijakan yang telah dilaksanakan dalam mendukung peningkatan produksi perikanan secara berkelanjutan.

c. Perbandingan Capaian dengan Nasional

IKU Jumlah Produksi Perikanan tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Perbandingan IKU Jumlah Produksi Perikanan dengan Standar Nasional

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional Tahun 2024	% Capaian
Meningkatnya Kualitas dan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan serta Pencegahan Penangkapan Ikan Berlebihan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	236.102,11	23.566.225	1,00

(Sumber: portaldata.kkp.go.id dan DKPKP, diolah)

Berdasarkan tabel Perbandingan IKU Jumlah Produksi Perikanan dengan Standar Nasional, Jumlah Produksi Perikanan Jakarta sebesar 236.102,11 ton dan Jumlah produksi perikanan nasional sebesar 23.566.225 ton, hanya sebesar 1%. Rendahnya capaian jumlah produksi perikanan disebabkan oleh karakteristik Jakarta yang bukan merupakan daerah sentra produksi perikanan, sehingga kontribusinya terhadap capaian produksi perikanan nasional masih terbatas, yaitu sekitar 1%.

d. Faktor Pendukung/ Keberhasilan

Tercapainya IKU Jumlah Produksi Perikanan didukung oleh adanya relaksasi dalam penerapan kebijakan perikanan terukur, pelaksanaan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan serta banyaknya gerakan ketahanan pangan dan tersedianya benih ikan serta bahan baku pengolahan ikan yang memadai.

1. Sumber Daya Manuasia

Sumber daya manusia yang dimiliki dalam tercapainya IKU Jumlah Produksi Perikanan antara lain ASN Pengelola perikanan tangkap, budidaya, penguatan daya saing produk perikanan, serta didukung oleh PJLP teknis perikanan budidaya serta PJLP teknis penerbitan tanda daftar kapal perikanan.

2. Sumber Daya Anggaran

Program pendukung kinerja IKU Jumlah Produksi Perikanan adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Program pendukung capaian IKU Jumlah Produksi Perikanan

NO	PROGRAM	APBD PENETAPAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI	PERSEN
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	30.792.003.005	30.385.555.665	29.828.587.704	98,17
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12.116.404.446	11.853.873.455	11.167.338.339	94,21
3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	11.004.683.259	10.633.659.763	10.155.708.250	95,51
	TOTAL	53.913.090.710	52.873.088.883	51.151.634.293	96,74

3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Dalam Upaya meningkatkan kinerja IKU Jumlah Produksi Perikanan, pengembangan teknologi budidaya dikembangkan melalui sistem bioflok. Budidaya ikan dengan sistem bioflok merupakan teknologi inovatif dan efisien yang memanfaatkan mikroorganisme untuk meningkatkan produktivitas, menekan biaya pakan, serta ramah lingkungan. Sistem ini sangat cocok diterapkan pada budidaya ikan intensif, terutama di wilayah dengan keterbatasan lahan dan air. Pada Tahun 2025 sistem bioflok sudah mulai diterapkan di Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Selatan, dan di tahun 2026 direncanakan akan dibangun sistem bioflok di 24 titik yang tersebar di Jakarta.

e. Faktor Penghambat/ Kendala

Faktor penghambat/kendala dalam pencapaian IKU Jumlah Produksi Perikanan adalah kondisi cuaca ekstrim sehingga mempengaruhi jumlah produksi penangkapan, budidaya, dan pengolahan serta adanya alih fungsi lahan pada kegiatan budidaya.

f. Rencana Aksi di Tahun Akan Datang

Rencana aksi di tahun akan datang agar target IKU Jumlah Produksi Perikanan tercapai antara lain:

- Memberikan bantuan sarana alat tangkap ramah lingkungan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan yang berkelanjutan.
- Menyediakan sarana urban fish farming di lahan terbatas serta sarana pengolahan ikan guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perikanan.
- Melaksanakan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada pelaku usaha di bidang perikanan untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan daya saing.

3.2.4 Capaian IKU Persentase Peningkatan Produksi Pertanian

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Produksi Pertanian memiliki target sebesar 29 persen dan realisasi sebesar 35,9 persen atau capaian sebesar 123,79 %.

Jumlah produksi pertanian merupakan gabungan produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) dan produksi peternakan (daging, susu dan telur) dengan data sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Produksi Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)

NO	KOMODITAS	JUMLAH PRODUKSI S/D TW IV	
		2024	2025
1	Tanaman Pangan	127,93	1.233,70
2	Tanaman Hortikultura	28.441,19	40.409,73
Jumlah		28.569,12	41.643,43

Tabel 3. 11 Produksi Peternakan (Daging, Susu dan Telur)

NO	KOMODITAS	JUMLAH PRODUKSI S/D TW IV	
		2024	2025
1	Daging	50.309.400	67.419.700
2	Susu	3.399.824	2.788.544
3	Telur	130.780	167.134
Jumlah		53.840.004	53.840.004

Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2025 dihitung:

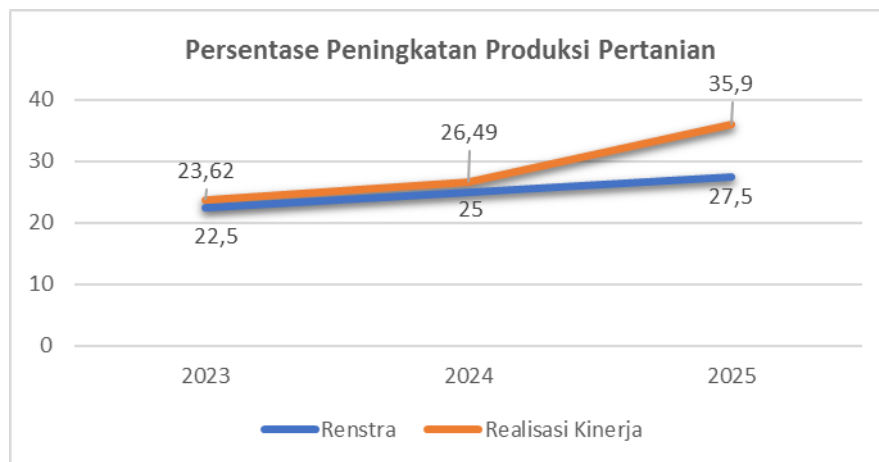
$$= \frac{(\text{Jumlah Produksi Pertanian + Peternakan Tahun 2025}) - (\text{Jumlah Produksi Pertanian + Peternakan Tahun 2024})}{(\text{Jumlah Produksi Pertanian + Peternakan Tahun 2024})} \times 100 \%$$

$$= \frac{(41.643,43 + 70.375,378) - (28.569,12 + 53.840,004)}{(28.569,12 + 53.840,004)} \times 100 \% = 35,9 \%$$

b. Perbandingan Kinerja dengan Target Renstra

IKU Persentase Peningkatan Produksi Pertanian tahun 2025 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2023 - 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 6 Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2023 – 2025



(Sumber: Dokumen Renstra, diolah)

Berdasarkan grafik Persentase Peningkatan Produksi Pertanian pada tahun 2023–2025, dapat disimpulkan bahwa realisasi peningkatan produksi pertanian menunjukkan tren yang terus meningkat dan selalu melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, realisasi mencapai 23,62%, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 22,5%. Pada tahun 2024, realisasi meningkat menjadi 26,49%, melampaui target 25%. Selanjutnya pada tahun 2025, realisasi mengalami peningkatan signifikan hingga 35,9%, jauh di atas target 27,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kebijakan di sektor pertanian berjalan sangat efektif dalam mendorong peningkatan produksi secara berkelanjutan.

c. Perbandingan Capaian dengan Nasional

Capaian indikator Persentase Peningkatan Produksi Pertanian tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional, karena indikator disusun dan diukur khusus pada tingkat daerah serta belum tersedia indikator pembandingan pada level nasional.

d. Faktor Pendukung/ Keberhasilan

Salah satu faktor keberhasilan tercapainya IKU Persentase Peningkatan Produksi Pertanian yaitu adanya penambahan lokasi dan luas tambah tanam budidaya pertanian dalam rangka mendukung program kampung mandiri pangan serta capaian swasembada pangan di DKI Jakarta.

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu upaya mendorong IKU Persentase Peningkatan Produksi Pertanian yaitu dengan penumbuhan dan pemanfaatan penggiat urban farming sebagai pelaku usaha budidaya serta pendampingan di lokasi penanaman yang dilakukan oleh tim dari Satlak serta Suku Dinas KPKP.

2. Sumber Daya Anggaran

Program pendukung kinerja IKU Persentase Peningkatan Produksi Pertanian adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 12 Program pendukung Capaian IKU Persentase Peningkatan Produksi Pertanian

NO	PROGRAM	APBD PENETAPAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI	PERSEN
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	10.968.178.372	11.358.496.145	11.004.867.710	96,89
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	24.038.089.956	18.567.503.291	17.647.196.704	95,04
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	9.405.736.580	11.945.788.210	11.141.192.710	93,26

NO	PROGRAM	APBD PENETAPAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI	PERSEN
4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	10.727.976.305	10.270.037.616	9.975.042.923	97,13
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.167.778.021	1.210.952.109	1.147.443.399	94,76
	TOTAL	55.139.981.213	52.141.825.262	49.768.300.047	95,45

3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Beberapa upaya dalam mencapai IKU Persentase Peningkatan Produksi Pertanian yaitu dengan memanfaatkan teknologi produksi budidaya pertanian perkotaan seperti green house, hidoponik, vertikal farming dan vertiminaponik untuk meningkatkan produksi penanaman hemat lahan.

e. Faktor Penghambat/ Kendala

Salah satu penghambat IKU Persentase Peningkatan Produksi Pertanian yaitu kondisi cuaca ekstrim dalam beberapa bulan terakhir yang menyebabkan terjadinya bencana banjir dan serangan hama di beberapa lokasi sehingga mengakibatkan gagal panen dan penurunan produktivitas tanaman.

f. Reencana Aksi di Tahun Akan Datang

Rencana aksi di tahun akan datang agar target IKU Persentase Peningkatan Produksi Pertanian tercapai yaitu dengan mengembangkan program kampung mandiri pangan serta fasilitasi bantuan sarana produksi tanaman untuk pemanfaatan lahan/ruang menjadi lahan produktif dalam rangka menjaga ketahanan pangan di DKI Jakarta.

3.2.5 Capaian Persentase Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura merupakan level sasaran, memiliki target sebesar 28 persen dan realisasi sebesar 45,76 persen atau capaian sebesar 163,43 %.

Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura merupakan gabungan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan data sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KOMODITAS	JUMLAH PRODUKSI S/D TW IV	
		2024	2025
1	Tanaman Pangan	127,93	1.233,70
2	Tanaman Hortikultura	28.441,19	40.409,73
Jumlah		28.569,12	41.643,43

Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dihitung:

$$= \frac{\text{Jumlah Produksi Tahun 2025} - \text{Jumlah Produksi Tahun 2024}}{\text{Jumlah Produksi Tahun 2024}} \times 100\%$$

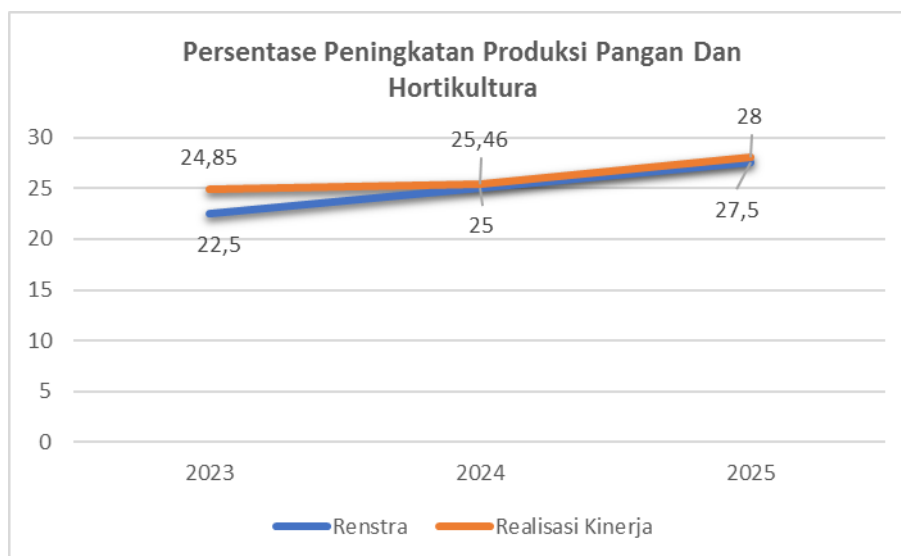
$$= \frac{41.643,43 - 28.569,12}{28.569,12} \times 100\%$$

$$= 45,76\%$$

b. Perbandingan Kinerja dengan Target Renstra

IKU Persentase Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2023 - 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 7 Persentase Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura Tahun 2023 – 2025



(Sumber: Dokumen Renstra, diolah)

Berdasarkan grafik Persentase Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura pada tahun 2023–2025, dapat disimpulkan bahwa realisasi peningkatan produksi menunjukkan tren meningkat secara konsisten dan selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, realisasi mencapai 24,85%, lebih tinggi dari target sebesar 22,5%. Pada tahun 2024, realisasi meningkat menjadi 25,46%, melampaui target 25%. Selanjutnya pada tahun 2025, realisasi kembali meningkat menjadi 28%, lebih tinggi dibandingkan target 27,5%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan produksi pangan dan hortikultura berjalan efektif dan berkelanjutan, serta mendukung ketahanan pangan daerah secara optimal.

c. Perbandingan Capaian dengan Nasional

Capaian indikator Persentase Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional, karena indikator disusun dan diukur khusus pada tingkat daerah serta belum tersedia indikator pembandingan pada level nasional.

d. Faktor Pendukung/ Keberhasilan

Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura di Jakarta didukung oleh beberapa faktor keberhasilan, antara lain tersedianya lahan milik pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian urban, sehingga memungkinkan optimalisasi ruang terbatas secara produktif. Selain itu, kelembagaan pertanian berupa kelompok tani kota telah terbentuk di beberapa wilayah, yang berperan penting dalam memperkuat koordinasi, pendampingan, serta penerapan teknologi pertanian perkotaan.

1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan IKU Persentase Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura, DKPKP didukung 36 orang penyuluh pertanian. Jumlah penyuluh eksisting di DKI Jakarta Tahun 2025 mengalami pengurangan dari total penyuluh sebelumnya sebanyak 43 orang menjadi 36 orang dikarenakan adanya penyuluh yang meninggal, pensiun dan mengundurkan diri pada tahun berjalan.

2. Sumber Daya Anggaran

Program pendukung kinerja IKU Persentase Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 14 Program Pendukung IKU Persentase Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura

NO	PROGRAM	APBD PENETAPAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI	PERSEN
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	10.968.178.372	11.358.496.145	11.004.867.710	96,89
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	24.038.089.956	18.567.503.291	17.647.196.704	95,04
3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	10.727.976.305	10.270.037.616	9.975.042.923	97,13
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.167.778.021	1.210.952.109	1.147.443.399	94,76
	TOTAL	45.734.244.633	40.196.037.052	38.627.107.337	96,10

3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Dalam mendukung peningkatan produksi pangan dan hortikultura di Jakarta, DKPKP telah menerapkan konsep Pertanian Perkotaan menggunakan teknologi rak hidroponik. Teknologi rak hidroponik adalah sistem budidaya tanaman tanpa tanah yang disusun bertingkat (vertikal) menggunakan rak, sehingga sangat efisien untuk lahan terbatas seperti kawasan perkotaan. Nutrisi tanaman diberikan melalui larutan air bernutrisi yang dialirkan atau disirkulasikan ke akar tanaman.

Gambar 3. 8 Teknologi Rak Hidroponik



(Sumber: Bidang Pertanian, diolah)

e. Faktor Penghambat/ Kendala

Upaya peningkatan Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura masih menghadapi sejumlah faktor penghambat, terutama alih fungsi lahan terbuka menjadi bangunan dan infrastruktur yang terus berlangsung, sehingga mengurangi luas lahan potensial pertanian. Di samping itu, pencemaran udara, tanah, dan air di wilayah perkotaan turut memengaruhi kualitas lingkungan budidaya dan berpotensi menurunkan produktivitas serta mutu hasil pertanian.

f. Reencana Aksi di Tahun Akan Datang

Rencana aksi di tahun akan datang agar target IKU Persentase Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura tercapai yaitu dengan mengembangkan program kampung mandiri pangan serta fasilitasi bantuan sarana produksi tanaman untuk pemanfaatan lahan/ruang menjadi lahan produktif dalam rangka menjaga ketahanan pangan di DKI Jakarta.

3.2.6 Capaian IKU Persentase Peningkatan Produksi Peternakan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Produksi Peternakan merupakan level sasaran dengan target sebesar 30 % dan realisasi sebesar 30,7 % atau sebesar 102,33 %.

Jumlah produksi peternakan terdiri dari penjumlahan produksi daging, telur dan susu selama Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Jumlah Produksi Peternakan Tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	KOMODITAS	JUMLAH PRODUKSI S/D TW IV	
		2024	2025
1	Daging	50.309.400	67.419.700
2	Susu	3.399.824	2.788.544
3	Telur	130.780	167.134
Jumlah		53.840.004	70.375.378

(Sumber: Bidang Peternakan, diolah)

Kenaikan jumlah produksi ternak tertinggi disumbang oleh komoditi daging, hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah ternak yang dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta meningkatnya konsumsi daging masyarakat DKI Jakarta, dari 5,91 kg/kapita di tahun 2024 menjadi 6,85 kg/kapita di tahun 2025.

Sejak tahun 2004, status DKI Jakarta merupakan daerah Bebas Rabies yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 566/Kpts/PD.640/10/2004 tentang Pernyataan Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat Bebas Rabies. Walau demikian, Provinsi DKI Jakarta tetap merupakan daerah resiko tinggi terhadap penularan penyakit rabies karena berbatasan dengan daerah endemis dan lalu lintas Hewan Penular Rabies (HPR) yang tinggi ke wilayah DKI Jakarta.

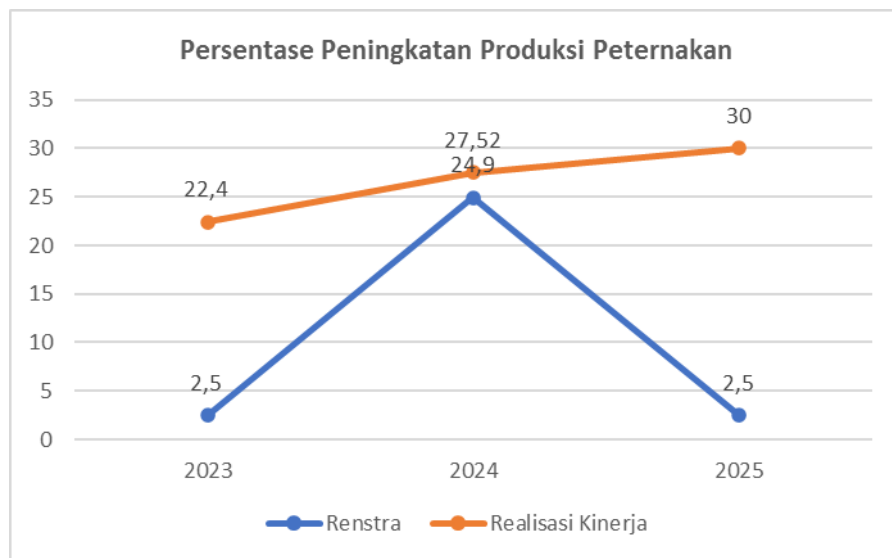
Untuk mempertahankan Provinsi DKI Jakarta bebas rabies, kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta antara lain vaksinasi HPR seperti anjing, kucing dan kera secara berkelanjutan dan pengendalian populasi HPR melalui kegiatan sterilisasi.

Adapun realisasi vaksinasi rabies pada tahun 2025 adalah sebanyak 64.613 ekor (136%) dari target sebanyak 47.659 ekor, sedangkan realisasi sterilisasi HPR tahun 2025 adalah sebanyak 22.243 ekor (105,9%) dari target sebanyak 21.000 ekor.

b. Perbandingan Kinerja dengan Target Renstra

IKU Persentase Peningkatan Peningkatan Produksi Peternakan Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2023 - 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 9 Persentase Peningkatan Peningkatan Produksi Peternakan Tahun 2023 – 2025



(Sumber; Dokumen Renstra, diolah)

Berdasarkan grafik Persentase Peningkatan Produksi Peternakan pada tahun 2023–2025, dapat disimpulkan bahwa realisasi peningkatan produksi peternakan menunjukkan tren meningkat secara konsisten dan jauh melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, realisasi mencapai 22,4%, jauh lebih tinggi dibandingkan target sebesar 2,5%. Pada tahun 2024, realisasi meningkat menjadi 27,52%, melampaui target 24,9%. Selanjutnya pada tahun 2025, realisasi kembali meningkat menjadi 30%, sementara target ditetapkan sebesar 2,5%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja sektor peternakan berada dalam kondisi sangat baik, serta mencerminkan efektivitas program dan kebijakan yang telah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan produksi peternakan secara berkelanjutan.

c. Perbandingan Capaian dengan Nasional

Capaian indikator Persentase Peningkatan Produksi Peternakan tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional, karena indikator disusun dan diukur khusus pada tingkat daerah serta belum tersedia indikator pembandingan pada level nasional.

d. Faktor Pendukung/ Keberhasilan

Peningkatan capaian IKU Persentase Peningkatan Produksi Peternakan didukung oleh komitmen dan peran aktif pemerintah dalam penguatan aspek

kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, serta pengembangan sektor peternakan secara berkelanjutan. Dukungan ini tercermin melalui upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, peningkatan pengawasan keamanan produk hewan, serta pembinaan pelaku usaha peternakan yang mendorong produktivitas dan kualitas hasil ternak.

1. Sumber Daya Manuasia

Dalam melaksanakan IKU Persentase Peningkatan Produksi Peternakan, DKPKP didukung oleh para pegawai yang berkompeten pada bidang peternakan seperti Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, penyuluh peternakan, petugas statistik peternakan serta tim pengawas pelaku usaha peternakan.

2. Sumber Daya Anggaran

Program pendukung kinerja IKU Persentase Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 16 Program pendukung Capaian IKU Persentase Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura

NO	PROGRAM	APBD PENETAPAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI	PERSEN
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	10.968.178.372	11.358.496.145	11.004.867.710	96,89
2	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	9.405.736.580	11.945.788.210	11.141.192.710	93,26
3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	10.727.976.305	10.270.037.616	9.975.042.923	97,13
	TOTAL	31.101.891.257	33.574.321.971	32.121.103.343	95,67

3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Pemanfaatan sumber daya teknologi pada sarana peternakan dilakukan secara terintegrasi untuk mendukung peningkatan produksi, kesehatan hewan, serta jaminan keamanan pangan asal hewan. Puskesmas dan Puskesmas Pondok Rangun dimanfaatkan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan

hewan berbasis kedokteran hewan terkini, didukung dengan fasilitas alat kesehatan sesuai standar rumah sakit antara lain *x-ray*, alat bedah orthopedi, *electric cauter*, *EKG*, *urine analyzer* alat laboratorium seperti *real time pcr*.

Laboratorium Kesmavet berperan penting dalam pemanfaatan teknologi pengujian dan analisis laboratorium untuk memastikan mutu, keamanan, dan kelayakan produk hewan. Dukungan peralatan uji modern dan metode analisis yang terstandar memungkinkan deteksi dini cemaran biologis maupun kimia, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk peternakan.

Pada sarana pemotongan, RPHU Rawa Terate, RPHU Rawa Kepiting, RPHU Rorotan, dan RPHU Petukangan Utara memanfaatkan teknologi proses pemotongan yang memenuhi standar higiene dan sanitasi, penerapan rantai dingin, serta sistem pengawasan kesehatan hewan dan produk secara terintegrasi. Pemanfaatan teknologi tersebut meningkatkan efisiensi operasional, menjamin kesejahteraan hewan, serta menghasilkan produk daging yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Selain teknologi sarana peternakan, telah disediakan layanan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada situs DKPKP yang dapat diakses melalui <https://dkpkp.jakarta.go.id/>. Sertifikasi NKV merupakan bukti tertulis yang menyatakan bahwa unit usaha produk hewan telah menerapkan dan memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi. Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Pertanian No 15 Tahun 2021 tentang Perijinan Berbasis Resiko Sektor Pertanian, Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) merupakan layanan non perijinan yang wajib bagi seluruh unit usaha produk hewan.

Manfaat pelayanan sertifikasi NKV melalui website antara lain :

1. Menyederhanakan proses dari 6 tahap menjadi 4 tahap merubah proses pengajuan yang semula dilakukan secara konvensional (hardcopy dan datang langsung ke sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian) menjadi digital melalui situs (website)
2. Digitalisasi pada pelayanan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner memberikan kemudahan kepada pengguna jasa melalui efisiensi waktu dan biaya, serta transparansi progres menjadi realtime

3. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner lebih mengefisiensi kerja, pengelolaan data meningkat serta mempermudah pengawasan pelayanan sehingga mempercepat pengambilan keputusan dan pelaporan.

Pelayanan sertifikasi NKV melalui website ini dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam pelayanan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner, efektifitas, efisiensi dan transparansi dalam pelayanan public. Memiliki database sertifikasi NKV yang terintegrasi dan memudahkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Adapun manfaat bagi stakeholder yaitu kemudahan layanan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan stakeholder kepada pemerintah serta meningkatkan daya jual produk hewan.

e. Faktor Penghambat/ Kendala

Pencapaian IKU Persentase Peningkatan Produksi Peternakan masih menghadapi berbagai faktor penghambat yang bersifat struktural, teknis, dan kesehatan hewan. Risiko penyakit hewan menular dan zoonosis masih menjadi ancaman serius yang dapat menurunkan produktivitas serta menimbulkan pembatasan pergerakan ternak. Kondisi ini ditambah oleh penurunan produksi susu sapi karena jumlah sapi perah semakin berkurang di Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, penerapan higiene dan sanitasi pada pelaku usaha peternakan dan pemotongan hewan belum optimal, yang berpotensi menurunkan kualitas hasil produksi serta meningkatkan risiko penularan penyakit. Keterbatasan zonasi tata ruang untuk sektor peternakan juga menjadi kendala dalam pengembangan usaha, terutama di wilayah perkotaan, disertai dengan belum optimalnya pengelolaan limbah peternakan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dan sosial. Dari aspek regulasi, masih terdapat ketidaksesuaian peraturan perizinan berusaha kegiatan rumah potong yang menghambat legalitas dan modernisasi fasilitas.

Faktor penghambat lainnya adalah tingginya risiko masuknya penyakit hewan menular dari hewan potong yang berasal dari luar daerah, khususnya pada periode distribusi tinggi seperti menjelang Idul Adha, yang menuntut pengawasan lalu lintas ternak dan produk hewan secara lebih ketat. Keseluruhan kondisi tersebut secara

kumulatif berpengaruh terhadap stabilitas produksi, efisiensi usaha, serta keberlanjutan peningkatan produksi peternakan.

f. Reencana Aksi di Tahun Akan Datang

Rencana aksi di tahun akan datang agar target IKU Persentase Peningkatan Produksi Peternakan tercapai anatara lain:

- Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha peternakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan manajemen usaha.
- Memberikan bantuan sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk peternakan secara berkelanjutan

3.2.7 Capaian IKU Indeks Ketahanan Pangan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Pangan merupakan level tujuan dengan target sebesar 91,91 % dan realisasi sebesar 71,52 % atau sebesar 77,82 %.

Indeks Ketahanan Pangan merupakan Indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan di Provinsi DKI Jakarta yang sampai dengan tahun 2024 menggunakan 9 (sembilan) Indikator penyusun dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan pemutakhiran metodologi penghitungan secara teknis dengan 12 (dua belas) indikator penyusun dan menambahkan data untuk penguatan cadangan pangan, mendorong konsumsi pangan lokal berbasis sumber daya local serta menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.

Skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi DKI Jakarta 2025 sebesar 71,52 atau turun 15,99% dibanding tahun 2024 yang sebesar 85,13 dengan rincian skor tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Berdasarkan Kota/ Kab Administrasi

No	Kota/ Kab Administrasi	IKP 2024	IKP 2025
1	Jakarta Timur	91,81	72,97
2	Jakarta Pusat	91,63	70,74
3	Jakarta Barat	91,52	71,25
4	Jakarta Selatan	90,52	73,06
5	Jakarta Utara	87,42	68,09
6	Kepulauan Seribu	58,05	63,73
Provinsi DKI Jakarta		85,13	71,52

(Sumber: Bidang Ketahanan Pangan)

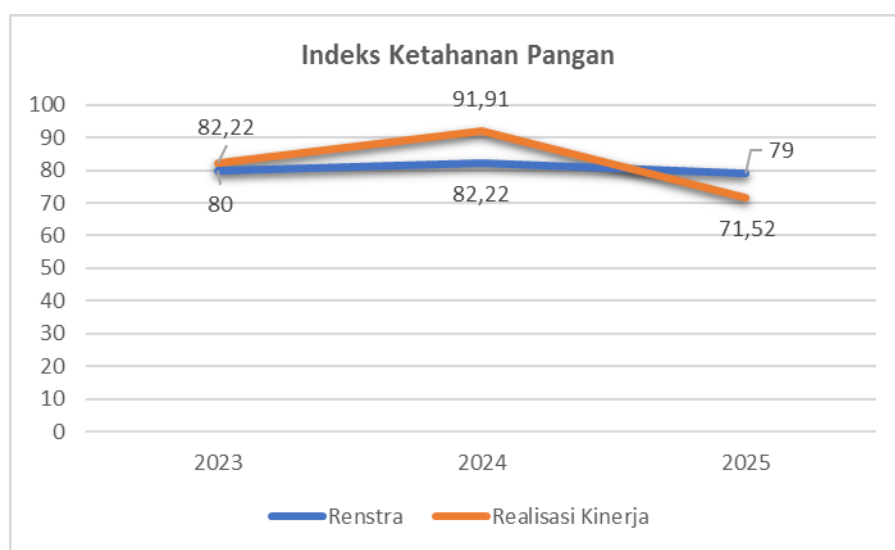
Penurunan skor IKP Provinsi DKI Jakarta disebabkan :

- a. Terdapat 2 (dua) indikator baru yang datanya tidak tersedia di Provinsi DKI Jakarta yang memberikan andil terhadap penurunan skor IKP 2025 yaitu Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang) dan Rasio Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang dimiliki terhadap CPPD minimal.
- b. Sebagaimana diketahui bahwa hampir 98% pangan yang tersedia di DKI Jakarta didatangkan dari luar daerah sementara produksi lokal hanya sekitar 2%, sehingga ketergantungan pangan terhadap produksi daerah lain sangat tinggi.
- c. Sementara itu sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan CPPD sehingga belum dapat menganggarkan pembiayaan CPPD melalui APBD. Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan yang salah satunya mengatur pengelolaan CPPD baru terjadwal pembahasan oleh DPRD DKI Jakarta pada Triwulan I tahun 2026.

b. Perbandingan Kinerja dengan Target Renstra

IKU Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2023 - 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 10 Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 – 2025



(Sumber: Dokumen Renstra, diolah)

Berdasarkan grafik Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2023–2025, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, realisasi Indeks Ketahanan Pangan sebesar 82,22 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 80. Pada tahun 2024, realisasi meningkat signifikan menjadi 91,91, juga melampaui target 82,22, yang menunjukkan kondisi ketahanan pangan berada pada tingkat sangat baik. Namun pada tahun 2025, realisasi menurun menjadi 71,52 dan belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 79. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja ketahanan pangan sempat mengalami peningkatan yang tinggi pada tahun sebelumnya, diperlukan upaya penguatan dan langkah antisipatif agar capaian Indeks Ketahanan Pangan pada tahun berikutnya dapat kembali memenuhi target yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan Capaian dengan Nasional

IKU Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Perbandingan IKU Indeks Ketahanan Pangan dengan Standar Nasional

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional Tahun 2024	% Capaian
Menguatkan Ketahanan, Keamanan, dan Jaminan Ketersediaan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	71,52	85.13	84.01

(Sumber: emonev, Badan Pangan, diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menguatkan ketahanan, keamanan, dan jaminan ketersediaan pangan, realisasi Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2025 sebesar 71,52 telah mencapai 84,01% dari Standar Nasional tahun 2024 yang sebesar 85,13. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja ketahanan pangan daerah berada pada kategori cukup baik, namun masih terdapat selisih capaian dibandingkan standar nasional. Namun perhitungan secara nasional belum dirilis oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dan jadwal rilis pada umumnya pada semester I tahun berikutnya. Sehingga Tahun 2025 nilai IKP Provinsi DKI Jakarta belum terdapat nilai capaian sehingga belum dapat dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

d. Faktor Pendukung/ Keberhasilan

Salah satu faktor pendukung keberhasilan IKU Indeks Ketahanan Pangan yaitu adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait di bawah koordinator Bappeda untuk selalu memperbaharui data pendukung (Koefisien Varian harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam, dan minyak goreng, Rata-rata lama sekolah perempuan umur >15 tahun, Persentase keamanan pangan yg memenuhi standar (segar & siap saji) terhadap total sampel, dan Prevalensi Balita stunting).

1. Sumber Daya Manuasia

Dalam upaya mencapai IKU Indeks Ketahanan Pangan, telah dibentuk Tim Penyusun Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tingkat Provinsi dan 6 (enam) Kota/Kabupaten, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Bappeda, Subanpeko Kota/Kabupaten, Wali Kota, Bupati, DPPAPP, Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), BPS Provinsi, serta BPS Kota/Kabupaten

2. Sumber Anggaran

Program pendukung kinerja IKU Indeks Ketahanan Pangan adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 19 Program pendukung capaian IKU Indeks Ketahanan Pangan

NO	PROGRAM	APBD PENETAPAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI	PERSEN
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	826.866.257.018	1.027.118.785.388	1.025.504.042.900	99,84
2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	96.500.000	46.500.000	43.015.000	92,51
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.445.299.554	1.905.379.028	1.860.647.687	97,65
	TOTAL	829.408.056.572	1.029.070.664.416	1.027.407.705.587	99,84

3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Dalam mendukung pencapaian IKU Indeks Ketahanan Pangan, telah dikembangkan website SIKP yang dapat diakses melalui tautan <https://sikp.jakarta.go.id/>. SIKP merupakan situs yang dibangun oleh DKPKP Provinsi DKI Jakarta yang menyediakan data stok, pasokan, harga secara *real time*. Data pasokan yang disediakan antara lain sumber karbohidrat, daging, ikan, telur, sayur dan buah.

Gambar 3. 11 Tampilan Website SIKP



(Sumber: <https://sikp.jakarta.go.id/>)

e. Faktor Penghambat/ Kendala

Beberapa faktor penghambat tercapainya IKU Indeks Ketahanan Pangan antara lain:

- Terdapat 2 (dua) indikator baru yang datanya tidak tersedia di Provinsi DKI Jakarta yang memberikan andil terhadap penurunan skor IKP 2025 yaitu Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang) dan Rasio Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang dimiliki terhadap CPPD minimal
- Sebagaimana diketahui bahwa hampir 98% pangan yang tersedia di DKI Jakarta didatangkan dari luar daerah sementara produksi lokal hanya sekitar 2%, sehingga ketergantungan pangan terhadap produksi daerah lain sangat tinggi.

- Sementara itu sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan CPPD sehingga belum dapat menganggarkan pembiayaan CPPD melalui APBD. Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan yang salah satunya mengatur pengelolaan CPPD baru terjadwal pembahasan oleh DPRD DKI Jakarta pada Triwulan I tahun 2026.

f. Reencana Aksi di Tahun Akan Datang

Rencana aksi di tahun akan datang agar target IKU Indeks Ketahanan Pangan tercapai antara lain:

- Melakukan koordinasi dan sosialisasi penyusunan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) kepada seluruh pemangku kepentingan terkait.
- Melakukan koordinasi dalam proses analisis data dan penyusunan FSVA untuk memastikan keterpaduan dan keakuratan informasi.
- Melaksanakan pelatihan penyusunan FSVA guna meningkatkan kapasitas SDM dalam pengolahan data dan analisis ketahanan pangan.

3.2.8 Capaian IKU Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan level sasaran dengan target sebesar 92,7 % dan realisasi sebesar 94,7 % atau sebesar 102,16 %.

Sesuai rilis Badan Pangan Nasional (berdasarkan Susenas BPS) bulan Desember tahun 2025, Skor PPH Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan sebesar 3,39 poin dari 91,31 pada tahun 2024 menjadi 94,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 20 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								
		Berat (Gram/kap /hari)	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	% Aktual	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	SKOR PPH Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	271,07	1077,82	51,67	51,32	0,5	25,84	25,66	25,00	25,00
2	Umbi-umbian	49,34	50,29	2,41	2,39	0,5	1,21	1,20	2,50	1,20

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								
		Berat (Gram/kap/hari)	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	% Aktual	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	SKOR PPH Maks	Skor PPH
3	Pangan Hewani	164,78	341,78	16,39	16,28	2	32,77	32,55	24,00	24,00
4	Minyak dan Lemak	30,05	269,36	12,91	12,83	0,5	6,46	6,41	5,00	5,00
5	Buah/Biji Berminyak	1,28	7,22	0,35	0,34	0,5	0,17	0,17	1,00	.17
6	Kacang-kacangan	33,34	81,16	3,89	3,86	2	7,78	7,73	10,00	7,73
7	Gula	20,47	67,05	3,21	3,19	0,5	1,61	1,60	2,50	1,60
8	Sayur dan Buah	248,84	140,29	6,73	6,68	5	33,63	33,40	30,00	30,00
9	Lain-lain	133,13	50,86	2,44	2,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	952,29	2085,84	100,00	99,31	11,50	109,47	108,72	100	94,70

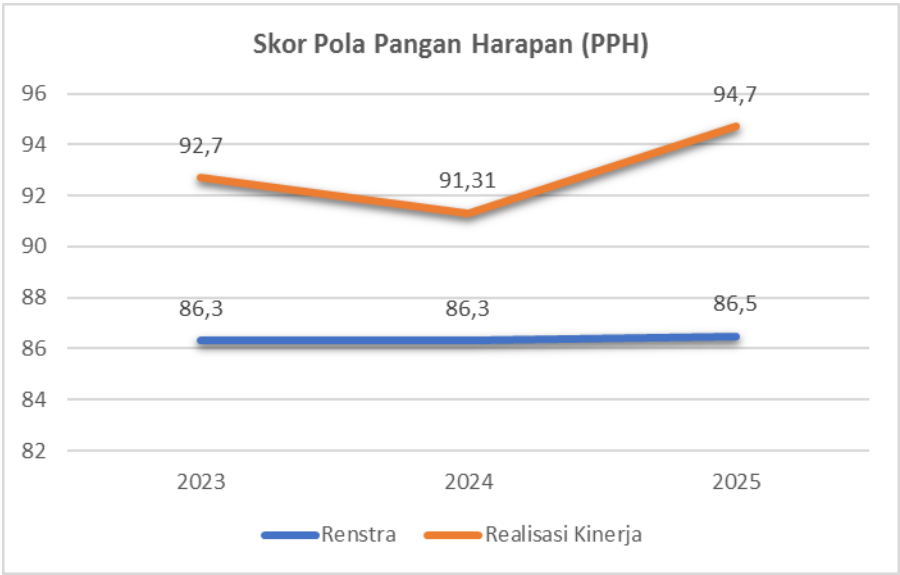
(Sumber: Badan Pangan Nasional, diolah)

Peningkatan skor PPH Provinsi DKI Jakarta dikarenakan adanya penguatan metodologi perhitungan Skor PPH yang mempertimbangkan faktor eksternal seperti dinamika harga pangan dan inflasi, penyesuaian angka konversi makanan jadi dan penambahan 28 (dua puluh delapan) komoditas baru pada klasifikasi pangan khususnya kelompok pangan hewani, sayur dan buah sehingga dapat memberikan gambaran lebih jelas terhadap pangan yang cukup besar konsumsinya di masyarakat tetapi belum terpotret dalam penghitungan.

b. Perbandingan Kinerja dengan Target Renstra

IKU Peningkatan Skor PPH Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2023 - 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 12 Peningkatan Skor PPH Tahun 2023 – 2025



(Sumber: Dokumen Renstra, diolah)

Berdasarkan grafik Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2023–2025, dapat disimpulkan bahwa realisasi skor PPH menunjukkan kondisi yang stabil dan konsisten tinggi serta selalu melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, realisasi mencapai 92,7, lebih tinggi dibandingkan target 86,3. Pada tahun 2024, meskipun target meningkat menjadi 91,31, realisasi tetap berada di atas target dengan nilai 92,7. Selanjutnya pada tahun 2025, realisasi skor PPH tetap stabil pada angka 94,7, kembali melampaui target 86,5. Capaian ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat telah berada pada kondisi beragam, bergizi, seimbang, dan berkelanjutan, serta mencerminkan efektivitas program peningkatan kualitas konsumsi pangan yang telah dilaksanakan.

c. Perbandingan Capaian dengan Nasional

IKU Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Perbandingan IKU Indeks Ketahanan Pangan dengan Standar Nasional

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional Tahun 2024	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dengan Gizi Baik	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	94.7	91.31	103,71

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya kualitas konsumsi pangan dengan gizi baik, realisasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2025 sebesar 94,7 telah melampaui Standar Nasional tahun 2024 yang sebesar 91,31, dengan tingkat capaian mencapai 101,52%. Capaian ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat telah berada pada kondisi sangat baik, mencerminkan konsumsi pangan yang semakin beragam, bergizi, seimbang, dan berkualitas, serta menunjukkan efektivitas program peningkatan kualitas konsumsi pangan yang telah dilaksanakan.

d. Faktor Pendukung/ Keberhasilan

Realisasi IKU Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: adanya dinamika harga pangan dan inflasi, dan penyesuaian angka konversi makanan jadi dan penambahan 28 komoditas baru pada klasifikasi pangan khusus kelompok pangan hewani, sayur dan buah.

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu kegiatan dalam pencapaian IKU Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah pengawasan mutu dan bahan pangan segar ke pedagang baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Dalam melaksanakan pengawasan pangan, para pegawai yang ditugaskan terdiri dari pegawai Suku Dinas keenam wilayah, ditambah pegawai UPT Pusat Pemasaran Sertifikasi Hasil Pertanian yang bertugas menguji kandungan bahan pangan.

2. Sumber Daya Anggaran

Program pendukung kinerja IKU Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 22 Program Pendukung Capaian IKU Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

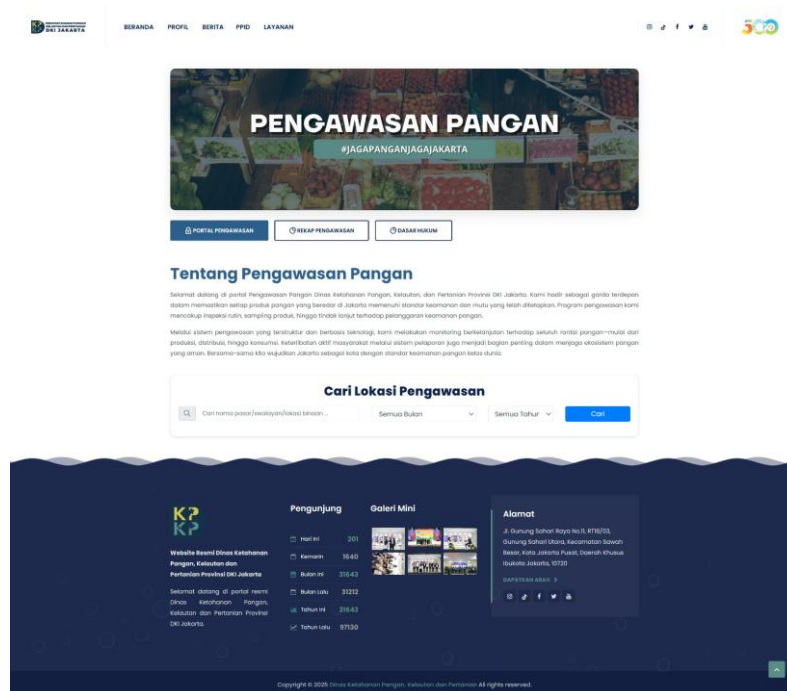
NO	PROGRAM	APBD PENETAPAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI	PERSEN
1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	826,866,257,018	1,027,118,785,388	1,025,504,042,900	99.84
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2,445,299,554	1,905,379,028	1,860,647,687	97.65

NO	PROGRAM	APBD PENETAPAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI	PERSEN
	TOTAL	829,311,556,572	1,029,024,164,416	1,027,364,690,587	99.84

3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Dalam memberikan informasi terkait keamanan pangan yang transparan, data hasil pengawasan bahan pangan dicantumkan pada website DKPKP yang dapat diakses pada dkpkp.jakarta.go.id. Melalui sistem pengawasan yang terstruktur dan berbasis teknologi, kami melakukan monitoring berkelanjutan terhadap seluruh rantai pangan—mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Keterlibatan aktif masyarakat melalui sistem pelaporan juga menjadi bagian penting dalam menjaga ekosistem pangan yang aman.

Gambar 3. 13 Tampilan Website DKPKP



(Sumber: dkpkp.go.id)

e. Faktor Penghambat/ Kendala

Faktor penghambat atau kendala dalam pencapaian IKU Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah keterbatasan lahan yang tersedia untuk pengembangan pangan lokal. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang produksi dan diversifikasi komoditas pangan lokal, sehingga upaya peningkatan

variasi dan kualitas konsumsi pangan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inovatif dan pemanfaatan lahan alternatif untuk tetap mendukung peningkatan Skor PPH secara berkelanjutan.

f. Reencana Aksi di Tahun Akan Datang

Rencana aksi pada tahun mendatang dalam mencapai IKU Skor Pola Pangan Harapan (PPH) akan difokuskan pada pelaksanaan sosialisasi pola pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan yang seimbang dan berkualitas, mendorong perubahan perilaku konsumsi ke arah yang lebih sehat, serta mendukung terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam dan berkelanjutan. Melalui sosialisasi yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan capaian Skor PPH dapat terus meningkat dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

3.2.9 Capaian IKU Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU)

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU) merupakan level sasaran dengan target sebesar 2,5 % dan realisasi sebesar 3,22 % atau sebesar 71,2 %. IKU Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU) dengan polarisasi minimize sehingga realisasi yang melampaui target adalah bermakna negative dan dinyatakan belum mencapai target.

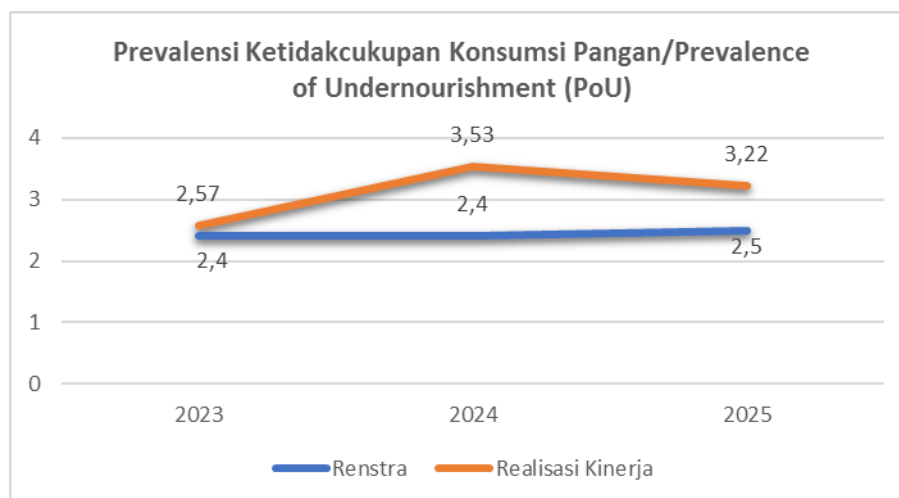
PoU (Prevalence of Undernourishment) atau Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator PoU dihitung berdasarkan asupan kalori (kkal/kap/hr) (data susenas konsumsi dan pengeluaran/KP) dibandingkan dengan Minimum Dietary Energy Requirements/MDER (berdasarkan proporsi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur).

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik tahun 2025, PoU Provinsi DKI Jakarta membaik dibandingkan tahun 2024 dari 3,57% turun menjadi 3,22%. Namun demikian nilai PoU tersebut jika dibandingkan dengan target 2,5% yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 hanya tercapai 71,2%. Tidak terpenuhinya target nilai PoU tahun 2025 disebabkan gejolak harga pangan hortikultura tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 yang naik berkisar 0,95% sampai dengan 21,51% yang menyebabkan terjadinya pengalihan belanja pada komoditas yang sedang tinggi harganya dan mengurangi konsumsi pangan lainnya.

b. Perbandingan Kinerja dengan Target Renstra

IKU Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU) Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2023 - 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 14 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU) Tahun 2023 - 2025



(Sumber: Dokumen Renstra, diolah)

IKU Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU) dengan polarisasi minimize sehingga realisasi yang melampaui target adalah bermakna negative. Pada tahun 2023, capaian realisasi sebesar 2,57 sedikit lebih tinggi dari target Renstra sebesar 2,4. Pada tahun 2024 selisih antara realisasi kinerja dan target cukup jauh dengan capaian realisasi sebesar 3,53 dan target sebesar 2,4 yang menunjukkan kondisi ketidacukupan konsumsi

pangan yang kurang baik. Pada tahun 2025, kondisi ketidakcukupan konsumsi pangan semakin membaik meskipun capaian realisasi sebesar 3,22 masih lebih tinggi dari target sebesar 2,5. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakcukupan konsumsi pangan masih menjadi tantangan, sehingga diperlukan upaya penguatan program intervensi dan kebijakan yang lebih terarah untuk menurunkan angka PoU agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan Capaian dengan Nasional

IKU Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU) Tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 23 Perbandingan IKU Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU) dengan Standar Nasional

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional Tahun 2024	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dengan Gizi Baik	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU)	Persen	3.22	3.57	90.20

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas konsumsi pangan dengan gizi baik, realisasi Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) pada tahun 2025 sebesar 3,22% telah lebih baik dibandingkan Standar Nasional tahun 2024 yang sebesar 3,57%, dengan tingkat capaian 90,20%. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan berada pada kondisi cukup terkendali, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk menurunkan angka PoU agar semakin mendekati kondisi ideal sesuai target yang diharapkan.

d. Faktor Pendukung/ Keberhasilan

Faktor keberhasilan atau pendukung dalam pengukuran dan pencapaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) didukung oleh ketersediaan sumber data yang andal dan kredibel. Data perhitungan PoU diperoleh dari Survei

Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kementerian Kesehatan. Pemanfaatan data resmi tersebut memastikan bahwa proses penghitungan PoU dilakukan secara akurat, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perumusan kebijakan dan evaluasi program peningkatan kualitas konsumsi pangan.

1. Sumber Daya Manusia

Penyusunan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) didukung oleh keterlibatan tenaga profesional dan kompeten dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Penyusunan PoU dilaksanakan melalui koordinasi dan kolaborasi kedua instansi tersebut, yang memiliki kapasitas dan keahlian dalam pengumpulan, pengolahan, serta analisis data ketahanan dan konsumsi pangan. Dukungan SDM yang berpengalaman ini memastikan bahwa proses penyusunan PoU dilakukan secara objektif, akurat, dan sesuai dengan metodologi yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar yang andal dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pangan.

2. Sumber Daya Anggaran

Program pendukung kinerja IKU Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) tabel berikut:

Tabel 3. 24 Program pendukung capaian IKU Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)

NO	PROGRAM	APBD PENETAPAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI	PERSEN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	245.355.340.802	237.735.382.871	223.381.489.051	93,96
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	826.866.257.018	1.027.118.785.388	1.025.504.042.900	99,84
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	96.500.000	46.500.000	43.015.000	92,51

NO	PROGRAM	APBD PENETAPAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI	PERSEN
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.445.299.554	1.905.379.028	1.860.647.687	97,65

3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Dalam menunjang tercapainya IKU Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU), telah dibangun beberapa informasi terkait IKU tersebut di beberapa website antara lain:

1. Situs resmi DKPKP dengan alamat <https://dkpkp.jakarta.go.id/>

Situs resmi DKPKP menyajikan infografis terkait kegiatan dan layanan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta seperti Sterilisasi Kucing, Nomor Kontrol Veteriner, KUB Nelayan Jakarta, dan Database Sektoral. Di dalam menu Data Sektoral terdapat informasi terkait keamanan pangan yang merupakan pendukung IKU Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU).

Gambar 3. 15 Tampilan Website DKPKP



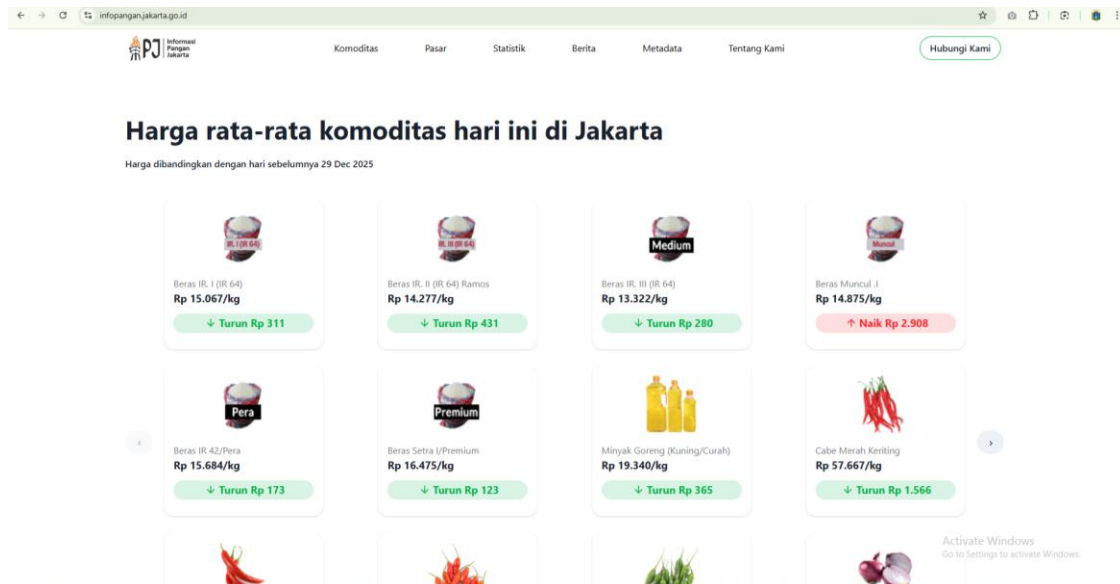
(Sumber: dkpkp.go.id)

2. Info Pangan Jakarta (IPJ) : <https://infopangan.jakarta.go.id/>

IPJ merupakan situs Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang difokuskan pada diseminasi informasi harga bahan pangan strategis yaitu komoditas pangan yang dikonsumsi masyarakat secara luas

atau memiliki bobot kontribusi inflasi yang tinggi. Misi dari pengembangan PIHPS adalah untuk meningkatkan akses informasi harga pangan yang terpadu kepada pelaku ekonomi untuk menjaga ekspektasi masyarakat yang diperlukan untuk mendukung dalam upaya pencapaian sasaran inflasi dan peningkatan efisiensi perekonomian.

Gambar 3. 16 Tampilan Website IPJ



(Sumber: <https://infopangan.jakarta.go.id/>)

e. Faktor Penghambat/ Kendala

Faktor penghambat dalam pencapaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) antara lain adalah keterlambatan publikasi data, yang berdampak pada keterbatasan ketersediaan informasi terkini sebagai dasar analisis dan perumusan kebijakan. Selain itu, gejolak harga pangan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi nilai PoU, karena fluktuasi harga dapat menurunkan daya beli masyarakat dan berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan yang cukup dan bergizi.

f. Rencana Aksi di Tahun Akan Datang

Rencana aksi pada tahun mendatang dalam mencapai target Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) antara lain meliputi pelaksanaan sosialisasi PoU kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai kondisi ketidacukupan konsumsi pangan serta pentingnya upaya penurunannya. Selain itu juga akan dilaksanakan program-program pendukung

perbaikan nilai PoU, salah satunya melalui Program Pangan Bersubsidi, yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, terjangkau, dan bergizi, sehingga diharapkan mampu menurunkan tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan secara berkelanjutan.

3.3 Capaian IKU Sasaran Relevan lainnya

Secara keseluruhan capaian sasaran lainnya sebanyak 8 indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 25 Sasaran relevan Lainnya Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
				Tahunan		
Sasaran Relevan Lainnya						
1	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	Persentase	100	100	100,00
2	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persentase	100	100	100,00
3	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3,25	3,25	100,00
4	Peningkatan Penggunaan Peroduk Dalam Negeri	Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri	Persentase	80 - 100	100	100,00

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
				Tahunan		
5	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajaran	Persentase	100	100	100,00
6	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	100	100	100,00
7	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persentase	71	90,78	127,86
8	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100,00

Berdasarkan tabel kinerja Sasaran Relevan Lainnya, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja berhasil dicapai dengan sangat baik, bahkan sebagian melampaui target yang telah ditetapkan. Dari 8 indikator kinerja, 7 indikator mencapai target 100%, sedangkan 1 indikator melampaui target secara signifikan.

Implementasi rencana strategis komunikasi publik, pengelolaan keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel, tata kelola SDI yang berkualitas, penggunaan produk dalam negeri, penerapan budaya pembelajaran dan berbagi pengetahuan, penerapan manajemen risiko, serta penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK seluruhnya mencapai 100%, menunjukkan efektivitas pelaksanaan program serta kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola yang baik.

Sementara itu, indikator kinerja anggaran atas aspek implementasi menunjukkan capaian 90,78%, jauh melampaui target sebesar 71%. Hal ini mencerminkan optimalisasi pelaksanaan anggaran, perencanaan yang matang, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Terhadap indikator kinerja yang tercapai sesuai target, didukung oleh beberapa faktor yaitu:

1. Koordinasi secara intensif antar instansi terkait dalam mewujudkan target yang telah direncanakan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar dapat mengantisipasi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Responsif terhadap kendala dan hambatan yang berpotensi tidak tercapainya target.

Meskipun seluruh Sasaran Relevan Lainnya telah tercapai dengan baik, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat atau kendala yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja ke depan, antara lain:

1. Perubahan serta penyesuaian kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan aset memerlukan adaptasi yang cepat, yang pada beberapa kondisi dapat memperlambat proses pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan program yang melibatkan banyak unit kerja membutuhkan koordinasi yang intensif sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam penyelarasan pelaksanaan program.
3. Dalam pemenuhan data kinerja, khususnya data SDI dan inventarisasi BMD, masih ditemui kendala berupa ketidaktepatan waktu pembaruan data serta perbedaan kualitas data antar unit pengelola.

3.4 Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Pada Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian telah melaksanakan kinerja mengampu tujuh sasaran strategis dengan capaian kinerja rata-rata diatas 100 %. Rata-rata realisasi anggaran yang mendukung kinerja tersebut capaiannya sebesar 98,52% sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3. 26 Capaian Anggaran Program Tahun 2025

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	APBD PENETAPAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan	245.355.340.802	237.735.382.871	223.381.489.051	93,96

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	APBD PENETAPAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN
		Pemerintahan Daerah				
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan	826.866.257.018	1.027.118.785.388	1.025.504.042.900	99,84
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Wilayah Tahan Pangan	96.500.000	46.500.000	43.015.000	92,51
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan yang Bebas Bahan Berbahaya	2.445.299.554	1.905.379.028	1.860.647.687	97,65
5	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Ruang Laut	6.242.280.819	5.692.466.897	5.459.959.360	95,92
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	30.792.003.005	30.385.555.665	29.828.587.704	98,17
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	12.116.404.446	11.853.873.455	11.167.338.339	94,21
8	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	1.604.671.035	1.074.251.309	1.040.083.635	96,82
9	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan	11.004.683.259	10.633.659.763	10.155.708.250	95,51
		Angka Konsumsi Ikan				
10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Pemenuhan Sarana	10.968.178.372	11.358.496.145	11.004.867.710	96,89

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	APBD PENETAPAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN
	SARANA PERTANIAN	Pertanian				
11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Perternakan dalam Kondisi Baik	24.038.089.956	18.567.503.291	17.647.196.704	95,04
		Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik				
12	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Prasarana Perternakan dalam Kondisi Baik	9.405.736.580	11.945.788.210	11.141.192.710	93,26
		Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik				
13	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi dan Pemasaran Produk Pertanian dan Peternakan	10.727.976.305	10.270.037.616	9.975.042.923	97,13
		Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya				
14	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Area Lahan yang Terkendali	1.167.778.021	1.210.952.109	1.147.443.399	94,76
	TOTAL		1.192.831.199.172	1.379.798.631.747	1.359.356.615.372	98,52

Realisasi APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 1.359.356.615.372,- (satu triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.379.798.631.747,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus

sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar 98,52 %.

Adapun secara keseluruhan program yang mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 realisasi mencapai rata-rata dalam kategori sangat baik yaitu melampaui 100 persen.

Tabel 3. 27 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

NO.	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	APBD PENETAPAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100,00	245.355.340.802	237.735.382.871	223.381.489.051	93,96
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan	100	100	100,00	826.866.257.018	1.027.118.785.388	1.025.504.042.900	99,84
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Wilayah Tahan Pangan	100	100	100,00	96.500.000	46.500.000	43.015.000	92,51
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan yang Bebas Bahan Berbahaya	100	100	100,20	2.445.299.554	1.905.379.028	1.860.647.687	97,65
5	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESIRIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Ruang Laut	19	19	100,38	6.242.280.819	5.692.466.897	5.459.959.360	95,92
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	181.352	204.332	112,67	30.792.003.005	30.385.555.665	29.828.587.704	98,17
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.983	5.280	105,95	12.116.404.446	11.853.873.455	11.167.338.339	94,21
8	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	75	87	116,09	1.604.671.035	1.074.251.309	1.040.083.635	96,82
9	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan	24.839	26.481	106,61	11.004.683.259	10.633.659.763	10.155.708.250	95,51
		Angka Konsumsi Ikan	48,61	49,84	102,53				

NO.	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	APBD PENETAPAN	APBD PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	69	100	144,51	10.968.178.372	11.358.496.145	11.004.867.710	96,89
11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Perternakan dalam Kondisi Baik	60	66	110,00	24.038.089.956	18.567.503.291	17.647.196.704	95,04
		Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik	60	95	158,33				
12	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Prasarana Perternakan dalam Kondisi Baik	60	66	110,00	9.405.736.580	11.945.788.210	11.141.192.710	93,26
		Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik	60	95	158,33				
13	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi dan Pemasaran Produk Pertanian dan Peternakan	3	4	119,70	10.727.976.305	10.270.037.616	9.975.042.923	97,13
		Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	3	100	2985,07				
14	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Area Lahan yang Terkendali	85	97	114,38	1.167.778.021	1.210.952.109	1.147.443.399	94,76
	TOTAL					1.192.831.199.172	1.379.798.631.747	1.359.356.615.372	98,52

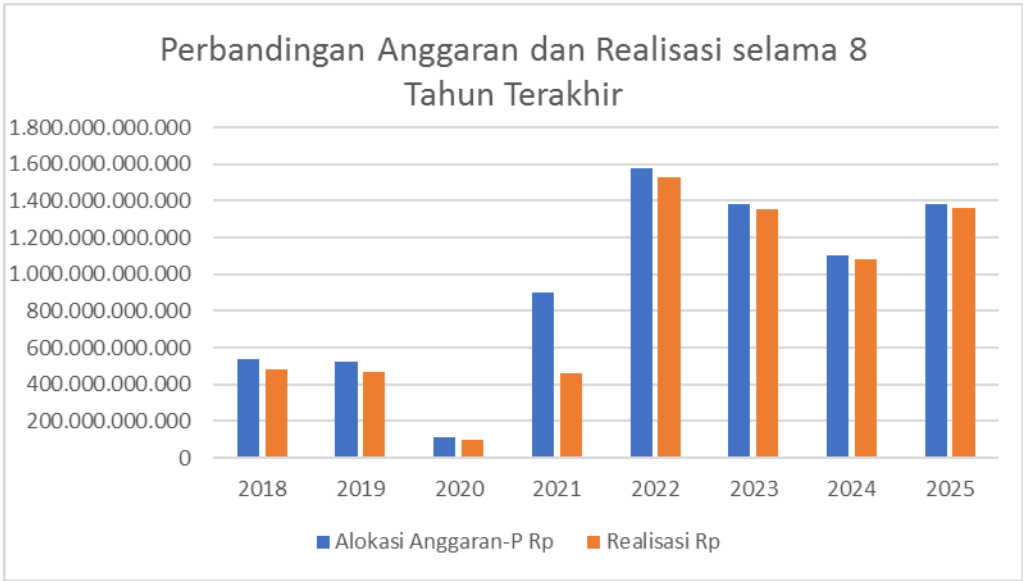
Berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah No. e-0022/UD.092.02 tentang Penyampaian Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Tahun 2025, disampaikan bahwa nilai kinerja Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebesar 90,78 %. Adapun rincian nilai kinerja tersebut meliputi Nilai Bobot Capaian Keluaran sub kegiatan (BCKK) sebesar 43,50 %, nilai bobot efisiensi sebesar 22,97 %, nilai bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 14,77 %, dan nilai bobot penyerapan anggaran sebesar 9,54 %.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian provinsi DKI Jakarta Tahun selama Tahun 2018 - 2025 sesuai dengan realisasi adalah sebagai berikut ini :

Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2025

No.	Periode	Alokasi Anggaran-P Rp	Realisasi Rp	%
1	2018	538.522.150.904	481.605.876.962	89,43
2	2019	524.510.680.632	464.483.681.509	88,56
3	2020	111.347.366.703	100.213.317.933	90,00
4	2021	897.126.578.788	463.557.423.650	51,67
5	2022	1.573.604.852.663	1.526.429.069.771	97,00
6	2023	1.382.230.178.433	1.356.358.898.683	98,13
7	2024	1.100.802.235.165	1.082.126.914.088	98,30
8	2025	1.379.798.631.747	1.359.356.615.372	98,52

Gambar 3. 17 Perbandingan Anggaran dan Realisasi selama 8 Tahun Terakhir



Berdasarkan grafik perbandingan alokasi anggaran dan realisasi selama 8 tahun terakhir (2018–2025), dapat disimpulkan bahwa secara umum alokasi anggaran menunjukkan tren meningkat, terutama sejak tahun 2021 hingga mencapai puncaknya pada periode 2022–2023, meskipun terjadi fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Realisasi Anggaran Tahun 2025 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2024. Seluruh program yang mendukung kinerja IKU Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI dapat dilaksanakan secara optimal dengan capaian rata-rata sebesar 98,52%.

Pada tahun 2020 terlihat penurunan signifikan baik dari sisi alokasi maupun realisasi, yang dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan efisiensi besar-besaran pada periode tersebut. Sejak tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan baik pada alokasi maupun realisasi anggaran. Peningkatan tersebut disebabkan adanya penambahan anggaran yang cukup signifikan untuk program subsidi pangan murah.



BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan kinerja ini menguraikan realisasi kinerja dibandingkan dengan target kinerja awal tahun anggaran yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2023-2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA/DPPA SKPD Dinas, Sudin dan UPT) serta dokumen perencanaan lainnya.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya dapat dikatakan berhasil dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan hasil interval Tinggi-Sangat Tinggi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Jumlah anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Sudin dan UPT pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 1.192.831.199.172,- dan mengalami perubahan pada APBD-P 1.379.798.631.747,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.379.798.631.747,- atau sebesar 98,52 %.

Program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Sudin dan UPT Tahun 2025 berkaitan dengan kebijakan di bidang Pangan, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan yang diwujudkan kedalam indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (Perkin) yaitu:

1. Indeks Kesehatan Laut di wilayah kewenangan Provinsi dengan capaian 102,02%
2. Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik dengan capaian 100%

3. Jumlah Produksi Perikanan dengan capaian 107,71%
4. Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dengan capaian 123,79%
5. Persentase Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura dengan capaian 163,43%
6. Persentase Peningkatan Produksi Peternakan dengan capaian 102,33%
7. Indeks Ketahanan Pangan dengan capaian 77,82%
8. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan capaian 100%
9. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU) dengan capaian 71,20%

Berdasarkan hasil tersebut, maka perlu dipertahankan di tahun-tahun mendatang agar target semua capaian kinerja tetap tercapai.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Terhadap capaian IKU yang telah melebihi target, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian beserta jajaran akan tetap berkomitmen untuk meningkatkan kinerja demi memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat.
2. Dalam perencanaan kegiatan dan anggaran tahun berikutnya, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian akan berorientasi pada pencapaian outcome sehingga target kinerja dapat dilaksanakan dengan maksimal.
3. Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan setiap kegiatan maka diperlukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait sebelum dimulainya program sehingga hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang menggambarkan sasaran dan capaian kinerja Tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan permasalahan dan alternatif solusi sebagaimana diuraikan pada Bab III serta dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Perlunya meningkatkan pemahaman dan penerapan serta komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
2. Perlunya pengembangan kolaborasi seluas-luasnya diantaranya melalui inventarisasi kolaborator yang merupakan salah satu upaya alternatif untuk mencapai target kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
3. Mendorong UKPD lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian agar melakukan peninjauan dan pelaksanaan kolaborasi dengan berbagai pihak;
4. Tetap berkomitmen untuk mempertahankan program-program yang telah dicapai secara maksimal diantaranya Jakarta Bebas Rabies;
5. Pengoptimalan pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat sektor pertanian, peternakan dan perikanan dalam rangka mendorong penumbuhan ekonomi masyarakat ;
6. Meningkatkan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diantaranya pelayanan kesehatan hewan, DO bibit tanaman, pengujian bahan pangan segar baik pertanian, peternakan dan perikanan;
7. Upaya strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan IKP antara lain menyelesaikan pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan bersama DPRD untuk dapat menganggarkan pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) melalui APBD
8. Melakukan evaluasi kegiatan pendataan, pendampingan pendataan kepada petugas enumerator dan harmonisasi spesifikasi pangan target pendataan.
9. Optimalisasi penginputan data hasil pengawasan pangan segar pada aplikasi Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT)
10. Upaya strategi yang akan dilakukan untuk memperbaiki capaian PoU antara lain memastikan ketepatan sasaran program pangan bersubsidi melalui pemadanan data penerima manfaat bersama OPD terkait setiap bulannya dalam rangka menjaga daya beli masyarakat sasaran.



LAMPIRAN



Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

	
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama :	Hasudungan A. Sidabalok
Jabatan :	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama :	Pramono Anung
Jabatan :	Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, 2025	
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
	
Pramono Anung	Hasudungan A. Sidabalok NIP 197308122006041004

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Hasudungan A. Sidabalok
 NIP : 197308122006041004
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Mewujudkan Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir Melalui Pengelolaan yang Bertanggung Jawab	Indeks Kesehatan Laut di wilayah kewenangan Provinsi	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematiriman dan Investasi Marves Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenko Marves Definisi Operasional : Indikator untuk menunjukkan status kesehatan ekosistem laut dalam area atau batasan geografis tertentu pada waktu (tahun) tertentu. Metode Pengukuran : Hasil Akhir Penilaian terhadap 10 indikator kesehatan laut sesuai pedoman pengukuran indeks kesehatan laut Indonesia - Melakukan penghitungan dengan data tahun sebelumnya - Nilai 0-100 Sumber Data : DKPKP	N/A	N/A	N/A	69,65	69,65	Indeks
2	Meningkatnya Pelestarian Sumber Daya Laut dan Kawasan Pesisir	Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi b. Keputusan Dirjen pengelolaan ruang laut nomor 28 tahun 2020 tentang Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Definisi Operasional: Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik sesuai dengan standar kondisi yang telah diatur. Metode Pengukuran : Luas kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik / total luas kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial * 100% Sumber Data : DKPKP	N/A	N/A	N/A	36,59	36,59	Persentase
3	Meningkatnya Kualitas dan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan serta Pencegahan Penangkapan Ikan Berlebihan	Jumlah Produksi Perikanan	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/Permen-Kp/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan Definisi Operasional : Merupakan jumlah total produksi sektor perikanan (tangkap, budidaya, dan olahan hasil perikanan). Metode Pengukuran : Menjumlahkan total produksi perikanan tangkap, budidaya (ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan) dan olahan hasil perikanan. Sumber Data : DKPKP	51,582	49,318	55,182	63,123	219,205	Ton

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
4	Meningkatkan Budidaya dan Produksi Bahan Pangan di Kawasan Perkotaan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Sistem Monev Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Budidaya Pertanian Berkelanjutan</p> <p>b. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Pertambahan produksi pertanian segar dan olahan meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (itik, kambing, sapi perah dan sapi potong) setiap tahun.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Pertambahan jumlah produksi dibandingkan dengan jumlah produksi pertanian dan peternakan tahun sebelumnya kali 100 persen</p> <p>Sumber Data : DKPKP</p>	N/A	N/A	N/A	29	29	Persentase
5	Terciptanya Produktivitas Sumber Daya Pertanian Perkotaan yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim dan Perkembangan Teknologi	1. Persentase Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura	Sistem Monev Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Budidaya Pertanian Berkelanjutan</p> <p>b. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian</p> <p>Definisi :</p> <p>Persentase Pertambahan produksi pertanian segar dan olahan meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan olahan tiap tahun.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Pertambahan jumlah produksi dibandingkan dengan jumlah produksi pertanian tahun sebelumnya kali 100 persen</p> <p>Sumber Data : DKPKP</p>	N/A	N/A	N/A	28	28	Persentase
		2. Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	Sistem Monev Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 115/permentan/OT.140/9/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian</p> <p>c. Renstra Kementerian Pertanian</p> <p>Definisi :</p> <p>Persentase pertambahan produksi peternakan seperti daging sapi, kambing, babi, unggas, itik, susu, dll tiap tahun.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Pertambahan jumlah produksi dibandingkan dengan jumlah produksi peternakan (peternakan seperti daging sapi, kambing, babi, unggas, itik, susu, dll) tahun sebelumnya kali 100 persen</p> <p>Sumber Data : DKPKP</p>	N/A	N/A	N/A	30	30	Persentase
6	Menguatkan Ketahanan, Keamanan, dan Jaminan Ketersediaan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Sistem Monev Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi</p> <p>Definisi :</p> <p>Indeks Ketahanan Pangan digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p><i>Cut off point</i> indeks ketahanan pangan IKP 1 : <37,61 ; sangat rentan pangan IKP 2 : >37,61 - 48,27 ; rentan pangan IKP 3 : >48,27 - 57,11 ; agak rentan pangan IKP 4 : >57,11 - 65,96 ; agak tahan pangan IKP 5 : >65,96 - 74,40 ; tahan pangan IKP 6 : >74,40 ; sangat tahan pangan</p> <p>Sumber Data : Badan Pangan Nasional, DKPKP (Data FSVA)</p>	N/A	N/A	N/A	91,91	91,91	Indeks

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
7	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dengan Gizi Baik	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Definisi : Susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Metode Pengukuran : Data yang digunakan dalam penghitungan skor PPH adalah data jumlah konsumsi energi per kelompok pangan. Proporsi konsumsi energi untuk masing-masing kelompok hasil kesepakatan Deptan tahun 2001 yaitu : (1) Padi-padian 50%, (2) Umbi-umbian 6%, (3) Pangan hewani 12%, (4) Minyak dan lemak 10%, (5) Buah dan biji berminyak 3%, (6) Kacang-kacangan 5%, (7) Gula 5%, (8) Sayur dan buah 6%, serta (9) Lain-lain (bumbu) 3%. Dalam konsep PPH akan diperoleh skor ideal sebesar 100, yang artinya kualitas konsumsi pangan penduduk disebut ideal apabila mempunyai skor PPH sebesar 100. Sumber Data : BPS, Badan Pangan Nasional, DKPKP (Mengolah data Badan Pangan Nasional)	N/A	N/A	N/A	92,7	92,7	Skor
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/ <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan b. PP Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Definisi : Proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Kategori : sangat rendah <2,5 % rendah 2,5 - 4 % sedang 5 -19 % tinggi 20-34 % sangat tinggi >35 % (semakin rendah nilai semakin bagus). Metode Pengukuran : PoU dinyatakan dalam persentase MDER (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>). $PoU= \int x<MDER f(x)dx$ Ket: PoU: Proporsi populasi yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal MDER: Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>) $f(x)$: Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu. Sumber Data : Badan Pusat Staltistik (BPS), Badan Pangan Nasional, DKPKP (Data Neraca Bahan Pangan)	N/A	N/A	N/A	2,5	2,5	Persen
Sasaran Relevan Lainnya										
8	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Definisi Operasional : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi.	100	100	100	100	100	Persentase

					I	II	III	I		
T yang daftar		Nilai		a. b. Definisi Nilai a.						
				(Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)						

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Keterangan :</p> <p>a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan)</p> <p>b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan)</p> <p>c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan)</p> <p>d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan)</p> <p>Catatan :</p> <p>a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p>						
11	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</p> <p>d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>).</p> <p>b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:</p> <p>5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa</p> <p>5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</p> <p>5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</p> <p>5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p> <p>5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</p> <p>5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</p> <p>5.2.06 - Belanja Modal Lainnya</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).</p> <p>Sumber Data :</p> <p>a. <i>Bigbox</i> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</p> <p>b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP)</p> <p>c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD)</p> <p>Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).</p>	N/A	100	N/A	100	100	Persentase
12	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p>	10	40	70	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
	Berbagi Pengetahuan		e-Kinerja	<p>Definisi Operasional : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>)</p> <p>Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>)</p> <p>Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV : a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD.</p> <p>Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV</p> <p>Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>						
13	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko		<p>Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : $\left(\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4}} \right) \times 100\%$</p> <p>Output Sasaran : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025</p>	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)						
14	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase
15	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)						

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

Jakarta, 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta,

Hasunangan A. Sidabalok
NIP 197308122006041004

Lampiran 2 Rencana Aksi Tahun 2025

RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2025

Kepala Dinas Ketahanan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran Pangan,	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Mewujudkan Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir	Indeks Kesehatan Laut di wilayah kewenangan Provinsi	69,65	RA1. Melakukan koordinasi antar stakeholder untuk memperoleh data terkait dalam pencapaian target Indeks Kesehatan Laut	KK1.1. Terlaksananya koordinasi antar stakeholder untuk memperoleh data terkait dalam pencapaian target Indeks Kesehatan Laut	T/O1.1.1. Laporan Hasil Koordinasi dengan para stakeholder untuk memperoleh data terkait pencapaian target Indeks Kesehatan Laut	1 Laporan	TW II	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut 3. Kepala Suku Dinas KP KP Kep Seribu
	Melalui Pengelolaan yang Bertanggung Jawab			RA2. Melakukan pemantauan Ekosistem Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	KK2.1. Terlaksananya pemantauan Ekosistem Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	T/O2.1.1. Laporan Hasil Pemantauan Ekosistem Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1 Laporan	TW III	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut 3. Kepala Suku Dinas KP KP Kep Seribu
				RA3. Melakukan perhitungan indeks kesehatan laut	KK3.1. Indeks Kesehatan Laut	T/O3.1.1. Dokumen Hasil Perhitungan Indeks Kesehatan Laut sebesar 69,65	1 Dokumen	TW IV	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut 3. Kepala Suku Dinas KP KP Kep Seribu
2	Meningkatnya Pelestarian Sumber Daya Laut dan Kawasan Pesisir	Persentase lusan kawasan perikanan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik	36,59%	RA1. Melakukan penanaman mangrove	KK1.1. Terlaksananya penanaman mangrove	T/O1.1.1. Nota Dinas penanaman bibit mangrove yang ditanam sebanyak 20.000 bibit mangrove	1 Nota Dinas	TW II	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
						T/O1.1.2. Nota Dinas penanaman bibit mangrove yang ditanam sebanyak 30.000 bibit mangrove	1 Nota Dinas	TW III	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
						T/O1.1.3. Nota Dinas penanaman bibit mangrove yang ditanam sebanyak 30.000 bibit mangrove	1 Nota Dinas	TW IV	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
				RA2. Melakukan transplantasi karang	KK2.1. Terlaksananya transplantasi karang	T/O2.1.1. Nota Dinas transplantasi bibit karang sebanyak 4.000 bibit karang yang ditransplantasi	1 Nota Dinas	TW II	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
						T/O2.1.2. Nota Dinas transplantasi bibit karang sebanyak 6.288 bibit karang yang ditransplantasi	1 Nota Dinas	TW IV	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
				RA3. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas bagi Kelompok DPL-BM (Daerah Pengelolaan Laut Berbasis Masyarakat)	KK3.1. Terlaksananya pembinaan kelompok DPL-BM selaku pengelola kawasan perairan	T/O3.1.1. Laporan Kelompok DPL-BM yang dibina sebanyak 3 kelompok	1 Laporan	TW II	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Suku Dinas KP KP Kep Seribu
						T/O3.1.2. Laporan Kelompok DPL-BM yang dibina sebanyak 3 kelompok	1 Laporan	TW III	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Suku Dinas KP KP Kep Seribu
						T/O3.1.3. Laporan Kelompok DPL-BM yang dibina sebanyak 2 kelompok	1 Laporan	TW IV	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Suku Dinas KP KP Kep Seribu
3	Meningkatnya Kualitas dan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan serta Pencegahan Penangkapan Ikan Berlebih	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	219.205	RA1. Melakukan pembinaan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan	KK1.1. Terlaksananya pembinaan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan	T/O1.1.1. Laporan pembinaan nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan sebanyak (87 Nelayan, 66 Pembudidaya dan 36 Pengolah) yang dibina	1 Laporan	TW I	1. Kepala Bidang Perikanan 2. Para Kepala Suku Dinas KP KP 5 Wilayah Kota/Kab

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O1.1.2. Laporan pembinaan nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan sebanyak (87 Nelayan, 66 Pembudidaya dan 36 Pengolah) yang dibina	1 Laporan	TW II	1. Kepala Bidang Perikanan 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
						T/O1.1.3. Laporan pembinaan nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan sebanyak (87 Nelayan, 66 Pembudidaya dan 36 Pengolah) yang dibina	1 Laporan	TW III	1. Kepala Bidang Perikanan 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
						T/O1.1.4. Laporan pembinaan nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan sebanyak (87 Nelayan, 66 Pembudidaya dan 36 Pengolah) yang dibina	1 Laporan	TW IV	1. Kepala Bidang Perikanan 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
				RA2. Melakukan pelatihan dan pemberian bantuan sarana kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan	KK2.1. Terlaksananya pelatihan dan pemberian bantuan sarana kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan	T/O2.1.1. Laporan pelatihan dan pemberian bantuan sarana kepada nelayan/pembudidaya/pengolah perikanan sebanyak (280 Pembudidaya dan 740 Pengolah)	1 Laporan	TW II	1. Kepala Bidang Perikanan 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
						T/O2.1.2. Laporan pelatihan dan pemberian bantuan sarana kepada nelayan/pembudidaya/pengolah perikanan sebanyak (350 Nelayan dan 190 Pembudidaya)	1 Laporan	TW IV	1. Kepala Bidang Perikanan 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
4	Meningkatkan Budidaya dan Produksi Bahan Pangan di Kawasan Perkotaan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	29%	RA1. Melakukan kolaborasi lintas sektoral pertanian untuk peningkatan produksi pertanian	KK1.1. Terlaksananya kolaborasi lintas sektoral mendukung peningkatan produksi dalam bentuk bantuan sarana produksi dan pelatihan	T/O1.1.1. Nota Dinas kegiatan kolaborasi yang memberikan bantuan sarana produksi dan/atau pelatihan yang mendukung peningkatan produksi pertanian sebanyak 4 kolaborator	1 Nota Dinas	TW II	1. Kepala Bidang Pertanian 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 3. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman
						T/O1.1.2. Nota Dinas kegiatan kolaborasi yang memberikan bantuan sarana produksi dan/atau pelatihan yang mendukung peningkatan produksi pertanian sebanyak 4 kolaborator	1 Nota Dinas	TW IV	1. Kepala Bidang Pertanian 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 3. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman
				RA2. Melakukan kolaborasi lintas sektoral pertanian untuk peningkatan produksi peternakan	KK2.1. Terlaksananya kolaborasi lintas sektoral untuk mendukung peningkatan produksi peternakan	T/O2.1.1. Nota Dinas kegiatan kolaborasi yang mendukung peningkatan produksi peternakan sebanyak 1 kolaborator	1 Nota Dinas	TW III	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
						T/O2.1.2. Nota Dinas kegiatan kolaborasi yang mendukung peningkatan produksi peternakan sebanyak 1 kolaborator	1 Nota Dinas	TW IV	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	Terciptanya Produktivitas Sumber Daya Pertanian Perkotaan yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim dan Perkembangan Teknologi	Persentase Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura	28%	RA1. Melakukan pelatihan, pendampingan dan pemberian bantuan sarana produksi	KK1.1. Terlaksananya pelatihan <i>Urban Farming</i>	T/O1.1.1. Nota Dinas kegiatan Pelatihan <i>Urban Farming</i> sebanyak 1000 orang	1 Nota Dinas	TW II	1. Kepala Bidang Pertanian 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
						T/O1.1.2. Nota Dinas kegiatan Pelatihan <i>Urban Farming</i> sebanyak 1000 orang	1 Nota Dinas	TW IV	1. Kepala Bidang Pertanian 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
					KK1.2. Terlaksananya pendampingan <i>Urban Farming</i>	T/O1.2.1. Nota Dinas pendampingan <i>Urban Farming</i> sebanyak 250 kelompok	1 Nota Dinas	TW IV	1. Kepala Bidang Pertanian 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 3. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
6	Terciptanya Produktivitas Sumber Daya Peternakan Perkotaan yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim dan Perkembangan Teknologi	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	30%		KK1.3. Terlaksananya pemberian bantuan sarana produksi <i>Urban Farming</i>	T/O1.3.1. Nota Dinas pelaksanaan pemberian bantuan sarana produksi <i>Urban Farming</i> sebanyak 100 kelompok	1 Nota Dinas	TW II	1. Kepala Bidang Pertanian 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
						T/O1.3.2. Nota Dinas pelaksanaan pemberian bantuan sarana produksi <i>Urban Farming</i> sebanyak 150 kelompok	1 Nota Dinas	TW IV	1. Kepala Bidang Pertanian 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
				RA1. Melakukan Pengawasan Bidang Peternakan	KK1.1. Terlaksananya Pengawasan di Bidang Peternakan	T/O1.1.1. Nota Dinas pelaksanaan pengawasan pelaku usaha Bidang Peternakan sebanyak 5 kali	1 Nota Dinas	TW II	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
						T/O1.1.2. Nota Dinas pelaksanaan pengawasan pelaku usaha Bidang Peternakan sebanyak 5 kali	1 Nota Dinas	TW IV	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
				RA2. Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Peternakan	KK2.1 Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Peternakan	T/O2.1.1. Nota Dinas kegiatan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha peternakan sebanyak 90 pelaku usaha	1 Nota Dinas	TW III	1. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan
						T/O2.1.2. Nota Dinas kegiatan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha peternakan sebanyak 30 pelaku usaha	1 Nota Dinas	TW IV	1. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan
7	Menguatkan Ketahanan, Keamanan dan Jaminan Ketersediaan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	91,91	RA1. Melakukan pendistribusian Pangan Bersubsidi	KK1.1. Terdistribusinya Pangan Bersubsidi	T/O1.1.1. Jumlah Laporan pendistribusian Pelaksanaan Subsidi Pangan Triwulan I	1 laporan	TW I	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O1.1.2. Jumlah Laporan pendistribusian Pelaksanaan Subsidi Pangan Triwulan II	1 laporan	TW II	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O1.1.3. Jumlah Laporan pendistribusian Pelaksanaan Subsidi Pangan Triwulan III	1 laporan	TW III	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O1.1.4. Jumlah Laporan pendistribusian Pelaksanaan Subsidi Pangan Triwulan IV	1 laporan	TW IV	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
				RA2. Melakukan Penghitungan Indeks Harga Konsumen (<i>volatile food</i>)	KK2.1. Terlaksananya perhitungan Indeks Harga Konsumen (<i>volatile food</i>)	T/O2.1.1. Nota Dinas Hasil Perhitungan Nilai Indeks Harga Konsumen (<i>volatile food</i>) TW I sebesar 148	1 Nota Dinas	TW I	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O2.1.2. Nota Dinas Hasil Perhitungan Nilai Indeks Harga Konsumen (<i>volatile food</i>) TW II sebesar 147	1 Nota Dinas	TW II	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O2.1.3. Nota Dinas Hasil Perhitungan Nilai Indeks Harga Konsumen (<i>volatile food</i>) TW III sebesar 143	1 Nota Dinas	TW III	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O2.1.4. Nota Dinas Hasil Perhitungan Nilai Indeks Harga Konsumen (<i>volatile food</i>) TW IV sebesar 126	1 Nota Dinas	TW IV	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
8	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dengan Gizi Baik	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92,7	RA1. Melakukan Sosialisasi Pola Konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	KK1.1. Masyarakat mengenal dan mengkonsumsi pangan B2SA	T/O1.1.1. Nota Dinas Sosialisasi Pola Konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) sebanyak 400 orang	1 Nota Dinas	TW I	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O1.1.2. Nota Dinas Sosialisasi Pola Konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) sebanyak 750 orang	1 Nota Dinas	TW II	Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA2. Penyebaran informasi pola konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman)	KK2.1. Tersampainya informasi pola konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman)	T/O1.1.3. Nota Dinas Sosialisasi Pola Konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) sebanyak 1000 orang	1 Nota Dinas	TW III	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O1.1.4. Nota Dinas Sosialisasi Pola Konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) sebanyak 1000 orang	1 Nota Dinas	TW IV	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O2.1.1. Nota Dinas capaian masyarakat yang mengakses informasi pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman) sebanyak 500 orang	1 Nota Dinas	TW II	1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
						T/O2.1.2. Nota Dinas capaian masyarakat yang mengakses informasi pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman) sebanyak 500 orang	1 Nota Dinas	TW III	1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
						T/O2.1.3. Nota Dinas capaian masyarakat yang mengakses informasi pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman) sebanyak 500 orang	1 Nota Dinas	TW IV	1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
9	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dengan Gizi Baik	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	2,5	RA1. Melakukan Penyusunan Peta Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Tingkat Provinsi	KK1.1. Tersusunnya Peta Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Tingkat Provinsi	T/O1.1.1. Dokumen Peta Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	TW IV	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
				RA2. Pendistribusian Pangan Bersubsidi untuk Masyarakat Tertentu	KK2.1 Teraksesnya pangan bersubsidi bagi masyarakat tertentu	T/O2.1.1. Nota Dinas penerima manfaat yang mengakses program pangan bersubsidi sebanyak 250.000 orang	1 Nota Dinas	TW I	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O2.1.2. Nota Dinas penerima manfaat yang mengakses program pangan bersubsidi sebanyak 600.000 orang	1 Nota Dinas	TW II	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O2.1.3. Nota Dinas penerima manfaat yang mengakses program pangan bersubsidi sebanyak 600.000 orang	1 Nota Dinas	TW III	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O2.1.4. Nota Dinas penerima manfaat yang mengakses program pangan bersubsidi sebanyak 400.000 orang	1 Nota Dinas	TW IV	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
					KK2.2 Terverifikasinya penerima manfaat pangan bersubsidi yang diusulkan	T/O2.2.1. Berita Acara Rekon Penerima Manfaat Pangan Bersubsidi	12 dokumen	TW I	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O2.2.2. Berita Acara Rekon Penerima Manfaat Pangan Bersubsidi	18 dokumen	TW II	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O2.2.3. Berita Acara Rekon Penerima Manfaat Pangan Bersubsidi	18 dokumen	TW III	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O2.2.4. Jumlah Berita Acara Rekon Penerima Manfaat Pangan Bersubsidi	12 dokumen	TW IV	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
Sasaran Relevan Lainnya									
10	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%	RA1. Keikutsertaan dalam bimbingan teknis terkait strategi komunikasi publik untuk penyusunan strategi komunikasi program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK1.1. Terselenggaranya bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O1.1.1. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O1.1.2. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.3. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW III	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.4. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW IV	Sekretaris Dinas
				RA2. Evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK2.1. Terlaksananya evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O2.1.1. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O2.1.2. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 3. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
						T/O.2.1.3. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O.2.1.4. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan
				11	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	RA1. Menyusun tim Inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK1.1. Tersusunnya tim Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD
T/O1.1.2. Daftar BMD yang sudah tervalidasi	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 3. Para Kepala UPT						
RA2. Melaksanakan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK2.1. Terlaksananya kegiatan Inventarisasi BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW2, sebesar 55% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW4	T/O2.1.1 Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan					TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 3. Para Kepala UPT
		T/O2.1.2. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan					TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 3. Para Kepala UPT

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O2.1.3 Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 3. Para Kepala UPT
				RA3. Menyusun Pelaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK3.1 Tersedianya Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud	T/O3.1.1 Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 3. Para Kepala UPT
12	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	T/O1.1.1 Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	1 Berita Acara	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 5. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
				RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	T/O2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 5. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
						T/O2.1.2. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman
						T/O2.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman
						T/O2.1.4. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman
13	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	T/O1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	T/O2.1.1 Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penandaan (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
				RA3. Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan.	KK3.1. Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	T/O3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O3.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O3.1.4. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
				RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui <i>e-Order</i>	KK4.1. Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui <i>e-Order</i>	T/O4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui <i>e-Order</i>	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O4.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui <i>e-Order</i>	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O4.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui <i>e-Order</i>	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O4.1.4. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
				RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	KK5.1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	T/O5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
14	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	RA1. Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran	KK1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	T/O1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
				RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aset Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar	KK2.1. Terlaksananya Kegiatan Komunitas Pembelajar	T/O2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O2.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
15	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	T/O1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 4. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	T/O2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 4. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
				RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 4. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
				RA4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 4. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
16	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem e-sakip Bappeda	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada monev Bappeda	1 Data	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem arget bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id	T/O2.1.1. data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id	1 Data	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
17	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 3. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 5. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian
						T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 3. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 5. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian
						T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 3. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 5. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian
						T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 3. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 5. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian
				KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK		T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 3. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 5. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 3. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 5. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 3. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 5. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian
						T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 3. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 5. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

Jakarta, 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta,

Hasudungan A. Sidabalok
NIP 197308122006041004

Lampiran 3 Capaian Kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
1	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat	Gemarikan	PT Bumifood	Sudin Pendidikan dan Sudin Kesehatan Jakarta Pusat	Makan bersama olahan ikan	1000 anak sekolah dan 100 anak balita mendapatkan olahan ikan siap makan berupa nugget ikan	1. SDN Mangga Dua Selatan 01 2. SDN Petamburan 07 3. SDN Kemayoran 01 4. SDN Kramat 06 5. Gelanggang Olahraga Mangga Dua Selatan	Pemberian olahan ikan (nugget ikan) siap makan untuk mendukung program/kegiatan gemarikan	1. 7 Agustus 2025 2. 19 Agustus 2025 3. 26 Agustus 2025 4. 29 Agustus 2025 5. 23 September 2025	Terlaksananya kegiatan Gemarikan dengan tambahan "makan bersama olahan ikan" di lokasi kegiatan	non MOU	Kegiatan gemarikan dilaksanakan dengan membagikan olahan ikan (frozen) kepada peserta. untuk mendukung kegiatan tersebut kolaborator memberikan bantuan berupa olahan ikan (nugget) siap makan untuk memperkenalkan olahan ikan yang mudah disantap anak2.
2	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kegiatan Urban Farming di lingkungan Kantor Walikota Jakarta Pusat	PT . Pegadaian Kantor Wilayah VIII Jakarta I	Bagian Umum Kantor Walikota Jakarta Pusat	budidaya dan panen sayuran hidroponik	100 kg sayuran hidroponik	Rooftop sisi utara balkon lantai II kantor Walikota Jakarta Pusat	10 unit rak hidroponik	1. 14 Juli 2025 (Penanaman) 2. 8 Agustus 2025 (Panen)	terlaksananya kegiatan pertanian perkotaan (urban faming) di rooftop kantor walikota jakarta pusat	non MOU	kegiatan urban farming di lingkungan kantor Walikota Jakarta Pusat yaitu seremonial penanaman pertama bibit sayuran hidroponik di sistem hidroponik oleh Walikota Jakarta Pusat. Kemudian panen perdana sayuran samhong dan pakcoy pada tanggal 8 Agustus 2025 dihadiri oleh Walikota Jakarta Pusat dan Deputi Bisnis PT Pegadaian Kantor Wilayah VIII Jakarta 1 , hasil panen diberikan kepada pengelola rooftop dan cleaning servis kantor Walikota Jakarta Pusat dan sebagian dijual kepada Pegawai Kantor Walikota Jakarta Pusat

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
3	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kegiatan Urban Farming di lingkungan Kantor Walikota Jakarta Pusat	PT East West Seed Indonesia	Bagian Umum Kantor Walikota Jakarta Pusat	pembibitan, budidaya dan panen sayuran dan buah semusim	100 kg sayuran hidroponik	Selasar samping Masjid Al Fauz, Rooftop sisi utara balkon dan rooftop sisi selatan lantai II lingkungan kantor Walikota Jakarta Pusat	50 sachet benih sayuran	1. 22 April 2025 (pembibitan) 2. 5 Mei 2025 (Panen)	terlaksananya kegiatan pertanian perkotaan (urban faming) di lingkungan kantor walikota jakarta pusat	Non MOU	Kegiatan urban farming di wilayah Jakarta Pusat yaitu dengan memberikan bantuan benih sayuran untuk menunjang kegiatan urban farming di lingkungan kantor Jakarta Pusat, hasil panen diberikan kepada pengelola Masjid Al Fauz dan Petugas Cleaning Servis Kantor Walikota Jakarta Pusat dan sebagian dijual kepada Pegawai Kantor Walikota Jakarta Pusat
4	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat	Sterilisasi Kucing Jantan	Komunitas KPKS dan Alpha	Unit Pengelola Gelanggang Kota Adm Jakarta Pusat	Sterilisasi Kucing Jantan Massal	Sterilisasi kucing jantan 400 ekor	Gelanggang olahraga Jakarta Pusat (GOR Senen)	1. Unit Pengelola Gelanggang meminjamkan tempat GOR Senen 2. KPKS dan Alpha	Selasa 5 Agustus 2025	Terlaksananya steril kucing jantan sebanyak 168 ekor	Non MOU	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
5	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat	Sosialisasi Tata Cara Pemotongan Hewan Kurban	1. Dewan Masjid Indonesia Jakarta Pusat	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Baznas Bazis Kota Jakarta Pusat	Sosialisasi tata cara pemotongan hewan kurban bagi pengurus mesjid sebanyak 50 dari 50 mesjid Jakarta Pusat, dan petugas pengawas pemotogan hewan kurban sebanyak 45 orang	95 orang	Ruang Serba Guna Besar Blok A lantai 1 Komplek Walikota Jakarta Pusat	1. Basnaz memberikan bantuan sarana peningkatan higienitas pemotongan berupa pisau sembelih untuk petugas dan terpal untuk pengurus mesjid 2. Dewan Masjid Indonesia Jakarta Pusat mengerahkan peserta dari anggota DMI	Rabu tanggal 4 Juni 2025	Terlaksananya sosialisasi tata cara pemotongan hewan kurban bagi pengurus mesjid sebanyak 50 dari 50 mesjid Jakarta Pusat, dan petugas pengawas pemotogan hewan kurban sebanyak 45 orang	Non Mou	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
1	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat	Sosialisasi Tata Cara Pemotongan Hewan Kurban	1. Dewan Masjid Indonesia Jakarta Barat 2. SKHB IPB 3. Baznas Bazis Kota Administrasi Jakarta Barat 4. MUI Kota Administrasi Jakarta Barat 5. PDHI Cab DKI Jakarta	1. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Barat 2. Baznas Bazis Kota Administrasi Jakarta Barat 3. MUI Kota Administrasi Jakarta Barat	Sosialisasi tata cara pemotongan hewan kurban bagi panitia pemotongan hewan kurban sebanyak 50 orang dari 50 mushola/masjid di Jakarta Barat	50 orang	Ruang Wijaya Kusuma Blok A Lantai 2, Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	1. Dewan Masjid Indonesia Jakarta Barat mengerahkan peserta dari anggota DMI Jakarta Barat 2. SKHB IPB memberikan bantuan Narasumber 3. Baznas Bazis Kota Administrasi Jakarta Barat memberikan bantuan dukungan kegiatan pemotongan kurban 4. MUI Kota Administrasi Jakarta Barat memberikan bantuan Narasumber 5. PDHI Cab DKI Jakarta memberikan bantuan Narasumber	28 Mei 2025	Terlaksananya sosialisasi tata cara pemotongan hewan kurban bagi panitia pemotongan hewan kurban sebanyak 50 orang dari 50 mushola/masjid di Jakarta Barat	Non MoU	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
2	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat	Sterilisasi Kucing Lokal	PDHI Cab DKI Jakarta		Sterilisasi Kucing Lokal	Sterilisasi Kucing Lokal Jantan : 300 ekor Betina : 200 ekor	Klinik Hewan dan Praktek Dokter Hewan di Jakarta Barat	PDHI Cab DKI Jakarta memberikan bantuan sebanyak 12 klinik hewan/praktek dokter hewan di Jakarta Barat untuk melakukan sterilisasi kucing (Kastrasi & Ovariohisterektomi)	1. Juli 2025 2. Agustus 2025 3. Oktober 2025 4. November 2025	Terlaksananya sterilisasi kucing lokal jantan sebanyak 300 ekor dan betina sebanyak 200 ekor	MoU	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/O utput	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolabor ator (MOU/N on MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
3	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat	Sterilisasi Kucing Jantan dalam rangka World Rabies Day	1. RSH Polri 2. Lets Adpot Indonesia 3. Baznas Basis Kota Administrasi Jakarta Barat 4. Unit Pengelola Gelanggang Kota Administrasi Jakarta Barat 5. PT Anzindo Gratia International 6. Indo Fish Mart 7. CV Pasar Tani Indonesia 8. CV Sumber Protein 9. Shopegg Indo 10. Petour Pet Food Indonesia	1. Unit Pengelola Gelanggang Kota Administrasi Jakarta Barat 2. Baznas Kota Administrasi Jakarta Barat 3. RSH Polri	Sterilisasi Kucing Jantan	Sterilisasi Kucing Jantan 400 ekor	GOR Kecamatan Grogol Petamburan	1. RSH Polri memberikan bantuan tenaga medis dan paramedis 2. Lets Adpot Indonesia memberikan bantuan tenaga medis dan paramedis 3. Baznas Basis Kota Administrasi Jakarta Barat memberikan bantuan dukungan kegiatan sterilisasi kucing 4. Unit Pengelola Gelanggang Kota Administrasi Jakarta Barat memberikan bantuan peminjaman GOR Kecamatan Grogol Petamburan 5. PT Anzindo Gratia International memberikan bantuan dukungan kegiatan sterilisasi kucing 6. Indo Fish Mart memberikan bantuan dukungan kegiatan sterilisasi kucing 7. CV Pasar Tani Indonesia memberikan bantuan dukungan kegiatan sterilisasi kucing 8. CV Sumber	13 September 2025	Terlaksananya sterilisasi kucing jantan sebanyak 400 ekor	Non MoU	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
4	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Sterilisasi Kucing Lokal			Sterilisasi Kucing Jantan							
5	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sterilisasi Kucing dan Vaksinasi Rabies	1. Komunitas penyayang hewan 2. Dokter hewan praktisi / klinik hewan swasta	Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta	Melaksanakan pelayanan sterilisasi kucing dan vaksinasi rabies	8000 ekor	Gedung Dinas KPKP DKI Jakarta, Gedung Judo, Taman Impian Jaya Ancol, Gedung Nyi Ageng Serang, TC Pertanian Klender	Dokter hewan praktisi / klinik hewan swasta membantu personel dokter hewan dan paramedis, komunitas penyayang hewan membantu dalam proses penangkapan, perawatan dan pelepasan kucing	Sepanjang tahun 2025	Terlaksananya kegiatan pelayanan sterilisasi dan vaksinasi rabies yang dilaksanakan oleh bidang peternakan dan kesehatan hewan	Non MOU	
		Pelatihan Juru Sembelih Halal	Halal Sceince Center IPB	PusyankeSwannak, RPH Dharma Jaya	Pelatihan dan Uji Kompetensi Juru Sembelih Halal Unggas dan Ruminansia	88 orang	Jl Gunung Sahari No 11 Jakarta Pusat	Pelatihan dan Uji Kompetensi Juru Sembelih Halal Unggas dan Ruminansia	Februari - April 2025	Unggas : 30 Ruminansia :58 total 88 orang	MOU	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
		Pelatihan Asisten Pengawas Kesmavet	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	Sudin KPKP 5 wilayah	Pelatihan petugas sudin, pendamping jakpreuner untuk dilatih menjadi assiten pengawas kesmavet	50 orang	Jl Gunung Sahari No 11 Jakarta Pusat	Peningkatan kompetensi petugas untuk menjadi asisten pengawas kesmavet	Oktober 2025	Terlaksananya kegiatan asisten pengawas kesmavet	MOU	
		KIE Zoonosis	1. PT Zoetis Animal Health 2. PT Anzindo Gratia International 3.PT Hepi Ternak Jakarta 4. Lets Adopt Indonesia	Dinas Pendidikan, Sudin KPKP 5 Wilayah dan 1 kab. Pulau 1000	Komunikasi, informasi dan edukasi penyakit zoonosis yaitu penyakit rabies untuk siswa SMP	600 orang	SMP 85 Jaksel, SMP 241 Pulau Seribu, SMP 216 Jakpus, SMP 55 Jakut, SMP 103 Jaktim dan SMP 111 Jakbar	Sosialisasi kepada siswa SMP ttg penyakit zoonosis (Rabies)	September-Oktober 2025	Terlaksananya KIE Zoonosis untuk siswa SMP	Non MOU	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
		Fun Run 5 K dalam rangka World Rabies Day Tahun 2025	PT. Bank Jakarta, Baznas Bazis, Perumda Dharma Jaya, PT. Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, PT. Royal Canin Indonesia, PT. Purina Indonesia, PT. Bevos Prima Center, PT. Happy Pet Indonesia, PT. Merck, Tbk, PT. Indoguna Utama, PT. Indoguna Utama, PT. Kemang Food Industries, PT. Boehringer Ingelheim, CV. Karebet Karya Persada	1. Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta 2. Dinas Kebudayaan 3. Diskominfo	Fun Run 5 K	1200 orang	TMII	Dukungan untuk terlaksananya kegiatan FunRun	Oktober 2025	Terlaksananya WRD Fun Run 5K	Non MOU	
		Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Koasistensi Kedokteran Hewan	SKHB IPB FKH UGM FKH Unair	-	Penyampaian materi tentang kegiatan kedinasan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, RPHU, lab. kesmavet serta praktek lapangan	100 mahasiswa	Dinas KPKP, Sudin KPKP 5 wilayah, PusyankeSwannak, RPH Dharma Jaya	Peningkatan kemampuan mahasiswa di kedinasan	Januari - Desember 2025	Terlaksananya PKL Koasistensi mahasiswa FKH	IPB : MOU UGM dan Unair : Non MOU	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
1	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Praktek Lapangan	SMKN 36		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	6 Orang	Balai Benih Ikan Ujung Menteng	Tenaga Pendamping Lapangan	Januari - Juni 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	
2	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Magang	Universitas Negeri Jakarta		Magang	2 Orang	Balai Benih Ikan Ujung Menteng	Tenaga Pendamping Lapangan	Februari - Mei 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	
3	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Kunjungan	TK Budi Harapan		Kunjungan	30 Orang	Balai Benih Ikan Ujung Menteng	Tenaga Pendamping Lapangan	Februari 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
4	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Praktek Lapangan	SMK 36		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	4 Orang	Balai Benih Ikan Ciracas	Tenaga Pendamping Lapangan	Januari - Juni 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	
5	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Penelitian	Sekolah Tinggi Perikanan		Penelitian	1 Orang	Balai Benih Ikan Ciracas	Tenaga Pendamping Lapangan	Januari - April 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	
6	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Magang	Sekolah Tinggi Perikanan		Penelitian	2 Orang	Balai Benih Ikan Ciracas	Tenaga Pendamping Lapangan	Januari - April 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
7	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Praktek Lapangan	Sekolah Vokasi IPB		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	19 Orang	Balai Benih Ikan Ciganjur	Tenaga Pendamping Lapangan	Januari - Maret 2025 (6 orang) Maret - Mei 2025 (8 Orang) Mei - Juni 2025 (5 Orang)	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	
8	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Penelitian	Sekolah Vokasi IPB		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	5 Orang	Balai Benih Ikan Ciganjur	Tenaga Pendamping Lapangan	Januari - Februari 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	
9	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Praktek Lapangan	SMKN 36		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	8 Orang	Balai Benih Ikan Ciganjur	Tenaga Pendamping Lapangan	Januari - Juni 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
10	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Praktek Lapangan	Untidar		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	4 Orang	Balai Benih Ikan Ciganjur	Tenaga Pendamping Lapangan	Januari - Februari 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	
11	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Praktek Lapangan	Universitas Bangka Belitung		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	4 Orang	Balai Benih Ikan Ciganjur	Tenaga Pendamping Lapangan	Juni - Juli 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	
12	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Praktek Lapangan	SMKN 36		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	8 Orang	Balai Benih Ikan Ciganjur	Tenaga Pendamping Lapangan	Juni - September 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
13	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Praktek Lapangan	SMKN 36		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	8 Orang	Balai Benih Ikan Ciganjur	Tenaga Pendamping Lapangan	Juni - September 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	
14	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Praktek Lapangan	SMKN 36		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	4 Orang	Balai Benih Ikan Ciracas	Tenaga Pendamping Lapangan	Juni - September 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	
15	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Praktek Lapangan	SMKN 36		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	12 Orang	Balai Benih Ikan Ujung Menteng	Tenaga Pendamping Lapangan	Juni - September 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
16	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Praktek Lapangan	Polda Metro Jaya		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	368 Orang	Balai Benih Ikan Ciganjur	Tenaga Pendamping Lapangan	Agustus 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	
17	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Pemberian Materi	Pusrehab		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	8 Orang	Pesanggrahan	Tenaga Pendamping Lapangan	Agustus - November2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	
18	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Kunjungan	DPRD Banten		Kunjungan	22 Orang	TPHP Cengkareng	Tenaga Pendamping Lapangan	Oktober 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
19	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Praktek Lapangan	Politeknik AUP		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	8 Orang	Balai Benih Ikan Ciganjur	Tenaga Pendamping Lapangan	September - November 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar		
20	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Praktek Lapangan	Politeknik AUP		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	4 Orang	Balai Benih Ikan Ciracas	Tenaga Pendamping Lapangan	September - November 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	
21	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Praktek Lapangan	Politeknik AUP		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	11 Orang	Balai Benih Ikan Kalideres	Tenaga Pendamping Lapangan	September - November 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
22	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Praktek Lapangan	Politeknik AUP		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	11 Orang	Balai Benih Ikan Ujung Menteng	Tenaga Pendamping Lapangan	September - November 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	
23	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Praktek Lapangan	SMKN 36		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	8 Orang	Balai Benih Ikan Ciganjur	Tenaga Pendamping Lapangan	Oktober 2025 - September 2026	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	
24	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Praktek Lapangan	SMKN 36		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	4 Orang	Balai Benih Ikan Ciracas	Tenaga Pendamping Lapangan	Oktober 2025 - September 2026	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
25	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Praktek Lapangan	SMKN 36		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	10 Orang	Balai Benih Ikan Ujung Menteng	Tenaga Pendamping Lapangan	Oktober 2025 - September 2026	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	
26	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Pelatihan	Pemerintah Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	8 Orang	Balai Benih Ikan Ciganjur	Tenaga Pendamping Lapangan	Oktober 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	
27	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Kunjungan	TK Mutiara Hikmah		Kunjungan	40 Orang	Balai Benih Ikan Ciganjur	Tenaga Pendamping Lapangan	Oktober 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
28	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Kunjungan	Paud An-Nahl		Kunjungan	40 Orang	Balai Benih Ikan Ciganjur	Tenaga Pendamping Lapangan	November 2025	Terwujudnya peningkatan kompetensi dengan pemberian materi dan praktek kerja lapangan terkait budidaya ikan air tawar	Non Mou	
29	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Kerjasama Pengujian Laboratorium	UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP) Medan		Pemberian sarana pengujian	53 parameter uji	Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Pluit	Pengujian Laboratorium	22 Maret 2022 - Jika sudah tidak memenuhi syarat / ada perubahan	Mou	Mou	MoU Perjanjian SubKontrak Pengujian Produk Hasil Perikanan
30	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Kerjasama Pengujian Laboratorium	Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang		Pemberian sarana pengujian	53 parameter uji	Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Pluit	Pengujian Laboratorium	1 Juni 2022 - 1 Juni 2027	Mou	Mou	MoU Perjanjian SubKontrak Pengujian Produk Hasil Perikanan
31	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Kerjasama Pengujian Laboratorium	Lembaga Inspeksi Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jakarta II		Pemberian sarana pengujian	53 parameter uji	Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Pluit	Pengujian Laboratorium	12 Agustus 2024 - Jika sudah tidak memenuhi syarat / ada perubahan	Mou	Mou	MoU Perjanjian SubKontrak Pengujian Produk Hasil Perikanan

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
32	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	Kerjasama Pengujian Laboratorium	Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP) Kalimantan Selatan		Pemberian sarana pengujian	53 parameter uji	Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Pluit	Pengujian Laboratorium	29 September 2024 - 28 November 2026	Mou	Mou	MoU Perjanjian SubKontrak Pengujian Produk Hasil Perikanan

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
33	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara	Sosialisasi Tata Cara Pemotongan Hewan Kurban	1. PT. Indonesia Power 2. Dewan Masjid Indonesia Jakarta Utara 3. IPB University	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Utara	Sosialisasi tata cara pemotongan hewan kurban bagi pengurus dan panitia pemotongan hewan kurban sebanyak 100 orang dari 100 masjid di Jakarta Utara	100 orang	Gedung Balai Yos Sudarso Lantai 2 Blok Q Komplek Walikota Jakarta Utara	1. PT. Indonesia Power memberikan bantuan sarana peningkatan higienitas pemotongan berupa pisau sembelih dan terpal 2. Dewan Masjid Indonesia Jakarta Utara mengerahkan peserta dari anggota DMI 3. IPB University memberikan 2 orang narasumber dari FKH dan Fakultas Peternakan	26 Mei 2025	Terlaksananya sosialisasi tata cara pemotongan hewan kurban bagi pengurus dan panitia pemotongan hewan kurban sebanyak 100 orang dari 100 masjid di Jakarta Utara	Non Mou	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
34	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara	Sterilisasi Kucing Jantan dalam rangka World Rabies Day	1. PT. Perfect Companion Indonesia 2. PT. Duta Lestari Sentratama 3. Emye Kelapa Gading 4. Pramuka Kwarcab Jakarta Utara	Unit Pengelola Gelanggang Kota Adm Jakarta Utara (GOR) Kecamatan Pademangan	Sterilisasi Kucing Jantan dalam rangka World Rabies Day	Sterilisasi kucing 250 ekor	GOR Pademangan	1. PT. Perfect Companion Indonesia memberikan bantuan pakan sebanyak 20 dus 2. PT. Duta Lestari Sentratama memberikan bantuan pakan kucing sebanyak 5 dus 3. Emye Kelapa Gading memberikan bantuan tenaga dokter hewan sebanyak 8 orang 4. Unit Pengelola Gelanggang meminjamkan tempat GOR Pademangan	30 September 2025	Terlaksananya steril kucing sebanyak 250 ekor	Non Mou	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
35	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara	Sterilisasi Kucing Jantan Massal	Emye Kelapa Gading	Unit Pengelola Gelanggang Kota Adm Jakarta Utara	Sterilisasi Kucing Jantan Massal	Steriliasi kucing 250 ekor	Gelanggang Remaja Jakarta Utara	1. Emye Kelapa Gading memberikan bantuan tenaga dokter hewan dan paramedis sebanyak 8 orang 2. Unit Pengelola Gelanggang meminjamkan tempat GRJU	21 Oktober 2025	Terlaksananya steril kucing sebanyak 250 ekor	Non Mou	
36	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara	Sterilisasi Kucing Jantan Massal	1. Emye Kelapa Gading 2. Pramuka Kwarcab Jakarta Utara		Sterilisasi Kucing Jantan Massal	Steriliasi kucing 250 ekor	Gelanggang Remaja Jakarta Utara	1. Emye Kelapa Gading memberikan bantuan tenaga dokter hewan dan paramedis sebanyak 8 orang 2. Pramuka Kwarcab Jakarta Utara meminjamkan tempat ruang serba guna dan bantuan tenaga	21 Agustus 2025	Terlaksananya steril kucing sebanyak 250 ekor	Non Mou	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
37	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara	Sterilisasi Kucing Jantan Massal	1. Emye Kelapa Gading 2. Pramuka Kwarcab Jakarta Utara	Unit Pengelola Gelanggang Kota Adm Jakarta Utara	Sterilisasi Kucing Jantan Massal	Sterilisasi kucing 250 ekor	Gelanggang Remaja Jakarta Utara	1. Emye Kelapa Gading memberikan bantuan tenaga dokter hewan dan paramedis sebanyak 8 orang 2. Unit Pengelola Gelanggang meminjamkan tempat GRJU 3. Pramuka membantu pelaksanaan steril dengan mengirimkan anggota sebanyak 15 orang	22 Juli 2025	Terlaksananya steril kucing sebanyak 250 ekor	Non Mou	
38	Pusat Budidaya Dan Konservasi Laut	Penanaman Mangrove	1. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 2. Gerakan Mengajar Desa DKI Jakarta	1. Dinas Perhubungan 2. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu	Pemberian Edukasi Terkait Manfaat dan Pentingnya Mangrove serta melakukan Aksi Penanaman Mangrove	80.000 Bibit Mangrove di Wilayah Kepulauan Seribu	Penanaman pada 6 (enam) pulau: Pulau Tidung Besar, PulauTidung Kecil, Pulau Pramuka, Pulau Pari dan Pulau Onrust	Dukungan Bibit Mangrove	Januari-November 2025	Terlaksananya Penanaman Mangrove Sampai Dengan November 2025 Sebanyak 74.720 Pohon	Non MOU	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
			3. Universitas Gajah Mada 4. Aliansi Pemuda Kepulauan Seribu 5. Lestra Vida 6. Institut Pertanian Bogor 7. Leva (komunitas Pecinta Lingkungan) 8 Pokdarwis Pulau Tidung 9. Universitas Negeri Jakarta 10. Sekolah Alam Indonesia 11. Hayat School Bandung 12. Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKAN) 13. UHAMKA 14. STKIP Arrahmaniyah Depok	3. Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab Administrasi Kepulauan Seribu 4. Suku Dinas KPKP Kepulauan Seribu 5. PK3D DKI Jakarta								

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
			15. Mangrove Jakarta 16. Universitas Brawijaya 17. Univeristasi Trisakti 18. Kamar Ijo Community 19. SMKN 61 Jakarta 20. yayasan Penjaga Laut Muda 21. Nautika ITB 22. Jejak Seribu 23. IPPNU Kep Seribu 24. BEM FPIK USNI 25. Universitas Airlangga 26. President University 27. Gerakan Pramuka Satuan Karya Kalpataru Kep Seribu 28. Great Eastern Life Indonesia 29. Universitas Paramadina 30. DPL BM Pulau Tidung 31. TNI AL									

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
			32. Kelompok Penunggal Pulau Tidung 33. Bawaslu 34. SMP Sekolah Alam Bintaro 35. Nusapala (Nusantara Pecinta Alam Institut Bisnis Nusantara) 36. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah 37. UNINDRA									
		Restocking	1. Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) 2. SMKN 61 Provinsi DKI Jakarta 3. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama 4. PBNU dan Gerakan Mengajar Desa 5. Perkumpulan Komunitas Jakarta Mengabdi 6. DPL BM 7. PNLG Forum 2025 8. Mangrove Jakarta 9. Institut	1. Bidang Kelautan DKPKP (Coral Triangel Day 2025) 2. Sudin Parekraf Kab. Adm. Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta 3. Biro KSD Setda DKI Jakarta	Pemberian Edukasi Terkait Pentingnya Restocking Ikan dan Melakukan Aksi Restocking Ikan Ke Perairan Kepulauan Seribu	10.000 Benih Ikan di Wilayah Perairan Kepulauan Seribu	Pulau Tidung Besar, Pulau Tidung Kecil, Pulau Pramuka dan Pulau Payung	Dukungan benih Ikan	Januari - November 2025	Jumlah Restocking ikan Sampai Dengan September 2025 Sebanyak 10.310 Benih Ikan	Non MOU	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
			Pertanian Bogor									

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
		Pembibitan karang	1. Universitas Jenderal Soedirman 2. Universitas Gajah Mada 3. Leva 4. Universitas Negeri Jakarta 5. Hayat School Bandung 6. Institut Pertanian Bogor 7. Mangrove Jakarta 8. Universitas Trisakti 9. Penjaga Laut Muda 10. Jakarta Mengabdi 11. Leva 12. Universitas Airlangga 13. Universitas Brawijaya 14. Universitas President 16. PT Lira Permata Cibubur 17. PLNG 18. Sekolah Alam Bintaro 19. Penjaga Laut Jakarta 20. Dedikasi Kita	1. Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab Administrasi Kepulauan Seribu 2. Bidang kelautan DKPKP	Pemberian Edukasi Terkait Pentingnya Karang dan Melakukan Aksi Pembibitan Karang di Perairan Kepulauan Seribu	10.288 Bibit Karang di Wilayah Perairan Kepulauan Seribu	Pulau Tidung Besar, PulauTidung Kecil, Pulau Pari, Pulau Pramuka dan Pulau Payung	Dukungan bibit karang	Januari - November 2025	Jumlah Pembibitan Karang Sampai Dengan November 2025 Sebanyak 17.030 Bibit Karang	Non MOU	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
39	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	Pelayanan Kapal Ikan	Syahbandar Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tugas Kesyahbandaran di PPN Muara Angke	2.000 kapal	Kantor Pengawas Kapal Perikanan (Waski)	Dukungan sarana, prasarana, data kesyahbandaran dan publikasi	Januar s.d. Desember 2025	Terlaksananya Pelayanan Kesyahbandaran di PPN Muara Angke	Non MOU	
40	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kunjungan	DPRD Provinsi Sumatera Selatan		Kunjungan dalam Rangka mempelajari Aktivitas dan Tata Kelola Pasar Ikan Muara Angke	20 orang	Pasar Grosir dan Pengecer Ikan Muara Angke	Dukungan Sarana dan Prasarana	15 Februari 2025	Terlaksananya kegiatan kunjungan dan studi banding	Non MOU	
41	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Balai Besar Kekarantinaa n Kesehatan Tanjung Priok Wilker Pelabuhan Muara Angke dan Pantai Mutiara	Kementerian Kesehatan	Pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol & konsultasi kesehatan	50 orang	TPI Muara Angke	Dukungan Sarana dan Prasarana	22 April 2025	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Non MOU	
42	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	Monitoring/Pengawasan Keamanan Pangan Produk Hasil Perikanan	1. Dinas KPKP 2. PSDKP-KKP 3. Kepolisian 4. PPNS	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kepolisian	Pengambilan sampel Produk Hasil Perikanan di Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) Muara Angke	10 Pengolah Produk Perikanan Tradisional	PHPT Muara Angke	Dukungan Sarana dan Prasarana dan Tenaga Pendamping	24 April 2025	Terlaksananya kegiatan Monitoring/Pengawasan Keamanan Pangan Produk Hasil Perikanan	Non MOU	
43	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kunjungan	Universitas Trisakti		Mendampingi kegiatan praktik lapangan mahasiswa/i Universitas Trisakti ke Unit Pengolahan Ikan di Kawasan PPN Muara Angke	5 orang	Unit Pengolahan Ikan (Coldstorage)	Tenaga Pendamping Lapangan	29 April 2025	Terlaksananya kegiatan praktik lapangan	Non MOU	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
44	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	Penanaman 10.000 Bibit Mangrove	Komunitas Mangrove Muara Angke	1. PT. Pembangkit Jawa Bali (PJB) 2. Dinas KPKP	Penanaman 10.000 bibit mangrove	10.000 bibit mangrove	Ecomarine Mangrove Muara Angke	Dukungan Sarana dan Prasarana dan Tenaga Pendamping Lapangan	5 Juni 2025	Terlaksananya kegiatan penanaman 10.000 bibit mangrove	Non MOU	
45	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	Pelatihan Pemanfaatan Limbah Kerang sebagai Produk Kerajinan	Bank Sampah Bahari Utama		Mengikuti kegiatan pelatihan pemanfaatan limbah kerang sebagai produk kerajinan	50 orang	RPTRA Angke	Tenaga Pendamping Lapangan	25 Juni 2025	Terlaksananya kegiatan pelatihan pemanfaatan limbah kerang	Non MOU	
46	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	Tera Ulang Timbangan	Unit Pengelola Metrologi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	Pelaksanaan tera ulang pada alat ukur dan timbangan	50 timbangan	TPI Muara Angke dan Pasar Grosir Ikan	Tenaga Pendamping Lapangan	9 Juli dan 15 Juli 2025	Terlaksananya tera ulang pada alat ukur dan timbangan	Non MOU	
47	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	Observasi	Universitas Pendidikan Indonesia		Mendampingi kegiatan praktik lapangan mahasiswa/I UPI di PPN Muara Angke	5 orang	PPN Muara Angke	Tenaga Pendamping Lapangan	14 Juli 2025	Terlaksananya kegiatan praktik lapangan mahasiswa/I UPI	Non MOU	
48	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	Serbuan Maritim	KOARMADARI	Tentara Nasional Indonesia	Kegiatan membersihkan Kolam Pelabuhan dan Dermaga PPN Muara Angke	100 orang	Dermaga PPN Muara Angke	Dukungan Sarana dan Prasarana dan Tenaga Pendamping Lapangan	18 Juli 2025	Terlaksananya Kegiatan membersihkan Kolam Pelabuhan	Non MOU	
49	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	Donor Darah, Sunat Massal dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	TNI AL	Tentara Nasional Indonesia	Kegiatan Donor Darah, Sunat Masal dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	100 orang	TPI Muara Angke	Dukungan Sarana dan Prasarana dan Tenaga Pendamping Lapangan	21 Jui 2025	Terlaksananya Kegiatan Donor Darah, Sunat Masal dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Non MOU	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
50	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	Studi Banding	UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Daerah Wilayah IV Tidore Kepulauan Prov. Maluku Utara		Kunjungan dalam Rangka mempelajari kegiatan perikanan di PPN Muara Angke	20 orang	TPI Muara Angke	Tenaga Pendamping Lapangan	21 Agustus 2025	Terlaksananya kegiatan studi banding	Non MOU	
51	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kunjungan Risalah Ilmiah	SDIT Muhammadiyah An Najah Jatinom		Kegiatan kunjungan dalam rangka rihlah ilmiah tentang keanekaragaman biota laut	50 orang	TPI Muara Angke	Tenaga Pendamping Lapangan	23 Agustus 2025	Terlaksananya kegiatan kunjungan risalah ilmiah	Non MOU	
52	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kunjungan Lapangan	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta		Kunjungan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Tanggul Mitigasi Pelabuhan Nelayan Greenbay Pluit	10 orang	Dermaga Timur PPN Muara Angke	Tenaga Pendamping Lapangan	27 Agustus 2025	Terlaksananya kegiatan kunjungan lapangan	Non MOU	
53	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	Penelitian	IPB		Studi Lapangan kegiatan industri Perikanan Tangkap	3 orang	PPN Muara Angke	Tenaga Pendamping Lapangan	13 Okt s.d. 13 Nov 2025	Terlaksananya Studi Lapangan kegiatan industri perikanan tangkap	Non MOU	
54	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	Pendidikan Sistem Ganda (PSG)	SMK Remaja Pluit		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	4 orang	PPN Muara Angke	Tenaga Pendamping Lapangan	Jan s.d. April 2025	Terlaksananya Pendidikan Sistem Ganda (PSG)	Non MOU	
55	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	Studi Banding	SMA Gonzaga		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	60 orang	Pasar Grosir Ikan, PHPT dan Tempat Pelelangan Ikan	Tenaga Pendamping Lapangan	2 Oktober 2025	Terlaksananya kegiatan Studi Banding	Non MOU	
56	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	Magang	Sekolah Tinggi Perikanan		Pemberian Materi dan Praktek Lapangan	7 orang	PPN Muara Angke	Tenaga Pendamping Lapangan	28 Juli s.d. 19 September 2025	Terlaksananya kegiatan magang	Non MOU	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
57	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	Sosialisasi Produk	PT. Bank BNI		Pemberian sosialisasi produk Bank BNI kepada para Pelaku Usaha Perikanan	30 orang	Kantor UP3	Dukungan sarana	12 November 2025	Terlaksananya Sosialisasi Produk PT. Bank BNI	Non MOU	
	Sudin KPKP Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Sterilisasi dan Vaksinasi Kucing	PDHI	-	Pelaksanaan sterilisasi dan vaksinasi	100 ekor	Pulau Sabira	Tenaga Dokter Hewan	22-24 Maret 2025	162 ekor	MoU	
	Sudin KPKP Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Sterilisasi dan Vaksinasi Kucing	PDHI	-	Pelaksanaan sterilisasi dan vaksinasi	100 ekor	Pulau Kelapa dan Pulau Harapan	Tenaga Dokter Hewan	22-23 Mei 2025	298 ekor	MoU	
	Sudin KPKP Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Sterilisasi dan Vaksinasi Kucing	PDHI	-	Pelaksanaan sterilisasi dan vaksinasi	100 ekor	Pulau Pramuka	Tenaga Dokter Hewan	8-10 Juli 2025	261 ekor	MoU	
	Sudin KPKP Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Sterilisasi dan Vaksinasi Kucing	PDHI	-	Pelaksanaan sterilisasi dan vaksinasi	100 ekor	Pulau Panggang	Tenaga Dokter Hewan	23-24 Juli 2025	225 ekor	MoU	
	Sudin KPKP Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Sterilisasi dan Vaksinasi Kucing	PDHI	-	Pelaksanaan sterilisasi dan vaksinasi	100 ekor	Pulau Tidung	Tenaga Dokter Hewan	13-14 Juli 2025	193 ekor	MoU	
	Sudin KPKP Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Sterilisasi dan Vaksinasi Kucing	PDHI	-	Pelaksanaan sterilisasi dan vaksinasi	100 ekor	Pulau Pari	Tenaga Dokter Hewan	9-11 September 2025	173 ekor	MoU	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
	Sudin KPKP Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Sterilisasi dan Vaksinasi Kucing	PDHI	-	Pelaksanaan sterilisasi dan vaksinasi	100 ekor	Pulau Lancang	Tenaga Dokter Hewan	15-16 Oktober 2025	198 ekor	MoU	
	Sudin KPKP Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Sterilisasi dan Vaksinasi Kucing	PDHI	-	Pelaksanaan sterilisasi dan vaksinasi	100 ekor	Pulau Untung Jawa	Tenaga Dokter Hewan	12-13 November 2025	217 ekor	MoU	
	Sudin KPKP Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Sterilisasi dan Vaksinasi Kucing	PDHI	-	Pelaksanaan sterilisasi dan vaksinasi	100 ekor	Pulau Payung	Tenaga Dokter Hewan	Desember 2025		MoU	
	Sudin KPKP Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Sterilisasi dan Vaksinasi Kucing	PDHI	-	Pelaksanaan sterilisasi dan vaksinasi	100 ekor	Pulau Kelapa Dua	Tenaga Dokter Hewan	Desember 2025		MoU	
	Sudin KPKP Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Sterilisasi dan Vaksinasi Kucing	PDHI	-	Pelaksanaan sterilisasi dan vaksinasi	100 ekor	Pulau Harapan	Tenaga Dokter Hewan	Desember 2025		MoU	
	Sudin KPKP Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Urban Farming	Universitas Indonesia	SMPN 61 Pulau Kelapa	Pengabdian masyarakat	Siswa SMPN 61 Pulau Kelapa	RPTRA Pulau Kelapa	Penyuluhan dan praktik budidaya hidroponik sistem week	21 Juni 2025	Munculnya minat siswa SMPN 61 terhadap budidaya hidroponik	Non MoU	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	East Jakarta Agriculture Festival 2025	Komunitas Pencinta Kucing Sehat (KPKS)	<ul style="list-style-type: none"> - Sudin Kebudayaan - Sudin Pertamanan dan Hutan Kota - Sudin Pariwisata dan Parekraf - Sudin Perhubungan - Sudin Kominfotik - Sudin Lingkungan Hidup - Sudin Kesehatan - Satpol PP 	Pemberian wadah bagi penggiat agriculture yang meliputi 3 sektor yaitu pertanian, perikanan, dan peternakan yang dikemas dalam satu kegiatan.	<p>Terlaksananya serangkaian kegiatan yaitu Talkshow, Success Story penggiat urban farming dan binaan Jakpreneur, bimbingan teknis tentang Peningkatan Peluang usaha Urban Farming melalui Budidaya Hidroponik, dan Bazar.</p>	Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB) Jakarta Timur	<p>1. PT. JIEP PULOGADUNG : Memberikan dana sponsorship sebesar Rp 25.000.000</p> <p>2. PT Bank Jakarta: memberikan dana sponsporship sebesar Rp 10.000.000</p> <p>3. PT Antam : memberikan dana sponsorship Rp 5.000.000</p> <p>4. Baznas Basis Kota Jakarta Timur : Snack Box 1.000 box</p> <p>5. PT.MARS Pet Nutrition : memberikan makanan kucing dan narasumber sosialisasi sterilisasi</p> <p>6. Yayasan Peduli Lingkungan Indonesia (YPLI) : Sterilisasi Kucing Betina sebanyak 3 ekor</p>	10 Juni 2025	<p>Terlaksananya serangkaian kegiatan yaitu Talkshow, Success Story penggiat urban farming dan binaan Jakpreneur, bimbingan teknis tentang Peningkatan Peluang usaha Urban Farming melalui Budidaya Hidroponik, dan Bazar.</p>	MOU (Nota Kesepakatan) dan Non MoU	

N o.	Nama UKPD/Bi dang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/O utput	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolabor ator (MOU/N on MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
								7. doorprize peserta				

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Pasar Tumbuh	- Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta - HIPMI Jakarta Timur - PT. East West Seed Indonesia - PT. Sekar Bumi - PT. Bank Jakarta	- Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta - Sudin Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur - Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur - Sudin Parekraf Kota Administrasi Jakarta Timur - Sudin Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Timur - UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Provinsi DKI Jakarta - UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi DKI Jakarta	Memfasilitasi dan promosi berkelanjutan bagi penggiat urban farming, pelaku UMKM, komunitas, dan sekolah, menyediakan ruang edukasi, kolaborasi, dan ekspresi warga secara rutin, menjadikan urban farming sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan	- Untuk Bulan September Talkshow dengan narasumber Sdr. Sertu Triyono (Ketua Kelompok Tani Yasmine Hidroponik) dengan tema Potensi Diskusi Budidaya Pertanian. Untuk Bulan Oktober Workshop dengan narasumber dari UPT P2BPT dengan tema Pembuatan Pupuk Tanaman. - Pasar Tani yang diikuti oleh 65 peserta dari 10 kecamatan dengan berbagai macam hasil pertanian, peternakan dan perikanan. - Pelayan	Halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	- HIPMI Jakarta Timur : Memberikan Dana untuk Pintu Gate Pasar Tumbuh - PT. East West Seed Indonesia : Doorprize Pasar Tumbuh - PT. Sekar Bumi : Doorprize Pasar Tumbuh - PT. Bank Jakarta : Memberikan Dana sponsorship Rp 20.000.000 untuk Tenda Bazzar Pasar Tumbuh dan Doorprize - Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta : Memberikan Dana sponsorship sebesar Rp 20.000.000 - Sudin Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur : Hiburan Band dan Penyanyi - Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur : Genset - Sudin Parekraf Kota Administrasi Jakarta Timur : Promosi	29 Agustus 2025, 26 September, 31 Oktober 2025	Terlaksananya : - Workshop dengan narasumber dari UPT P2BPT dengan tema Pembuatan Pupuk Tanaman. - Pasar Tani yang diikuti oleh 65 peserta dari 10 kecamatan dengan berbagai macam hasil pertanian, peternakan dan perikanan. - Pelayanan konsultasi melalui mobil klinik tanaman disertai pembagian bibit tanaman gratis dan pupuk tanaman gratis. - Vaksinasi hewan kesayangan gratis. - Live music, pembagian doorprize dan senam pagi.	Non MOU	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Penataan Taman (Green House mini)	PT Hydrofarm Indonesia	Walikota Jakarta Timur	Pengembangan budidaya melon secara smart farming	1 unit green house mini	Taman Arunika Kantor Walikota Jakarta Timur	Penyediaan Green House mini	29 Agustus 2025	1 unit green house mini	Non MOU	
	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Tanam Jagung Serentak	-	- Sudin Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Timur - Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur	- Mendorong peningkatan produksi pangan khususnya jagung - Mendukung swasembada pangan nasional dan pengembangan pangan lokal - Meningkatkan kesejahteraan petani - Mengurangi ketergantungan pada impor khususnya jagung	Kegiatan Tanam Serentak dilakukan dengan 181 lokasi dari 10 Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	10 Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	- Sudin Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Timur : Dukungan Link Zoom dan Publikasi - Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur : Dukungan Genset	3 Oktober 2025	Terlaksananya : - Peningkatan produksi pangan khususnya jagung - Pendukung swasembada pangan nasional dan pengembangan pangan lokal - Peningkatan kesejahteraan petani - Pengurangan ketergantungan pada impor khususnya jagung	Non MOU	

[illegible]

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Wilayah Jakarta Timur	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pulo Gebang	-	Pelatihan Pembuatan Olahan Perikanan kepada 100 orang pelaku usaha di Jakarta Timur melalui pemberian materi dan praktek pembuatan olahan perikanan dari Chef serta peningkatan strategi pemasaran melalui Food Photographie	100 Orang Pelaku Usaha di Jakarta Timur telah mengikuti kegiatan pelatihan Pengolahan Perikanan yang diselenggarakan oleh Sudin KPKP Jakarta Timur	TC Pertanian Klender	Snack 100 box	6 - 7 Mei 2025	Terlaksanakannya Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan kepada 100 Pelaku Usaha Pengolahan Ikan	Non MOU	
	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Sterilisasi kucing jantan	1. Yayasan Peduli Lingkungan Indonesia (YPLI) 2. PT Bank Jakarta	-	Melaksanakan kegiatan sterilisasi kucing jantan	Sterilisasi Kucing Jantan sebanyak 86 ekor	TC Pertanian Klender	YPLI : Tenaga medis dan Paramedis PT Bank Jakarta : Dana sponsorship	18 Maret 2025	Terlaksananya sterilisasi kucing jantan sebanyak 86 ekor	Non MOU	
	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Sterilisasi kucing Trap Neuter Return (TNR)	Let's Adopt Indonesia	Perumda Pasar Jaya Jatinegara	Melaksanakan sterilisasi kucing liar di lingkungan Pasar Jatinegara	sterilisasi kucing liar di lingkungan Pasar Jaya Jatinegara sebanyak 43 ekor jantan dan 68 ekor betina	Perumda Pasar Jaya Jatinegara	Tenaga medis, Paramedis dan obat"an	15 April 2025	Telaksananya sterilisasi kucing liar di lingkungan Pasar Jaya Jatinegara sebanyak 43 ekor jantan dan 68 ekor betina	Non MOU	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	bimbingan teknis pemeriksaan dan pemotongan hewan dan daging kurban yang halal dan toyyib	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jakarta Timur	DKM, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB)	Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pemeriksaan dan pemotongan hewan dan daging kurban yang halal dan toyyib	Terlaksananya bimbingan teknis untuk pengurus masjid di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 200 orang	Ruang Pola Gedung A Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur	penyediaan bantuan terpal sebanyak 200 unit dan snack sebanyak 200 box	4 Juni 2025	penyediaan bantuan terpal sebanyak 200 unit dan snack sebanyak 200 box	Non MOU	
	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Sterilisasi kucing Trap Neuter Return (TNR)	Let's Adopt Indonesia	Perumda Pasar Jaya Jatinegara	Melaksanakan kegiatan sterilisasi kucing sebanyak 32 jantan dan 45 betina	sterilisasi kucing sebanyak 32 jantan dan 45 betina	Pasar Jatinegara	Tenaga medis dan Paramedis	17 Juni 2025	Melaksanakan kegiatan sterilisasi kucing sebanyak 32 jantan dan 45 betina	Non MOU	
	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Sterilisasi kucing Trap Neuter Return (TNR)	Let's Adopt Indonesia	Perumda Pasar Jaya Jatinegara	Melaksanakan kegiatan sterilisasi kucing sebanyak 70 Jantan	Sterilisasi Kucing Jantan sebanyak 70 ekor	Pasar Jatinegara	Tenaga medis dan Paramedis	29 Juni 2025	Terlaksananya sterilisasi kucing jantan sebanyak 70 ekor	Non MOU	
	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi	Sterilisasi kucing jantan secara Kolaborasi	Komunitas Pencinta Kucing Sehati (KPKS)	TC Pertanian Klender	Melaksanakan kegiatan sterilisasi kucing sebanyak 250 Jantan	Sterilisasi Kucing Jantan sebanyak 250 ekor	TC Pertanian Klender	membantu menangkap kucing dan penanganan pasca steril	19 Juli 2025	Terlaksananya sterilisasi kucing jantan sebanyak 250 ekor	Non MOU	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
	Jakarta Timur											
	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Sterilisasi kucing secara Kolaborasi	YPLI	1. Rusun Rawa Bebek	Melaksanakan kegiatan sterilisasi kucing sebanyak 9 Betina	Sterilisasi Kucing Betina sebanyak 9 ekor	Rusun Rawa Bebek	Tenaga medis dan Paramedis	20 Agustus 2025	Terlaksananya sterilisasi kucing betina sebanyak 9 ekor	Non MOU	
	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Sterilisasi kucing secara Kolaborasi	Ciyo Pet Care	Ciyo Pet Care	Melaksanakan kegiatan sterilisasi kucing sebanyak 17 jantan dan 8 betina	sterilisasi kucing sebanyak 17 jantan dan 8 betina	Ciyo Pet Care	Tenaga medis, Paramedis dan obat"an	20 Agustus 2025	Terlaksananya sterilisasi kucing jantan sebanyak 17 ekor dan betina sebanyak 8 ekor	Non MOU	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/O utput	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolabor ator (MOU/N on MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
	Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	World Rabies Day- 2025	<p>Dukungan Swasta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Let's Adopt Indonesia - Komunitas Pencinta Kucing Sehati (KPKS) - PT. Eka Boga Inti - PT. Frisian Flag - PT. Uni-Charm Indonesia Tbk - PT. Artha Global Sukses - YPLI <p>Dukungan UKPD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudin Pendidikan - Bagian Umum dan Protokol - Satpol PP - Sudin Perhubungan - Sudin Kominfotik - Camat Cakung - Lurah Pulo Gebang <p>DKPKP</p>	1. Walikota Jakarta Timur 2. Sudin Pendidikan I 3. Sudin Kominfo JT 4. Sudin Perhubungan JT 5. Satpol PP JT	Melaksanakan kegiatan sterilisasi kucing, vaksinasi rabies dan KIE (komunikasi Informasi Edukasi) terkait berbuat baik bagi hewan jalanan untuk kesehatan manusia dan tata cara perawatan kucing pasca sterilisasi (Kastrasi)	sterilisasi kucing sebanyak 394 jantan dan 6 betina	Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Timur	<p>Dukungan Swasta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Let's Adopt Indonesia : narasumber sosialisasi sayang hewan kepada siswa/i SD - KPKS : membantu menangkap kucing dan penanganan pasca steril - PT. Eka Boga Inti : Hadiah - PT. Frisian Flag : Konsumsi susu peserta - PT. Uni-Charm Indonesia Tbk : Pakan Hewan - PT. Mars Symbioscience Indonesia : Pakan Hewan - PT. Artha Global Sukses : Kostum Panita - YPLI : Pelaksana Sterilisasi <p>Dukungan Swasta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudin Pendidikan : Pengarahan Siswa - Bagian Umum dan Protokol : Ruangan kegiatan, Meja, Kursi, Sound - Satpol PP : Pengatur Alur Kegiatan dan Keamanan - Sudin Perhubungan : 	20 September 2025	Sterilisasi Kucing sebanyak 400 ekor, menambah wawasan cinta hewan sejak dini sebanyak 200 siswa/siswi SD dan Vaksinasi rabies sebanyak 217 ekor	Non MOU	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
	Bidang Kelautan	Pemantauan Ekosistem Pesisir Laut dan Pulau Pulau Kecil	Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB	Bupati Kepulauan Seribu, Sekretaris Dinas, Bidang Perikanan, PBKL, Sudin KPKP Jakut dan Sudin KPKP P1000	menciptakan informasi geospasial yang efektif dan efisien menuju One Data One Map perairan kepulauan seribu serta updating data ekosistem pesisir dan bawah laut	Dokumen Hasil Pemantauan Ekosistem Pesisir Laut dan Pulau Pulau Kecil	Perairan DKI Jakarta	Tenaga Ahli Kelautan dan Perikanan	3 Februari 2025 sampai dengan 3 Mei 2025	Dokumen Hasil Pemantauan Ekosistem Pesisir Laut dan Pulau Pulau Kecil	PKS	
	Bidang Kelautan	Indeks Kesehatan Laut Daerah	Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB	LPSPL Serang, Bupati Kepulauan Seribu, DLH, Sekretaris Dinas, Bidang Perikanan, PBKL, Sudin KPKP Jakut dan Sudin KPKP P1000	mewujudkan ekosistem laut yang sehat serta mengkaji program kegiatan yang mendasari pencapaian dalam merumuskan dan menentukan kebijakan yang mempromosikan laut yang sehat	Nilai Indeks Kesehatan Laut Daerah DKI Jakarta Tahun 2025	Perairan DKI Jakarta	Tenaga Ahli Kelautan dan Perikanan	26 Mei 2025 sampai dengan 24 Agustus 2025	Nilai Indeks Kesehatan Laut Daerah DKI Jakarta (IKLD DKI Jakarta tahun 2025 sebesar 69,65)	PKS	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
	Bidang Kelautan	Penetapan Kawasan Konservasi Perairan	Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, KKP,	Walikota Administrasi Jakarta Utara, Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta, Camat Kepulauan Seribu Selatan, Lurah Kep. Seribu Selatan, Babinsa Kelurahan Pulau Pari, Bhabin Pantibmas Kelurahan Pulau Pari, Tim Pelaksana Swakelola Tipe II FPIK-IPB, DPL-BM Pulau Lancang	Terpilihnya kelembagaan SUOP berdasarkan SOTK DKPKP DKI Jakarta dan tersusunnya dokumen perencanaankelembagaan SUOPdalam pengelolaan kawasan konservasidi Daerah Provinsi DKI Jakarta	Dokumen penyusunan kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan di DKI Jakarta	Perairan DKI Jakarta	Tenaga Ahli konsultan Kelautan dan perikanan, tenaga ahli hukum kelautan	26 Mei 2025 sampai dengan 24 Agustus 2025	Dokumen Kelembagaan SUOP sesuai SOTK DKPKP Provinsi DKI Jakarta dalam hal pengelolaan kawasan konservasi perairan di DKI Jakarta	PKS	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/N on MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
	Bidang Kelautan	Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Kekhususan Kelautan dan Perikanan	Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung Jawa Barat	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bidang Kelautan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	memberikan landasan akademis serta analisis yuridis, sosiologis dan filosofis terhadap kebijakan daerah pada sektor kelautan dan perikanan sebagai tindak lanjut dari kewenangan pasal 35 dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta	Dokumen Naskah Akademik dan Ranperda	Provinsi DKI Jakarta	Tenaga Ahli Hukum Maritim Perdata dan Pidana, Tenaga ahli perikanan dan kelautan	14 April 2025 sampai dengan 11 september 2025	Dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kekhususan Bidang kelautan Perikanan Provinsi DKI Jakarta	PKS	

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/N on MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
	Bidang Kelautan	Coral Triangle Day 2025	PKSPL IPB, PT.Pembangunan Jaya Ancol, Leva, Terangi,DCA dan Mangrove Jakarta	PBKL. Sudin LH Kep.1000, Kominfotik Sudin Kep.1000, PK3D	pelestarian lingkungan perairan untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan kelautan di Jakarta agar kerugian secara ekologis dan ekonomis tidak semakin menyengsarakan masyarakat	Gerakan bersih pantai dan penanaman mangrove yang dilakukan oleh para pemuda peserta CTD, Restocking Ikan dan Transplantasi Karang	Kepulauan 1.000 (P.Pramuka dan P.Tidung Kecil)	terjalannya kerjasama dari semua pihak, instansi terkait, masyarakat dan di kalangan remaja terutama mahasiswa dan pelajar	selama 2 hari (tgl.25 s.d 26 Juni 2025)	1. bertambahnya wawasan pelajar dan mahasiswa, terkait dengan transplantasi terumbu karang, restocking ikan, menanam mangrove, aksi bersih pantai, pesisir dan laut untuk serta pengenalan Konservasi Penangkaran Penyu dan Transplantasi Padang lamun		jumlah peserta 100 org Mahasiswa dan Pelajar se-Jabodetabek

N o.	Nama UKPD/Bi dang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/O utput	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolabor ator (MOU/N on MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
										2. untuk mendukung mahasiswa dan pelajar terhadap dampak dari pencemaran laut, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan wisata bahari yang berkelanjutan sesuai dengan tema kegiatan coral day yang ada saat ini yaitu “Balancing Marine Conservation and Blue Economy”.		

N o.	Nama UKPD/Bidang	Kegiatan	Kolaborator / Pihak Eksternal	Instansi /OPD Terkait	Strategi/Aksi	Target/Output	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Waktu Pelaksanaan	Hasil/Output	Kolaborator (MOU/Non MOU)	Keterangan (Penjelasan Tambahan)
1	Bidang Perikanan	Bimbingan Teknis Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	- UNINDO - Bank Indonesia perwakilan DKI Jakarta - Bank Jakarta	Kementerian Kelautan dan Perikanan	- Menghasilkan benih ikan yang bersertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) - Menghasilkan pembenih/pembudi daya/petugas yang mumpuni dalam penerapan CPIB	40 orang peserta terdiri dari Pembenih Ikan DKI Jakarta dan petugas BBI Ciganjur	Balai Benih Ikan Ciganjur	Narasumber : UNINDO, KKP, Bank Indonesia Souvenir : Bank Jakarta Konsumsi: Bank Indonesia Lokasi: BBI Ciganjur - PPISHP Kegiatan Non APBD	14 s.d 16 Juli 2025	Peserta memiliki kemampuan: - Menyusun dokumen Cara Pembenihan Ikan yang Baik - Melakukan pembinaan kepada pembenih lainnya dalam menghasilkan benih yang baik	Non MOU	
2	Bidang Perikanan	Workshop Digitalisasi Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan Memasuki Era Industri 4.0 Tahun 2025	- BAZNAS	- PT. Kreasi Pena Indonesia (Mitme.id) - PT. Paxel Algoritma Unggul (Paxel Indonesia) - PT. Inovasi Ikan Nusantara (Fisnack)	- Pelaku usaha UMKM mampu mengembangkan produk di bidang pemasaran produk melalui online	60 peserta : - UPI UMKM - Pembina Mutu Daerah - Pendamping Jakpreneur - Penyuluh Perikanan	- Dinas KPKP DKI Jakarta - Fisnack Bogor	- Pengadaan Kaos - Pengadaan Transportasi (2 Bus) untuk Kunjungan Ke Lapangan	22 s.d. 23 April 2025	Peserta memiliki kemampuan: - Pelaku usaha UMKM mampu mempublikasikan produk di E-Commerce - Pelaku usaha UMKM melakukan kunjungan lapangan ke pengolahan yang sudah menerapkan sanitasi dan hygiene sesuai standar	Non MOU	

Lampiran 4 Penghargaan Tahun 2025

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Pelaksanaan
1	Terbaik I Penguatan Ketahanan Pangan Perkotaan Melalui Pangan Subsidi di DKI Jakarta	SDGs Action Award 2025	19 November 2025
2	Anjungan dengan Penataan Terbaik	Gerakan Pramuka Kwartir Daerah DKI Jakarta	28 November 2025
3	Peringkat Ketiga Satjer dengan Ketepatan Waktu Pengajuan Rekonsiliasi	Badan Pangan Nasional	23 April 2025
4	Bakti Sosial Sterilisasi Kucing Terbanyak	Badan Pangan Nasional	13 Maret 2025

1. Terbaik I Penguatan Ketahanan Pangan Perkotaan Melalui Pangan Subsidi di DKI Jakarta



2. Anjungan dengan Penataan Terbaik



3. Peringkat Ketiga Satjer dengan Ketepatan Waktu Pengajuan Rekonsiliasi



4. Bakti Sosial Sterilisasi Kucing Terbanyak

